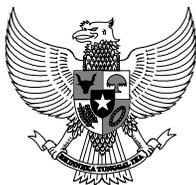




**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN KARO
TAHUN 2005-2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
2020**



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN
2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana...

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
16. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
18. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten Karo yang mengatur struktur dan pola tata ruang Kabupaten Karo.
20. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
21. Arah Kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.
22. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
23. Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJPD TAHUN 2005-2025
Pasal 2

- (1) RPJPD Tahun 2005-2025 adalah rencana 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan:
 - a. visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
 - b. tahapan pembangunan jangka panjang.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati terpilih.

BAB III
SISTEMATIKA RPJPD TAHUN 2005-2025
Pasal 3

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
BAB VI : PENUTUP
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
- (3) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
VISI DAN MISI RPJPD
Pasal 4

- (1) Visi RPJPD Tahun 2005-2025 adalah TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL.
- (2) Misi RPJPD Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:
 - a. mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
 - b. membangun sistem dan koordinasi yang mantap dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. memberdayakan potensi sumber daya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah; dan
 - e. membangun ...

- e. membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan pemuda dan masyarakat dalam lingkup pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, keluarga berencana dan pengentasan kemiskinan.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk melaksanakan visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah tidak menyimpang.
- (6) Evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup terhadap realisasi arah kebijakan, sasaran pokok, dan pentahapan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (7) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- (8) DPRD dapat memberikan masukan pada saat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 22 MEI 2020
BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 22 MEI 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR. 01.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (3-37/2020)

Lampiran
Peraturan Daerah Kabupaten Karo
Nomor 01 Tahun 2020
Tanggal 22 Mei 2020
Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Karo Tahun 2005-2025



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KABUPATEN KARO
TAHUN 2005-2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

2020

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karo ini disusun dengan maksud untuk menetapkan arah pembangunan Kabupaten Karo hingga tahun 2025 mendatang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 ini adalah merupakan dokumen yang berisikan visi, misi, sasaran pokok, arah kebijakan, tahapan dan prioritas pembangunan Kabupaten Karo hingga tahun 2025 mendatang serta kaidah pelaksanaannya.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 ini telah melalui tahapan pembahasan bersama dengan para *stakeholder* Kabupaten Karo melalui tahapan konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Masukan yang diperoleh melalui tahapan-tahapan pembahasan dipergunakan untuk merumuskan dokumen akhir RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025.

Selanjutnya, dokumen RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2022-2026 yang ditetapkan melalui Perda Kabupaten Karo.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

 **BUPATI KARO,**

TERKELIN BRAHMANA, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya	8
1.4. Maksud dan Tujuan.....	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	12
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	12
2.1.1. Aspek Geografi.....	12
2.1.2. Aspek Demografi.....	21
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	26
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	26
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	42
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga.....	47
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	49
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	49
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	88
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	114
2.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang.....	119
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	124
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	124
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur....	127
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.....	130
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	130
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	132
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	133
3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	133

3.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	135
3.1.3	Aspek Pelayanan Umum.....	139
3.1.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	155
3.2	Isu Strategis.....	157
3.2.1.	Penelaahan Isu-isu Strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.....	158
3.2.2.	Penelaahan RPJPD Daerah Lain.....	166
3.2.3.	Isu-Isu Strategis Kabupaten Karo.....	168
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH	178
4.1.	Visi.....	178
4.2.	Misi.....	187
4.3.	Tujuan	193
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	196
5.1	Arah Kebijakan Daerah ...	196
5.1.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan I (2006-2010).....	197
5.1.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan II (2011-2015).....	199
5.1.3.	Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan III (2016-2021).....	199
5.1.4.	Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan IV (2021-2025).....	203
5.2	Sasaran Pokok.....	205
5.2.1	Sasaran Pokok Lima Tahunan I (Tahun 2006-2010).....	205
5.2.2	Sasaran Pokok Lima Tahunan II (Tahun 2011-2015).....	208
5.2.3	Sasaran Pokok Lima Tahunan III (Tahun 2016-2021).....	214
5.2.4	Sasaran Pokok Lima Tahunan IV (Tahun 2022-2025).....	216
BAB VI	PENUTUP.....	245

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2018	13
Tabel 2.2	Jumlah Desa dan Kelurahan Masing-Masing Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2018.....	14
Tabel 2.3.	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut menurut Kecamatan Tahun 2018.....	15
Tabel 2.4.	Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2018.....	21
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2018	23
Tabel 2.6.	Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	24
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2018.....	25
Tabel 2.8	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	25
Tabel 2.9	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	26
Tabel 2.10	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	28
Tabel 2.11	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	29
Tabel 2.12	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2014-2018.....	30
Tabel 2.13	Nilai inflasi rata-rata Tahun 2014-2018.....	33
Tabel 2.14	PDRB Per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	35
Tabel 2.15	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	36
Tabel 2.16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	38
Tabel 2.17	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	39
Tabel 2.18	Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	40
Tabel 2.19	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	40
Tabel 2.20	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 (dalam ribuan).....	42
Tabel 2.21	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	43
Tabel 2.22	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	44

Tabel 2.23	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	44
Tabel 2.24	Indikator Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	45
Tabel 2.25	Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	45
Tabel 2.26	Perkembangan IPG dan IPM Kabupaten Karo Tahun 2017-2018.....	46
Tabel 2.27	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	47
Tabel 2.28	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan DPRD Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	47
Tabel 2.29	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	48
Tabel 2.30	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	49
Tabel 2.31	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	50
Tabel 2.32	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	50
Tabel 2.33	Angka Putus Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	51
Tabel 2.34	Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	51
Tabel 2.35	Angka melanjutkan Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	52
Tabel 2.36	Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	52
Tabel 2.37	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	53
Tabel 2.38	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	54
Tabel 2.39	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2018.....	55
Tabel 2.40	Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	56
Tabel 2.41	Persentase Tenaga Pendidik S-1/DIV Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	56
Tabel 2.42	Jumlah Guru Tingkat SD Bersertifikat Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	57
Tabel 2.43	Jumlah Guru Tingkat SMP Bersertifikat Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	58
Tabel 2.44	Rekapitulasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	59
Tabel 2.45	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	60

Tabel 2.46	Angka Kematian Bayi Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	61
Tabel 2.47	Rasio Jumlah Posyandu terhadap Jumlah Balita Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	62
Tabel 2.48	Rasio Rumah Sakit dan Rasio Puskesmas, Polindes, Pustu Per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	63
Tabel 2.49	Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	64
Tabel 2.50	Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	64
Tabel 2.51	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	65
Tabel 2.52	Tingkat Prevalensi Tuberculosis Per 100.000 Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	65
Tabel 2.53	Tingkat Kematian Karena TBC Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	66
Tabel 2.54	Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	67
Tabel 2.55	Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	67
Tabel 2.56	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	68
Tabel 2.57	Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	68
Tabel 2.58	Angka Kejadian Malaria Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	69
Tabel 2.59	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	69
Tabel 2.60	Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	70
Tabel 2.61	Cakupan Neonates Dengan Komplikasi Yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	70
Tabel 2.62	Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	71
Tabel 2.63	Persentase Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Tahun 2014-2018.....	72
Tabel 2.64	Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan per Umur (TB/U) menurut Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2014-2018.....	73
Tabel 2.65	Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	74
Tabel 2.66	Capaian Urusan Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	76
Tabel 2.67	Kondisi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	80
Tabel 2.68	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	81

Tabel 2.69	Capaian SPM Bidang Penataan Ruang Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	82
Tabel 2.70	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	84
Tabel 2.71	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	84
Tabel 2.72	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	85
Tabel 2.73	Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	85
Tabel 2.74	Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	86
Tabel 2.75	Capaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Sosial Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	87
Tabel 2.76	Korban Bencana Penerima Bantuan Sosial Masa Tanggap Darurat dan Korban Bencana Yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	87
Tabel 2.77	Jumlah Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	88
Tabel 2.78	Indikator Pembangunan Tenaga Kerja Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	89
Tabel 2.79	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	90
Tabel 2.80	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	90
Tabel 2.81	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	91
Tabel 2.82	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	91
Tabel 2.83	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	92
Tabel 2.84	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	93
Tabel 2.85	Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	94

Tabel 2.86	Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	95
Tabel 2.87	Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	95
Tabel 2.88	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	96
Tabel 2.89	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	96
Tabel 2.90	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	96
Tabel 2.91	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	97
Tabel 2.92	Jumlah Kerjasama Penyeleggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	98
Tabel 2.93	Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	98
Tabel 2.94	Angka pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	99
Tabel 2.95	Cakupan PUS Yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) Kabupaten Karo Tahun 2014-2018...	99
Tabel 2.96	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	100
Tabel 2.97	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	100
Tabel 2.98	Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	101
Tabel 2.99	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa Kelurahan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	101
Tabel 2.100	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	101
Tabel 2.101	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	102
Tabel 2.102	Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	103
Tabel 2.103	Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	104
Tabel 2.104	Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	105
Tabel 2.105	Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	105
Tabel 2.106	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	105

Tabel 2.107 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	106
Tabel 2.108 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	106
Tabel 2.109 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	107
Tabel 2.110 Prestasi Cabang Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2017.....	107
Tabel 2.111 Prestasi Cabang Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2018.....	108
Tabel 2.112 Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat Kabupaten Karo Tahun 2017-2018.....	109
Tabel 2.113 Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Statistik Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	109
Tabel 2.114 Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	110
Tabel 2.115 Tabel Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Karo 2014-2018.....	111
Tabel 2.116 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Karo 2014-2018.....	111
Tabel 2.117 Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	112
Tabel 2.118 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Memiliki Sertifikat Kabupaten Karo 2014-2018...	112
Tabel 2.119 Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Karo 2014-2018.....	113
Tabel 2.120 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Karo 2014-2018.....	114
Tabel 2.121 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Karo 2014-2018.....	114
Tabel 2.122 Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Karo 2014-2018	115
Tabel 2.123 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan Kabupaten Karo 2014-2018.....	116
Tabel 2.124 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Karo 2014-2018.....	116
Tabel 2.125 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Kabupaten Karo 2014-2018	117
Tabel 2.126 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian Kabupaten Karo 2014-2018	118
Tabel 2.127 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	119
Tabel 2.128 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Karo 2014-2018.....	119
Tabel 2.129 Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Karo 2014-2018.....	120
Tabel 2.130 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Kabupaten Karo 2014-2018	121

Tabel 2.131 Persentase Pelanggaran ASN Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	121
Tabel 2.132 Jumlah Kegiatan Kelitbangan RKPD Kabupaten Karo 2016-2018.....	122
Tabel 2.133 Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	122
Tabel 2.134 Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	123
Tabel 2.135 Persentase Temuan BPK Ditindaklanjuti Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	124
Tabel 2.136 Pengeluaran/kapita/Bulan dan Persentase/ Kapita/Bulan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	125
Tabel 2.137 Perkembangan Ekspor Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	125
Tabel 2.138 Perkembangan Impor Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	127
Tabel 2.139 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	128
Tabel 2.140 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	129
Tabel 2.141 Angka Kriminalitas Kabupaten Karo Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	130
Tabel 2.142 Jumlah Demo Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	130
Tabel 2.143 Persentase Penduduk Menurut Ijazah Diploma I, II, III, IV dan S1 Keatas Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	131
Tabel 2.144 Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	131
Tabel 3.1. Identifikasi Isu-isu Strategis.....	159
Tabel 3.2. Identifikasi RPJPD Daerah Lain.....	166
Tabel 3.3. Sinkronisasi Isu Strategis Internasional, Nasional, Regional, dan Kabupaten Karo.....	174
Tabel 4.1. Perumusan Visi.....	179
Tabel 4.2. Penjelasan Visi.....	180
Tabel 4.3. Keterkaitan Sasaran Visi RPJPD Nasional, Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara, dan Visi Kabupaten Karo.....	185
Tabel 4.4. Sinkronisasi Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo dengan Misi Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.....	191
Tabel 4.5. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo.....	193
Tabel 4.6. Sinkronisasi antara Tujuan RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025.....	193
Tabel 4.7 Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025.....	195

Tabel 5.1.	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 Periode I-III.....	228
Tabel 5.2.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Sasaran Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 Periode IV	235

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD Kabupaten Kota.....	4
Gambar 1.2	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota	5
Gambar 1.3	Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah.....	8
Gambar 2.1	Peta Kawasan Rawaan Bencana Kabupaten Karo...	20
Gambar 2.2	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karo, Sumut dan Indonesia Tahun 2014-2018.....	32
Gambar 2.3	Perbandingan Nilai Inflasi Rata-rata Medan, Sumut dan Indonesia Tahun 2014-2018.....	34
Gambar 2.4	PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK 2014-2018.....	35
Gambar 2.5	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	37
Gambar 2.6	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	37
Gambar 2.7	Posisi Relatif TPAK Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara.....	38
Gambar 2.8	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara.....	39
Gambar 2.9	Gini Ratio Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	41

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD daerah lainnya.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
6. Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat dengan RTR adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
9. Permasalahan pembangunan daerah adalah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi.

10. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Arah Kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan.
14. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah adalah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.
15. Sasaran pokok adalah permasalahan-permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap pembangunan dan kriteria-kriteria lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Agenda pembangunan adalah penerjemahaan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (*strategic goals*) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan dan program.
18. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian suatu program atau kegiatan.
22. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
23. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program kebijakan.

24. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
25. *Stakeholder* atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. *Stakeholder* dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I KERTAS KERJA PENYUSUNAN RPJPD
KABUPATEN KARO TAHUN 2005-2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Karo bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak terlepas dari berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah-masalah pembangunan lainnya. Dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan dimaksud diperlukan suatu perencanaan yang matang yang mempertimbangkan tantangan-tantangan yang bersifat eksternal maupun internal.

Tantangan pembangunan yang bersifat internal antara lain penataan kelembagaan birokrasi dan pemerintahan (*good governance*), peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan kesadaran hukum dan implementasi peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang termasuk tantangan pembangunan yang bersifat eksternal antara lain peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan daya saing dunia usaha, ancaman kerusakan lingkungan dan bencana alam, kerawanan pangan, dan tantangan-tantangan pembangunan lainnya.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut harus diciptakan koordinasi dan konsistensi pelaksanaan pembangunan saling menguatkan satu sama lain dan tidak tumpang tindih agar seluruh sumberdaya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Mencermati perkembangan yang terjadi saat ini serta masih banyak permasalahan yang dihadapi Kabupaten Karo, diperlukan upaya-upaya terencana, strategis dan berkesinambungan yang dituangkan ke dalam satu dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Dokumen jangka panjang dan jangka menengah tersebut memuat rumusan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang dan jangka menengah yang selanjutnya dijadikan landasan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan daerah, baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kedudukan RPJPD sangat penting dan strategis dan sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketidakadaan dokumen RPJPD menimbulkan ketidakjelasan

arah dan sasaran pokok pembangunan selama 20 tahun, sehingga sulit untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari setiap periode pemerintahan. RPJPD sangat diperlukan sebagai landasan untuk merumuskan tahapan rencana pembangunan lima tahunan maupun tahunan.

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan:

1. Pasal 65 ayat (1) huruf c

Kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD, RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

2. Pasal 263 ayat (2)

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

3. Pasal 264 ayat (1) dan ayat (3)

RPJPD ditetapkan dengan Perda, Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

4. Pasal 266 ayat (1)

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.

“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karo adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu dua puluh tahun, mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025 yang disusun melalui tahapan Persiapan Penyusunan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD, Rancangan Awal RPJPD, Penyelenggaraan Musrenbang

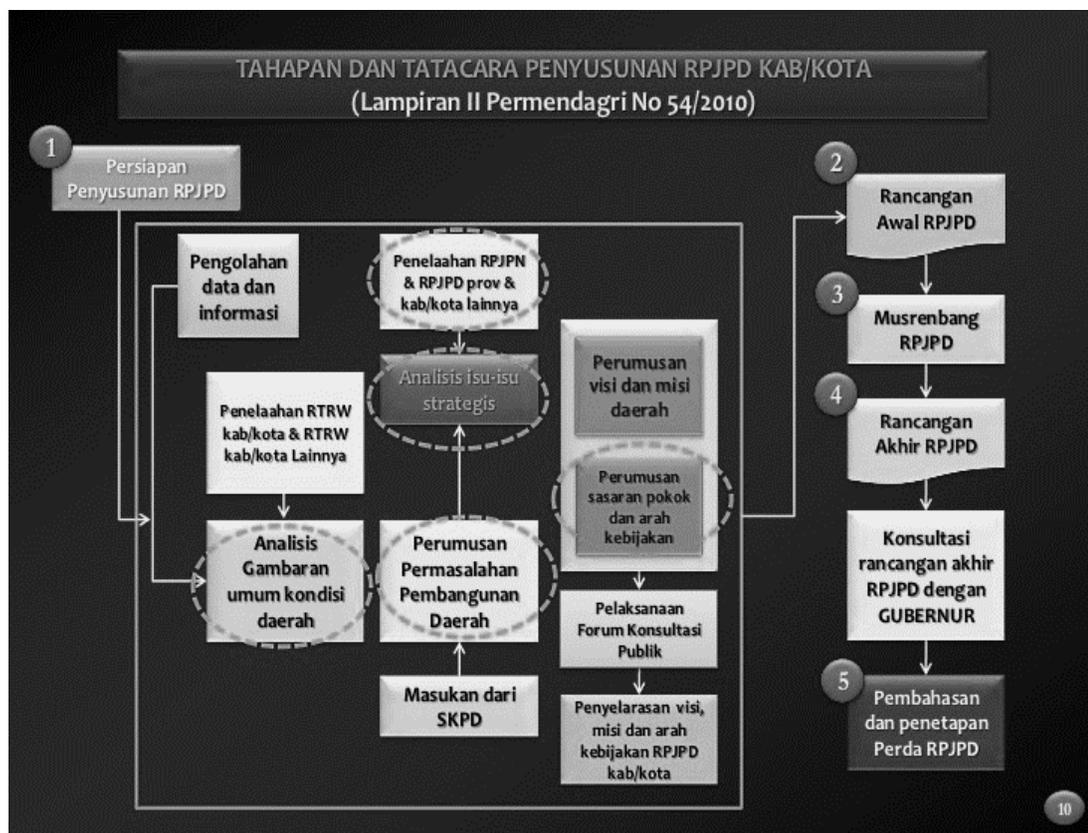
RPJPD, Penyusunan rancangan Akhir dan Penetapan Perda RPJPD, dengan prinsip-prinsip penyusunan sebagai berikut:

- a. melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas – bawah dan bawah – atas melalui berbagai tahapan musyawarah yang melibatkan berbagai unsur pelaku pembangunan daerah.
- b. RPJPD sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah yang demokratis dan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan.
- c. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

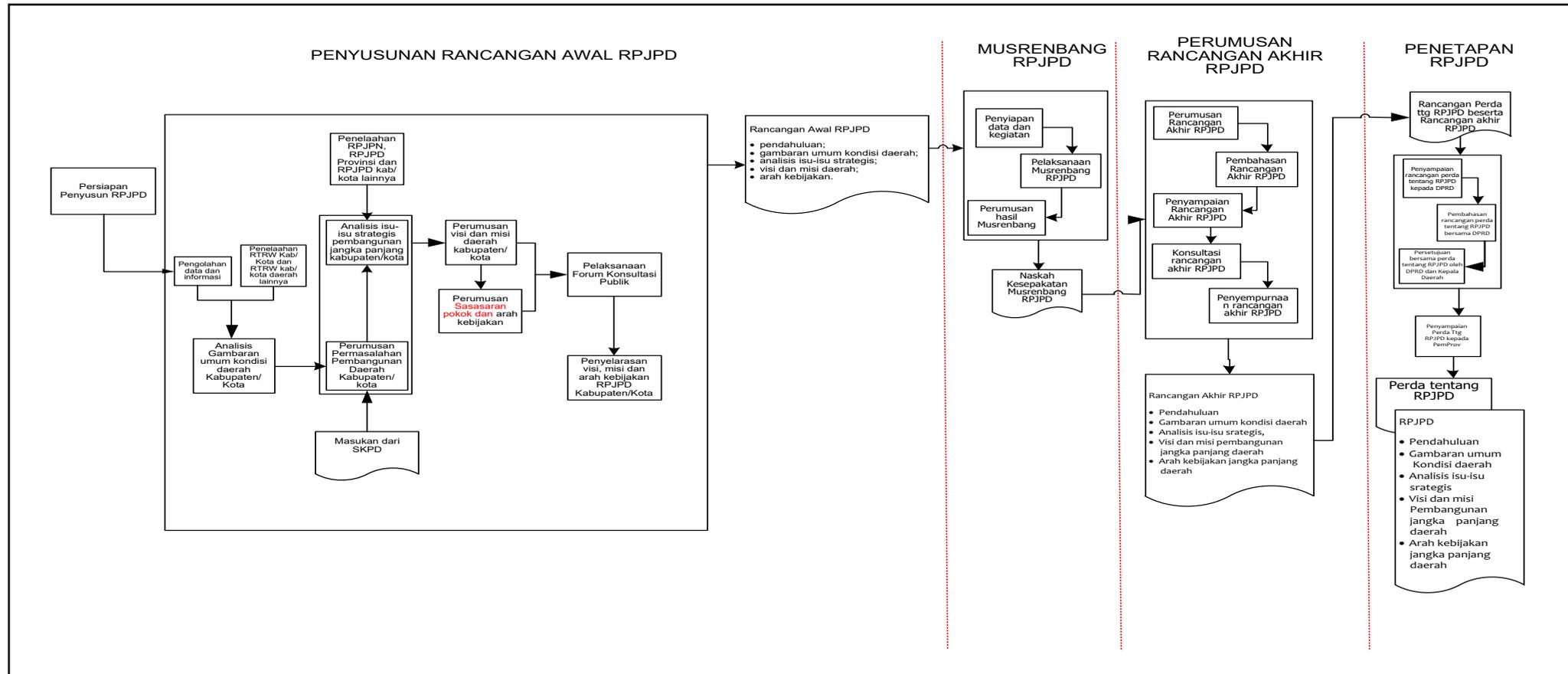
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD Kabupaten Kota dapat dilihat pada gambar 1.1 dan bagan Alur Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.1

Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD Kabupaten Kota



Gambar 1.2
 Bagan Alur Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil dari RPJP Daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 1945. Adapun landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo;
 11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

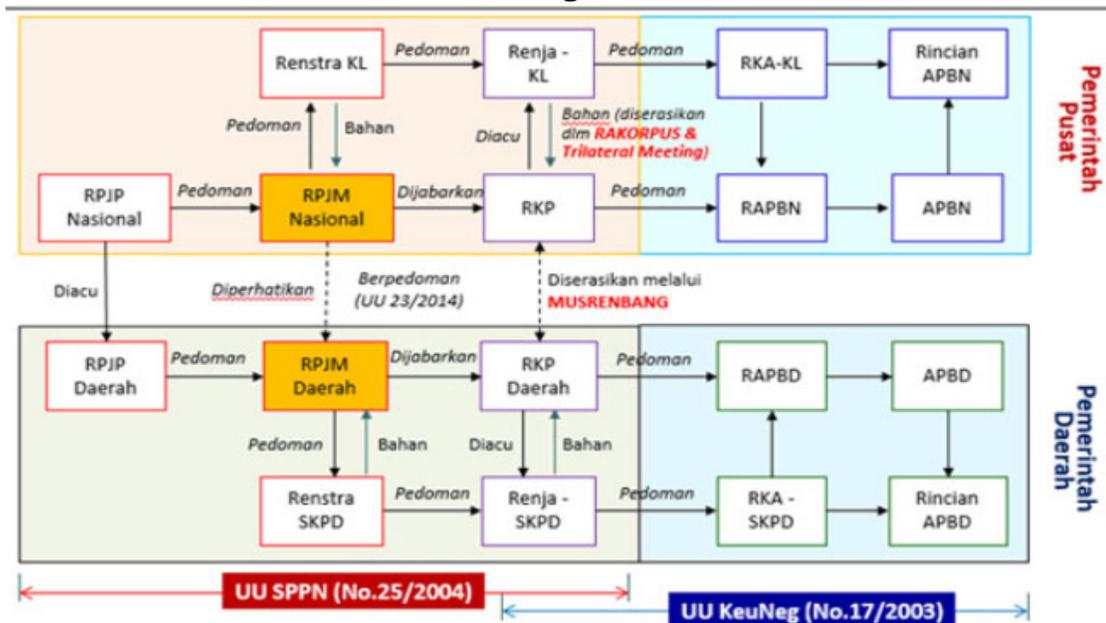
(RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

RPJPD Kabupaten Karo menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Karo yang merupakan rencana pembangunan daerah periode 5 (lima) tahunan. RPJMD Kabupaten Karo memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Kepala Daerah berpedoman pada RPJMN dan Rencana Tata Ruang Wilayah serta selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karo yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Karo.

Gambar 1.3
Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah



1.4. Maksud dan Tujuan

RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan yang ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat (pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang disepakati bersama. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, saling melengkapi dan saling memperkuat satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Karo adalah:

- a. Menetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Karo untuk jangka waktu 20 tahun;
- b. Menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
- c. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah;
- d. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD maupun antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- e. Menciptakan iklim pemerintahan daerah yang partisipatif, amanah dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- f. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Karo, swasta dan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005–2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.1. Aspek Geografi
 - 2.1.2. Aspek Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
 - 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
 - 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan
 - 2.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
 - 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
 - 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
 - 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
 - 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

BAB III. PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 3.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 3.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

3.2. Isu Strategis

- 3.2.1. Penelaahan Isu-Isu Strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Utara
- 3.2.2. Penelaahan RPJPD Daerah Lain
- 3.2.3. Isu-Isu Strageis Kabupaten Karo

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi
- 4.3. Tujuan

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Daerah

- 5.1.1. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan I (2006-2010)
- 5.1.2. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan II (2011-2015)
- 5.1.3. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan III (2016-2021)
- 5.1.4. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan IV (2022-2025)

5.2. Sasaran Pokok

- 5.2.1 Sasaran Pokok Lima Tahunan I (2006-2010)
- 5.2.2 Sasaran Pokok Lima Tahunan II (2011-2015)
- 5.2.3 Sasaran Pokok Lima Tahunan III (2016-2021)
- 5.2.4 Sasaran Pokok Lima Tahunan IV (2022-2025)

BAB VI. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

Secara geografis, Kabupaten Karo memiliki potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. Potensi pengembangan wilayah meliputi pengembangan kawasan agroindustri, pengolahan hasil pertanian, pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan barang dan jasa, pusat pemerintahan kecamatan, pengembangan destinasi pariwisata, pengolahan hasil perkebunan, pemukiman perdesaan, pengolahan hasil budidaya kehutanan dan pusat cagar budaya. Sementara itu, terdapat juga wilayah rawan bencana gempa vulkanik karena memiliki dua gunung berapi yang aktif yaitu Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak.

Pengembangan wilayah Kabupaten Karo dapat dianalisis secara geografis, astronomis, topografis, klimatologis, geologis dan hidrologis. Secara geografis, Kabupaten Karo berada pada posisi strategis antara 6 (enam) kabupaten dalam Provinsi Sumatera Utara, 1 (satu) Provinsi NAD (Nangroe Aceh Darusallam) dan terletak pada jajaran Dataran Tinggi Bukit Barisan. Posisi strategis tersebut dapat dilihat pada batas wilayah administrasi seluas 2.127,25 Km² (212.725 Ha) yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kab. Langkat dan Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Selatan : Kab. Dairi dan Kab. Samosir
- Sebelah Timur : Kab. Deli Serdang dan Kab. Simalungun
- Sebelah Barat : Propinsi Aceh

Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Lau Baleng merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah secara berturut-turut masing-masing sebesar 267,11km² atau 12,56% dan 252,60km² atau 11,87% dari luas wilayah Kabupaten Karo. Sedangkan Kecamatan Berastagi mempunyai luas wilayah paling kecil yaitu 30,50km² atau 1,43% dari luas wilayah Kabupaten Karo. Secara

rinci, luas masing-masing wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan
Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Rasio Terhadap Total (%)
1	Mardingding	267,11	12,56
2	Laubaleng	252,60	11,87
3	Tigabinanga	160,38	7,54
4	Juhar	218,56	10,27
5	Munte	125,64	5,91
6	Kutabuluh	195,70	9,20
7	Payung	47,24	2,22
8	Tiganderket	86,76	4,08
9	Simpang Empat	93,48	4,39
10	Naman Teran	87,82	4,13
11	Merdeka	44,17	2,08
12	Kabanjahe	44,65	2,10
13	Berastagi	30,50	1,43
14	Tigapanah	186,84	8,78
15	Dolat Rayat	32,25	1,52
16	Merek	125,51	5,90
17	Barusjahe	128,04	6,02
	Jumlah	2 127,25	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Karo 2019

Secara administratif, Kabupaten Karo terdiri dari 17 kecamatan, 259 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Tigapanah yaitu sebanyak 26 desa sedangkan kecamatan Dolatrayat merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu hanya memiliki 7 desa.

Untuk lebih jelasnya, jumlah desa masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Jumlah Desa dan Kelurahan Masing-Masing Kecamatan
Kabupaten Karo Tahun 2018

No.	Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Buah)		
		Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Mardingding	12	-	12
2.	Laubaleng	15	-	15
3.	Tigabinanga	19	1	20
4.	Juhar	25	-	25
5.	Munte	22	-	22
6.	Kutabuluh	16	-	16
7.	Payung	8	-	8
8.	Tiganderket	17	-	17
9.	Simpang Empat	17	-	17
10.	Naman Teran	14	-	14
11.	Merdeka	9	-	9
12.	Kabanjahe	8	5	13
13.	Berastagi	6	4	10
14.	Tigapanah	26	-	26
15.	Dolat Rayat	7	-	7
16.	Merek	19	-	19
17.	Barusjahe	19	-	19
Jumlah		259	10	269

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2019

Secara astronomis, Kabupaten Karo terletak pada 2°50' – 3°19' Lintang Utara dan 97°55'– 98°38' Bujur Timur. Letak astronomis ini membawa implikasi terhadap kondisi topografis, klimatologis, geologis dan hidrologis.

Wilayah Kabupaten Karo, secara topografis berada pada ketinggian 200–1.500 meter di atas permukaan laut dengan perbandingan luas sebagai berikut:

- a. Daerah ketinggian 200-500 Meter dari permukaan laut seluas 46.462 Ha (21,84 %).
- b. Daerah ketinggian 500-1.000 Meter dari permukaan laut seluas 84.892 Ha (39,91%).
- c. Daerah ketinggian 1.000-1.400 Meter dari permukaan laut seluas 70.774 Ha (33,27%).

d. Daerah ketinggian > 1.400 Meter di atas permukaan laut seluas 10.597 Ha (4,98%).

Kondisi topografis juga mengakibatkan perbedaan kemiringan/lereng lahan yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Datar 2% = 23.900 Ha = 11,24%
- b. Landai 2 – 15% = 74.919 Ha = 35,22%
- c. Miring 15 – 40% = 41.169 Ha = 19,35%
- d. Curam 40% = 72.737 Ha = 34,19%

Berdasarkan kondisi topografis, maka Kecamatan Lau Baleng berada pada ketinggian terendah di atas permukaan laut yakni 200-580 mdpl. Sementara, Kecamatan yang berada pada ketinggian > 1.000 mdpl yaitu Kecamatan Namanteran, Merdeka, Berastagi dan Dolatrayat. Secara rinci, kondisi topografis masing-masing kecamatan sebagaimana disajikan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut
Menurut Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Topografis (m)
1	Mardingding	280 – 560
2	Laubaleng	200 – 580
3	Tigabinanga	490 – 750
4	Juhar	650 – 1.030
5	Munte	716 – 1.242
6	Kutabuluh	631 – 1.100
7	Payung	500 – 1.500
8	Tiganderket	500 – 1.500
9	Simpang Empat	950 - 1.400
10	Naman Teran	1.300 - 1.450
11	Merdeka	1.000 – 1.500
12	Kabanjahe	1.000 - 1.300
13	Berastagi	1.200 - 1.300
14	Tigapanah	1.139 – 1.326
15	Dolat Rayat	1.242 – 1.418
16	Merek	977 - 1.116
17	Barusjahe	870 – 1.400
Karo		200-1500

Sumber: Karo Dalam Angka, 2019

Secara klimatologis, Kabupaten Karo beriklim tropis dengan suhu yang bervariasi antara 16,2°C sampai dengan 23,3°C dengan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 87% sampai dengan

92%. Kondisi ini berpengaruh terhadap keberadaan musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan pertama mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Januari dan musim hujan kedua pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan Februari, Juni dan Juli.

Kondisi geologis Kabupaten Karo ditandai dengan adanya potensi pertambangan dan energi. Potensi pertambangan meliputi mineral bukan logam berupa belerang, fosfat maupun batuan berupa batu gamping, dolomit, kalsit, lempung, marmer, sirtu, trass, andesit, feldspar dan granit. Sampai saat ini, pertambangan batuan yang sudah dieksploitasi terbatas pada dolomit yakni Kecamatan Kutabuluh dan Tiganderket. Sementara itu, sumberdaya energi yang berpotensi untuk dikembangkan adalah energi panas bumi. Energi panas bumi yang telah dikembangkan adalah panas bumi Gunung Sibayak yang terdapat di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka, dengan cadangan terduga sebesar 68 MW yang dieksploitasi oleh PT. Pertamina (Persero). Energi panas bumi lainnya yang potensial adalah panas bumi Gunung Sinabung yang terdapat di Kecamatan Payung namun belum dieksploitasi.

Secara hidrologis, Kabupaten Karo merupakan bagian dari 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang besar yakni DAS Wampu dan DAS Lawe Alas (Renun). Sungai Wampu bermuara ke Selat Malaka dan Sungai Renun bermuara ke Samudera Hindia. Selain DAS terdapat juga potensi air permukaan yakni Danau Lau Kawar Kecamatan Naman Teran dan Danau Toba Kecamatan Merek.

Selain potensi pertambangan, Kabupaten Karo juga memiliki potensi unggulan daerah yang cukup besar untuk dikembangkan pada sektor pertanian, sektor industri kecil dan menengah serta industri jasa dan pariwisata.

Kondisi geografis di Kabupaten Karo menyebabkan banyak komoditi yang dapat dihasilkan. Oleh karena itu, Kabupaten Karo memiliki banyak komoditi potensial yang dihasilkan oleh masing-masing kecamatan terutama dari sektor pertanian. Komoditi pertanian dari Kabupaten Karo tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal namun juga memenuhi kebutuhan beberapa

daerah di Provinsi Sumatera Utara maupun di luar Provinsi Sumatera Utara bahkan beberapa komoditi telah diekspor ke Luar Negeri. Beberapa komoditi tersebut dihasilkan atau sebagian besar produksinya berasal dari Kabupaten Karo.

Pertanian merupakan sektor dominan yang mempengaruhi pola hidup masyarakat Kabupaten Karo, baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Sektor pertanian juga merupakan sektor dominan yang mendukung peningkatan ekonomi wilayah di Kabupaten Karo.

Kabupaten Karo memiliki kondisi iklim, lahan dan sumberdaya hayati yang sangat mendukung pengembangan usaha aneka jenis komoditas pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. Lahan yang subur dan sumber daya petani yang relatif maju merupakan faktor pendukung yang utama. Namun demikian, dengan kondisi topografi Kabupaten Karo yang berbukit-bukit maka pengembangan pertanian yang berkelanjutan harus tetap mempertimbangkan faktor daya dukung lingkungan.

Secara umum, Kabupaten Karo saat ini masih merupakan daerah sentra produksi terbesar beberapa komoditi terhadap total produksi di Provinsi Sumatera Utara antara lain produksi jagung, produksi jenis sayuran dan buah-buahan yaitu cabai, kubis, kentang, tomat, terung, petsai/sawi, wortel, kembang kol dan jeruk, strawberry dan produksi bunga terbesar yaitu krisan, sedap malam, mawar, gladiol. Disamping itu, masih banyak potensi perkebunan yang potensial di Kabupaten Karo yaitu usaha perkebunan rakyat, jenis tanaman yang biasa ditanam adalah kemiri, kopi, kelapa, tembakau, coklat, kelapa sawit, cengkeh dan aren. Komoditas Kopi merupakan komoditas yang memiliki jumlah produksi tertinggi diantara komoditas perkebunan di Kabupaten Karo.

Usaha sektor Peternakan umumnya diusahakan oleh masyarakat yang bertujuan untuk menambah pendapatan rumah tangga serta untuk dikonsumsi. Ternak yang umum dipelihara masyarakat Karo adalah sapi, kerbau, kambing, babi, kuda dan kelinci. Selain ternak di atas jenis unggas yang umum di pelihara adalah ayam, itik dan itik manila.

Sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda khususnya sejak dibukanya perkebunan di Pantai Timur Sumatera wilayah Kabupaten Karo sudah dijadikan sebagai wilayah peristirahatan atau pariwisata, khususnya bagi pemilik ataupun staf perkebunan tersebut disamping untuk pegawai pemerintah, perkapalan perdagangan dan sebagainya.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Karo belum didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dan sektor lainnya untuk mengelola pariwisata yang lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu, Kabupaten Karo merupakan daerah persinggungan dan titik temu serta perlintasan dari 5 (lima) kabupaten di wilayah Propinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Dairi, Simalungun, Pakpak Barat, Humbang Hasudutan, dan Samosir, serta 5 (lima) kabupaten/kota dari wilayah Propinsi Nangroe Aceh Darusalam yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Gayo Luwes dan Kota Subulussalam. Kabupaten Karo memiliki letak geografis yang strategis dalam pengembangan pariwisata daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya bahwa Danau Toba merupakan wilayah Kawasan Strategis Nasional yang memiliki banyak potensi wisata terdiri dari wisata alam, wisata religi dan budaya, wisata kuliner dan wisata sejarah, memiliki potensi air yang melimpah, udara yang bersih dan sejuk serta lingkungan yang masih terjaga kelestariannya.

Objek wisata yang paling disenangi/digemari para wisatawan pada umumnya adalah pantai, taman atau cagar alam dan seni budaya. Dari objek wisata yang digemari tersebut, Kabupaten Karo memiliki ketiga objek wisata tersebut. Objek wisata pantai yang ada yaitu pantai Lau Kawar dan pantai Danau Toba, wisata alam pegunungan/hutan meliputi Gunung Sinabung, Gunung Sibayak, Taman Hutan Rakyat, Penetapan Bukit Gundaling, Tongging, pemandian Air Panas Doulu dan lain-lain. Sedangkan objek wisata budaya meliputi Desa Budaya Lingga, Budaya Dokan, Desa budaya Peceren yang masih memiliki rumah tradisional.

Untuk mendukung kegiatan pariwisata, Kabupaten Karo

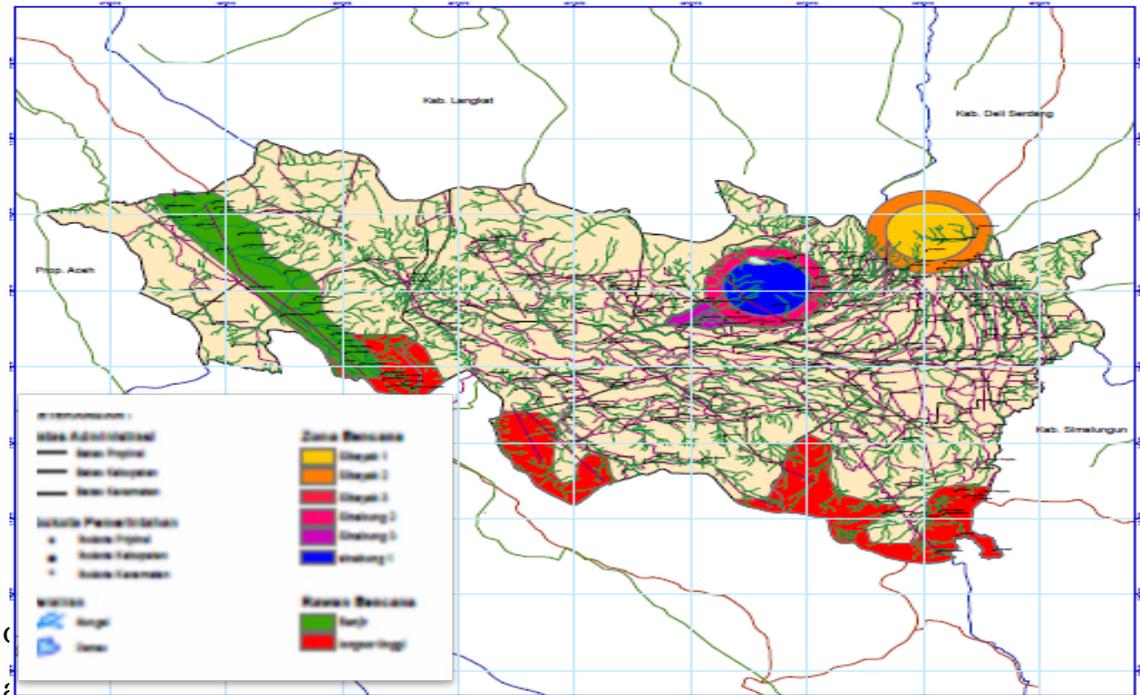
memiliki sarana dan prasarana objek wisata seperti sarana transportasi, hotel/penginapan, villa dan restoran dari kelas bintang lima sampai kelas melati. Sarana hotel berbintang antara lain Sibayak Hotel *International*, Sinabung Resort Hotel, Grand Mutiara, *Mikie Holiday*, Rudang Hotel, Bukit Kubu, Berastagi Cottage, Danau Toba International, GM. Panggabean, Bre Karona dan lain sebagainya.

Potensi dan objek-objek wisata Kabupaten Karo terus digali, dikembangkan dan diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan bernuansa budaya lokal. Potensi Kabupaten Karo sebagai sentra produksi komoditi sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman bunga juga akan dikelola dan dikembangkan menjadi objek agrowisata. Adat istiadat masyarakat terus diupayakan menjadi daya tarik bagi wisatawan baik dalam dan luar negeri. Untuk mendukung rencana tersebut peningkatan pelayanan fasilitas umum dan penyediaan sarana, prasarana dan akomodasi menjadi prioritas dalam membangun perekonomian Kabupaten Karo.

Setelah menguraikan potensi pengembangan wilayah yang dianalisis menurut kondisi geografis, astronomis, topografis, klimatologis, geologis dan hidrologis, maka aspek lain yang perlu diperhitungkan adalah wilayah rawan bencana alam. Wilayah rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam khususnya bencana gunung api, bencana banjir dan bencana tanah longsor.

Seluruh wilayah rawan bencana sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Karo



Payung, Kecamatan Simpang Empat Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Tiganderket dan Gunung Api Sibayak (sebagian) berada di Kecamatan Merdeka, Kecamatan Dolat Rayat, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Berastagi. Potensi dan derajat bahaya yang ditimbulkan dari letusan gunungapi tersebut adalah aliran piroklastik atau aliran awan panas, jatuhnya piroklastik, dan lava. Potensi bencana banjir di Kabupaten Karo terdapat di beberapa desa yang tersebar di Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Laubaleng. Potensi bencana gerakan tanah/longsor terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo. Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah potensi gerakan tanah/longsor, antara lain: Kecamatan Mardinding, Kecamatan Kutabuluh, Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Barus Jahe, Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Merek, Kecamatan Munte, Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Juhar. Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki potensi gerakan tanah mulai dari menengah sampai tinggi.

2.1.2. Aspek Demografi

Secara demografi, sesuai hasil sensus tahun 2010, penduduk Kabupaten Karo berjumlah 350.960 jiwa dan jumlah penduduk Kabupaten Karo Tahun 2018 adalah sebesar 409,68 ribu jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 193 jiwa/Km².

Jumlah desa, luas wilayah dan jumlah penduduk per kecamatan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Jumlah Kepadatan Penduduk
Per Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Banyaknya Desa/Kel	Penduduk (ribu)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk Tiap Km ²
1	Mardingding	12	19.92	267,11	75
2	Laubaleng	15	20.76	252,60	82
3	Tigabinanga	20	22.84	160,38	142
4	Juhar	25	14.86	218,56	68
5	Munte	22	22.14	125,64	176
6	Kutabuluh	16	11.91	195,70	61
7	Payung	8	12.42	47,24	263
8	Tiganderket	17	14.73	86,76	170
9	Simpang Empat	17	21.42	93,48	229
10	Naman Teran	14	14.94	87,82	170
11	Merdeka	9	16.23	44,17	367
12	Kabanjahe	13	75.90	44,65	1.700
13	Berastagi	10	51.45	30,50	1.687
14	Tigapanah	26	34.80	186,84	186
15	Dolat Rayat	7	9.69	32,25	300
16	Merek	19	21.04	125,51	168
17	Barusjahe	19	24.64	128,04	192
Jumlah 2018		269	409.68	2.127,25	193

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2019

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Kabanjahe dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.700 jiwa/Km² diikuti oleh Kecamatan Berastagi sebanyak 1.687 jiwa/Km². Kepadatan penduduk di kedua Kecamatan ini disebabkan karena Kecamatan Kabanjahe sebagai ibukota kabupaten merupakan pusat kegiatan jasa dan perdagangan di wilayah Kabupaten Karo, kemudian Kecamatan Berastagi sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara, banyak kegiatan jasa dan perhotelan,

sehingga banyak masyarakat berdomisili untuk melakukan aktifitas kegiatan bidang pariwisata.

Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2018 sebanyak 409.675 jiwa dengan rincian jenis kelamin laki-laki adalah 203.311 jiwa dan perempuan 206.364 jiwa, berarti sex ratio penduduk Kabupaten Karo adalah 98,52 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat \pm 98 penduduk laki-laki. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Merek yakni sebesar 104,97 sedangkan yang terkecil terjadi di Kecamatan Tiganderket yakni 95,11.

Secara umum perbandingan komposisi gender penduduk di Kabupaten Karo relatif seimbang, dengan angka Sex Ratio sebesar 98,52 yang artinya jumlah penduduk perempuan 1,48 lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Karo mempunyai angka Sex Rasio di bawah 100, kecuali beberapa kecamatan seperti Kecamatan Munte dengan angka Sex Ratio 100,27, Kecamatan Namanteran 103,64, Kecamatan Merdeka 100,53 dan Kecamatan Merek 104,97 yang artinya adalah penduduk di kecamatan tersebut sedikit lebih banyak penduduk laki-laki dibanding perempuan.

Informasi tentang jumlah penduduk per jenis kelamin dan sex ratio diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio
Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2018

No.	Kecamatan	Sex Ratio
1.	Mardingding	99,62
2.	Laubaleng	97,87
3.	Tigabinanga	99,02
4.	Juhar	99,20
5.	Munte	100,24
6.	Kutabuluh	97,76
7.	Payung	97,71
8.	Tiganderket	95,11
9.	SimpangEmpat	99,86
10.	NamanTeran	103,64
11.	Merdeka	100,53
12.	Kabanjahe	95,57
13.	Berastagi	99,11
14.	Tigapanah	97,81
15.	DolatRayat	97,81
16.	Merek	104,97
17.	Barusjahe	97,10
Jumlah 2018		98,52
2017		98,54
2016		98,60
2015		98,57
2014		98,45

Sumber: BPS KabupatenKaro, 2019

Berdasarkan kelompok umur, pada tahun 2018 dengan kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 125.896 jiwa atau sekitar 30,73% dari total populasi. Kemudian penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 260.127 jiwa atau sebesar 63,50% dan kelompok umur lebih dari 65 tahun (usia sudah tidak produktif) berjumlah 23.652 jiwa atau sebesar 5,77% dari total populasi.

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2014-2018, disajikan selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Umur (jiwa)/Persentase			Jumlah Penduduk
	0-14 tahun	15-64 tahun	65 tahun +	
2014	122.426/32,00	240.979/62,98	19.217/5,02	382.622
2015	122.899/31,54	246.348/63,23	20.344/5,22	389.591
2016	124.083/31,28	251.197/63,4	21.318/5,38	396.598
2017	125.043/31,01	255.752/63,43	22.412/5,56	403.207
2018	125896/30,73	260.127/63,50	23.652/5,77	409.675

Sumber : BPS, Karo dalam Angka 2019

Suatu daerah dikatakan struktur muda yakni apabila kelompok umur di bawah 15 tahun jumlahnya besar (lebih dari 35%) sedang besarnya kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas lebih kurang 3%. Sebaliknya suatu daerah dikatakan berstruktur umur tua, apabila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kecil (kurang dari 35% dari seluruh penduduk) dan persentase penduduk di atas 65 tahun sekitar 15%.

Dari hal di atas, komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Karo tergolong struktur umur tua, terlihat dari persentase penduduk di bawah umur 15 tahun sebesar 30,73% dan penduduk umur 65 tahun ke atas sebesar 5,77% dengan umur median 25 tahun. Ini berimplikasi pada potensi kelompok umur muda sehingga perlu mendapat perhatian dan pengembangan agar mampu menghasilkan tenaga-tenaga trampil, mandiri untuk mengisi peluang-peluang ekonomi yang ada.

Struktur kependudukan Kabupaten Karo pada usia muda umur 0-9 tahun cenderung meningkat sedangkan umur 10 tahun sampai 29 tahun mulai berkurang jumlahnya. Pada usia tersebut merupakan usia sekolah sampai usia kuliah (perguruan tinggi dan usia angkatan kerja *fresh graduated*). Sedangkan usia 30 sampai 39 jumlah penduduk kembali meningkat tetapi umur 40 sampai usia tua 75 tahun mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa usia muda, pada usia sekolah dan usia produktif cenderung sedikit atau menurun jumlahnya di Kabupaten Karo, hal ini bisa dikarenakan

kualitas sekolah dan jumlah lapangan kerja lebih memadai di luar Kabupaten Karo. Informasi mengenai struktur kependudukan Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Karo Tahun 2018

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
0 – 4	21.994	21.266	43.260	10,56
5 – 9	22.361	21.657	44.018	10,74
10-14	19.891	18.727	38.618	9,43
15 -19	15.902	4.652	30.554	7,46
20 – 24	14.287	13.202	27.489	6,71
25 – 29	15.008	14.798	29.806	7,28
30 – 34	15.938	15.711	31.649	7,73
35 – 39	15.610	15.618	31.228	7,62
40 – 44	14.216	14.166	28.382	6,93
45 – 49	11.750	12.716	24.466	5,97
50 – 54	9.991	11.108	21.099	5,15
55 – 59	9.030	10.426	19.456	4,75
60 – 64	7.656	8.342	15.998	3,91
65 – 69	4.932	6.130	11.062	2,7
70 – 74	2.581	3.372	5.953	1,45
75+	2.164	4.473	6.637	1,62

Sumber : BPS, Karo dalam Angka 2019

Laju Pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan yang disarikan oleh BKKBN yaitu 2%, sedangkan di Kabupaten Karo laju pertumbuhan masih tinggi. Capaian dibawah 2% dicapai pada tahun 2013 sebesar 1,07% sedangkan kondisi pada tahun 2017 menjadi 2,17% artinya laju pertumbuhan di Kabupaten Karo masih tinggi. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Laju Pertumbuhan penduduk
2014	1,17
2015	2,18
2016	2,11
2017	2,17
2018	2,00

Sumber : BPS Kab. Karo, 2019

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi regional Kabupaten Karo. PDRB dapat disajikan berdasarkan atas harga berlaku dan berdasarkan atas harga konstan. Penyajian PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan harga tetap suatu tahun dasar, semua barang dan jasa yang dihasilkan, biaya antara yang digunakan ataupun nilai tambah masing-masing sektor dinilai berdasarkan harga tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara riil karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan. Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga konstan, dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten Karo Tahun 2014–2018

No.	Sektor	2014		2015		2016		2017		2018	
		(Milyar Rp)	%								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,616,74	58,48	6.855,63	57,70	7.164,56	57,34	7.579,44	57,66	7,740,99	56,32
2	Pertambangan & Pengalihan	28,29	0,25	29,28	0,25	30,63	0,25	31,43	0,24	32,72	0,24
3	Industri Pengolahan	339,17	3,00	365,42	3,08	388,00	3,11	411,11	3,13	437,56	3,18
4	Pengadaan Listrik, Gas,	10,20	0,09	11,60	0,09	11,30	0,09	11,60	0,09	1,2,21	0,09
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,26	0,08	10,00	0,08	10,22	0,08	10,46	0,08	10,71	0,08
6	Konstruksi	746,67	6,60	773,99	6,51	813,95	6,51	860,71	6,55	908,97	6,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	1,026,30	9,07	1.112,70	9,37	1.205,16	9,65	1.278,06	9,72	1,435,53	10,44
8	Transportasi dan Pergudangan	502,06	4,44	533,71	4,49	560,90	4,49	586,67	4,46	630,96	4,59

No.	Sektor	2014		2015		2016		2017		2018	
		(Milyar Rp)	%								
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	261,65	2,31	282,56	2,38	305,21	2,44	311,87	2,37	335,24	2,44
10	Informasi dan Komunikasi	104,22	0,92	108,69	0,91	115,78	0,93	121,86	0,93	130,75	0,95
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	141,38	1,25	151,31	1,27	159,88	1,28	159,54	1,21	162,89	1,19
12	Real Estate	338,39	2,99	363,49	3,06	391,08	3,13	405,86	3,09	435,31	3,17
13	Jasa Perusahaan	21,40	0,19	22,28	0,19	23,21	0,19	24,58	0,19	26,45	0,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	637,11	5,63	679,36	5,72	695,68	5,57	710,03	5,40	759,63	5,53
15	Jasa Pendidikan	276,50	2,44	293,22	2,47	311,51	2,49	321,04	2,44	342,10	2,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,74	1,07	138,71	1,17	150,79	1,21	156,80	1,19	165,52	1,20
17	Jasa Lainnya	134,29	1,19	149,52	1,26	157,00	1,26	164,79	1,25	175,82	1,28
	PDRB	11.314,39	100	11.880,93	100	12.494,87	100	13.145,85	100	13.744,17	100

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk tahun 2014-2018 cenderung meningkat dari Rp.11.314,39 Miliar (Tahun 2014), menjadi Rp. 11.880,93 Miliar (Tahun 2015), menjadi Rp. 12.494,87 Miliar (Tahun 2016), menjadi Rp 13.145,85 Miliar (Tahun 2017) dan Rp. 13.744,17 miliar rupiah (Tahun 2018). Secara absolut dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 terdapat kenaikan nilai PDRB-ADHK Kabupaten Karo sebesar Rp.2.429,78 Miliar.

Sedangkan, jika dilihat dari kontribusi lapangan usaha utama yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Karo yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan rata-rata kontribusinya untuk tahun 2014-2018 adalah sebesar 57,50%, setelah itu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dengan rata-rata sebesar 9,65% dan ketiga adalah sektor konstruksi dengan rata-rata sebesar 6,56%. Kabupaten Karo merupakan daerah pertanian sehingga kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tetap dominan di setiap tahun.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku juga memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Kontribusi Lapangan Usaha yang dominan terhadap pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku yaitu dari pertanian, kehutanan dan perikanan dan terkecil dari Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Data selengkapnya nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2014 sampai 2018 disajikan pada tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010
Kabupaten Karo Tahun 2014 – 2018

No	Sektor	2014		2015		2016		2017		2018	
		(Milyar Rp)	%								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.793,98	56,41	8.451,76	55,79	9.209,58	55,04	9.967,02	55,17	10.481,14	54,1
2	Pertambangan & Penggalian	33,62	0,24	36,23	0,24	38,91	0,23	39,17	0,22	42,32	0,22
3	Industri Pengolahan	450,53	3,26	513,56	3,39	564,39	3,37	640,20	3,54	703,37	3,63
4	Pengadaan Listrik, Gas,	9,48	0,07	10,28	0,07	11,03	0,07	12,10	0,07	13,31	0,07
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,48	0,08	10,28	0,08	11,03	0,08	15,10	0,08	15,63	0,08
6	Konstruksi	968,85	7,01	1.066,01	7,04	1.192,63	7,13	1.301,07	7,20	1.426,74	7,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	1.370,06	9,92	1.502,17	9,92	1.724,56	10,38	1.897,37	10,50	2.109,62	10,90
8	Transportasi dan Pergudangan	653,59	4,73	709,17	4,68	774,64	4,63	797,64	4,42	874,10	4,52
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	348,34	2,52	389,68	2,57	434,60	2,60	453,70	2,51	491,00	2,54
10	Informasi dan Komunikasi	103,70	0,75	109,18	0,72	119,02	0,71	130,07	0,72	143,21	0,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	183,21	1,33	204,21	1,35	230,62	1,38	237,09	1,31	250,01	1,29
12	Real Estate	419,27	3,03	474,69	3,13	554,78	3,32	616,78	3,40	684,19	3,53
13	Jasa Perusahaan	26,52	0,19	29,15	0,19	32,91	0,20	36,00	0,20	39,42	0,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	805,76	5,83	914,00	6,03	989,19	5,91	1.043,63	5,75	1.043,63	5,81
15	Jasa Pendidikan	325,00	2,35	352,64	2,33	392,02	2,34	412,37	2,28	448,94	2,32
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151,61	1,10	185,59	1,22	216,35	1,29	227,56	1,26	248,51	1,28
17	Jasa Lainnya	162,42	1,18	189,33	1,25	218,46	1,31	241,22	1,34	263,72	1,36
	PDRB	13.817,09	100	15.150,36	100	16.728,42	100	18.066,02	100	19.359,02	100

Sumber :BPS Kabupaten Karo, 2019

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2014-2018 juga memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Nilai PDRB Kabupaten Karo meningkat dari Rp.13.817,09 Miliar (Tahun 2014), menjadi Rp. 15.150,36 Miliar (Tahun 2015), menjadi

16.728,42 Miliar (Tahun 2016), menjadi Rp. 18.066,02 Miliar (Tahun 2015), dan menjadi Rp. 19.359,02 (Tahun 2018). Secara absolut pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terdapat kenaikan PDRB-ADHB sebesar Rp. 5.541,93 Miliar.

Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, lapangan usaha utama yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi lapangan usaha tersebut terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 54,10%. Pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami perlambatan sebesar 1,07% dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2017. Jika dilihat dari kontribusi lapangan usaha utama yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan rata-rata kontribusinya untuk tahun 2014-2018 adalah sebesar 55,30%, setelah itu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dengan rata-rata sebesar 10,32% dan ketiga adalah sektor konstruksi dengan rata-rata sebesar 7,15%.

Pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 di Kabupaten Karo adalah seperti tergambar pada tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.11
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Sektor	PDRB		Distribusi Persentase PDRB	
		HK	HB	HK	HB
		%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,00	7,69	(0,9)	(0,54)
2	Pertambangan & Penggalian	3,70	5,96	(2,1)	0,00
3	Industri Pengolahan	6,577	11,79	2,7	2,7
4	Pengadaan Listrik, Gas,	4,76	8,85	0,00	0,00
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,72	14,03	0,00	0,00
6	Konstruksi	5,04	10,16	1,2	0,12
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	8,77	11,41	2,3	2,30
8	Transportasi dan Pergudangan	5,88	7,57	(1,0)	(0,5)

No.	Sektor	PDRB		Distribusi Persentase PDRB	
		HK	HB	HK	HB
		%	%	%	%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,42	9,00	0,1	0,1
10	Informasi dan Komunikasi	5,84	8,42	(0,3)	(0,2)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,64	8,16	(0,7)	(0,7)
12	Real Estate	6,51	13,04	3,8	3,8
13	Jasa Perusahaan	5,41	10,42	1,32	1,3
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,52	6,79	0,1	(0,40)
15	Jasa Pendidikan	5,47	8,43	(0,2)	(0,2)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,28	13,34	3,9	3,97
17	Jasa Lainnya	6,70	12,92	3,5	3,6

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2019 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 Kabupaten Karo cenderung meningkat. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi atas dasar harga berlaku adalah *real estate*, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi atas dasar harga konstan adalah jasa lainnya dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan pertumbuhan distribusi persentase PDRB Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 paling tinggi baik atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.

Tabel. 2.12
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,70	3,61	4,51	5,79	2,31
2	Pertambangan & Penggalan	4,11	3,49	4,63	2,59	4,10
3	Industri Pengolahan	6,55	7,74	6,18	5,96	6,43
4	Pengadaan Listrik, Gas,	9,83	8,45	2,19	2,59	5,31
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,49	7,99	2,14	2,41	2,33
6	Konstruksi	6,07	3,66	5,16	5,74	5,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	6,54	8,42	11,72	6,05	12,32

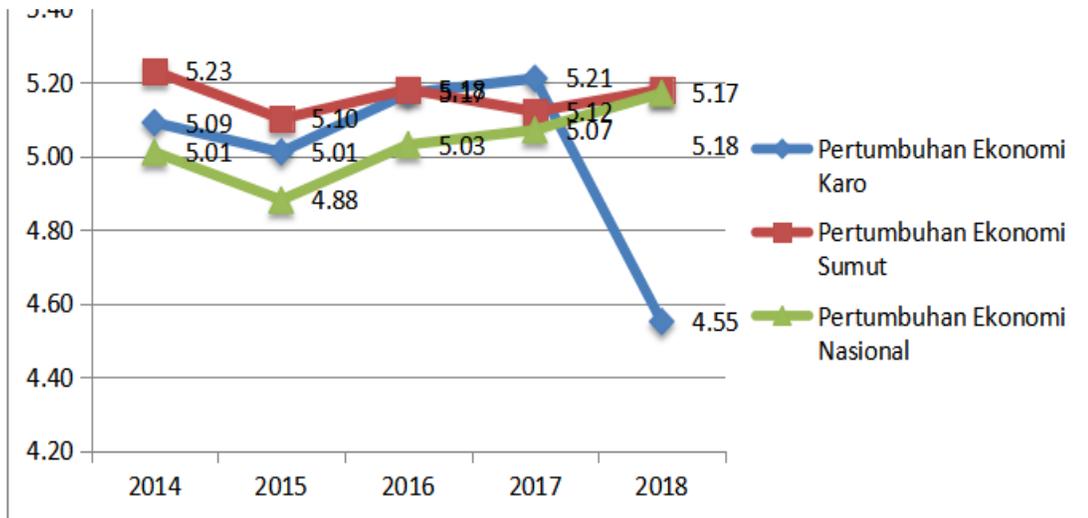
No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
8	Transportasi dan Pergudangan	6,46	6,30	5,09	4,59	7,55
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,45	7,99	8,02	2,18	7,49
10	Informasi dan Komunikasi	4,36	4,29	6,52	5,25	7,30
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,40	7,02	5,66	-0,22	2,10
12	Real Estate	8,48	7,41	7,59	3,78	7,26
13	Jasa Perusahaan	4,74	4,10	4,17	5,92	7,57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7,72	6,63	2,40	2,06	6,99
15	Jasa Pendidikan	7,66	6,05	7,26	3,06	6,81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,03	14,88	8,71	3,98	5,56
17	Jasa Lainnya	11,94	11,34	5,00	4,96	6,70
	PDRB	5,09	5,01	5,17	5,21	4,55

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2019

Dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 perekonomian Kabupaten Karo bertumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo tahun 2018 sebesar 4,55%, sedangkan tahun 2017 sebesar 5,21%. Pada tahun 2018 mengalami perlambatan akibat produksi tanaman hortikultura tahunan mengalami pertumbuhan yang melambat dan pertumbuhan ekonomi selalu mengalami perlambatan akibat pertumbuhan global yang lesu. Pada tahun 2018 semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif dan kategori lapangan usaha perdagangan eceran dan reperasi mobil dan sepeda motor merupakan lapangan usaha yang dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 12,32%, disusul oleh lapangan usaha jasa perusahaan dengan pertumbuhan sebesar 7,57%, sedangkan 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah jasa keuangan dan asuransi sebesar 2,10 %, pertanian, kehutanan perikanan sebesar 2,13% dan pengadaan air, pengolahan sampah, Limbah dan daur ulang sebesar 2,33%.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat ditunjukkan melalui gambar berikut:

Gambar 2.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karo, Sumut dan Indonesia Tahun 2014-2018



Sumber : BPS, 2019 (diolah)

Jika dibandingkan Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo mengalami perlambatan, tercatat pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo (4,55%) berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (5,18%) dan laju pertumbuhan ekonomi nasional (5,17%).

b. Laju Inflasi

Laju inflasi harus dapat dikendalikan oleh pemerintah bersama dengan Bank Indonesia yang telah diamanahkan dalam undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Bank Indonesia. Bank Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Propinsi serta Kota dan Kabupaten selalu bekerjasama dan berkoordinasi dalam mengendalikan laju inflasi, terutama pada kondisi *peak season* (Bulan Ramadhan dan Hari Raya) dimana laju inflasi menjadi lebih cepat naik dan selalu terjadi pada setiap tahunnya.

Dinamika dari perkembangan besarnya laju inflasi kumulatif kota inflasi di Sumatera Utara tahun 2014-2018 dan Sumatera Utara relatif fluktuatif sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 2.13
 Nilai Inflasi Rata-Rata
 Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Kota/Prov	2014	2015	2016	2017	2018
Medan	8,24	3,32	6,60	3,18	1,00
Pematang Siantar	7,94	3,36	4,76	3,10	2,15
Sibolga	8,36	3,34	7,39	3,08	2,86
Padang Sidempuan	7,38	1,66	4,28	3,82	2,22
Sumut	8,17	3,24	6,34	3,20	1,23

Sumber : Bank Indonesia, 2019

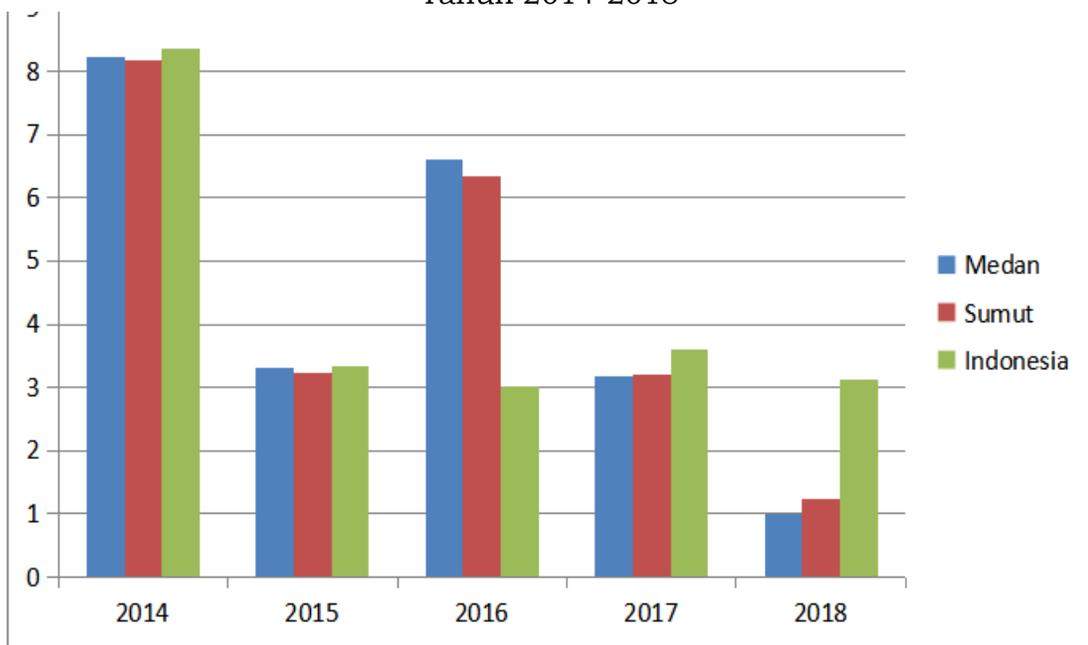
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa bagi daerah yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berada di bawah 10% setahun. Tingkat inflasi yang berada di bawah 10% setahun dikatakan tingkat inflasi yang ringan. Selanjutnya tingkat inflasi yang berkisar antara 10% sampai 30% dikatakan inflasi yang sedang.

Terkait dengan tingkat Inflasi periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sangat fluktuatif. Khusus pada tahun 2014 tingkat inflasi tinggi dapat didukung oleh beberapa faktor yang memicu antara lain kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Namun, periode tahun 2015 tingkat inflasi mulai membaik hal ini ditunjukkan dengan menurunnya tingkat inflasi pada tahun 2015 menjadi 3,32% di kota Medan. Namun pada tahun 2016 kembali terjadi peningkatan nilai inflasi menjadi 6,60%, penyumbang inflasi antara lain adalah komoditas pertanian yaitu cabai merah, kentang, bawang merah, dan sawi hijau. Selanjutnya pada tahun 2018, inflasi kota Medan tercatat rendah berada dibawah pola historisnya seiring terjaganya pasokan bahan pangan akibat panen komoditas di beberapa daerah, yang didukung oleh cuaca yang kondusif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara makro gejolak harga kebutuhan masyarakat cenderung semakin stabil.

Kabupaten Karo mempunyai peran penting dan strategis dalam pengendalian inflasi terutama yang berasal dari komoditas pangan, hal tersebut dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan produksi, distribusi, organisasi industri, struktur pasar dengan mengantisipasi perubahan iklim yang akan mengganggu pasokan pangan.

Untuk melihat perbandingan nilai inflasi Indonesia, Sumatera Utara dan Medan yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama serta letaknya berdekatan secara geografis dengan Kabupaten Karo dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3
Perbandingan Nilai Inflasi Rata-rata Medan, Sumut dan Indonesia Tahun 2014-2018



Sumber : Bank Indonesia, 2019

c. PDRB per Kapita Kabupaten Karo

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun data tersebut belum dapat sepenuhnya digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan.

PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Karo periode tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 cenderung terjadi peningkatan. PDRB per kapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku pada

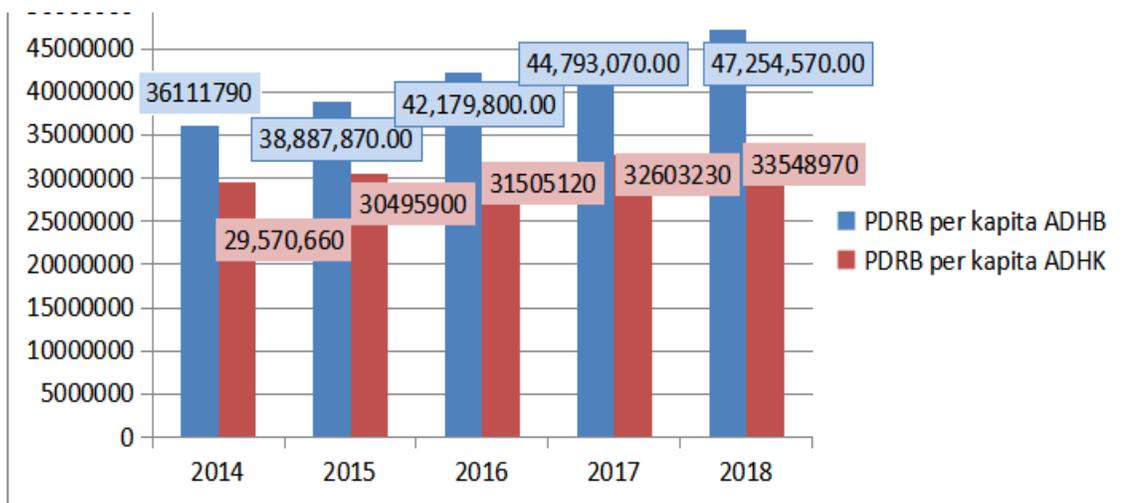
tahun 2014 sebesar 36,11 juta rupiah dan meningkat sampai dengan 47,25 juta rupiah di tahun 2018. Gambaran PDRB perkapita tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat periode tahun 2014 sampai tahun 2018 berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kab. Karo. Selanjutnya peningkatan PDRB Kabupaten Karo harus dibarengi dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. PDRB perkapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14
PDRB Per Kapita
Kabupaten Karo Tahun 2014- 2018

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2014	36.111.592	29.570.664
2015	38.887.870	30.495.898
2016	42.179.797	31.505.119
2017	44.793.070	32.603.230
2018	47.254.570	33.548.970

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2018

Gambar 2.4
PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK 2014-2018



Sumber : BPS, 2018 (diolah)

d. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Periode tahun 2014-2017 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan hal ini disebabkan adanya bencana erupsi Gunung Sinabung yang berdampak multisektoral khususnya dalam penurunan pendapatan penduduk yang dominan berasal sektor pertanian, dimana produktivitas pertanian menurun karena abu vulkanik yang menyebabkan pertanian tidak berhasil karena penurunan produktivitas pertanian yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk yang berada pada kelompok rentan miskin bertambah menjadi penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, sedangkan pada tahun 2018 penduduk miskin menurun menjadi 8,89% karena sektor pertanian mulai membaik dan juga didukung oleh sektor lainnya yang juga mengalami peningkatan seperti lapangan usaha perdagangan eceran dan reperasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha jasa perusahaan yang menambah pendapatan masyarakat. Adapun data kemiskinan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.15
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

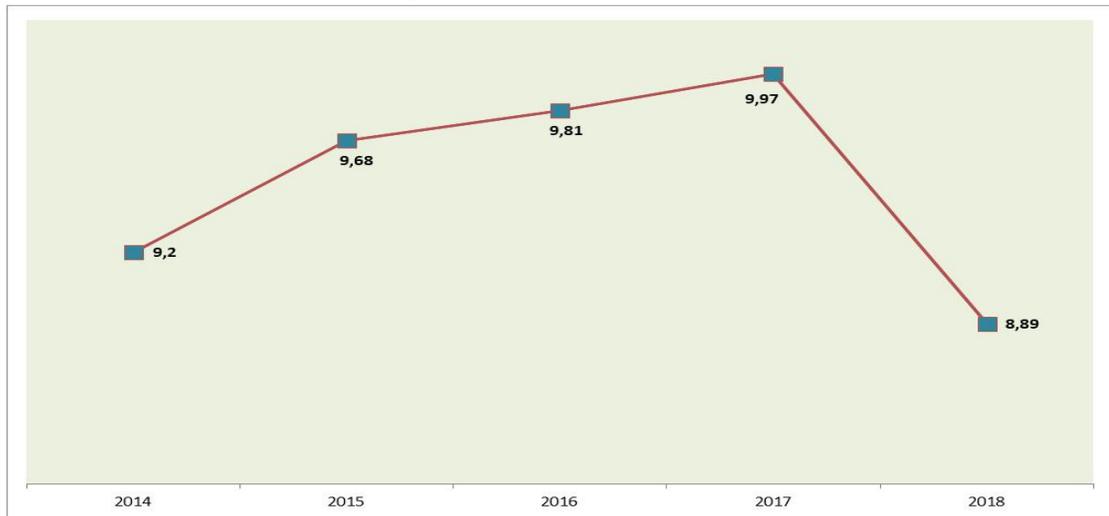
No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)	9,20	9,68	9,81	9,97	8,69

Sumber: BPS Kab. Karo

Perkembangan persentase penduduk miskin dari tahun 2014-2018 mengalami penurunan dan kenaikan, 2014-2017 persentase kemiskinan mengalami kenaikan dimana tahun 2014 sebesar 9,20% meningkat menjadi 9,97% tahun 2017. Tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 8,69%.

Perkembangan tingkat kemiskinan digambarkan pada gambar 2.5.

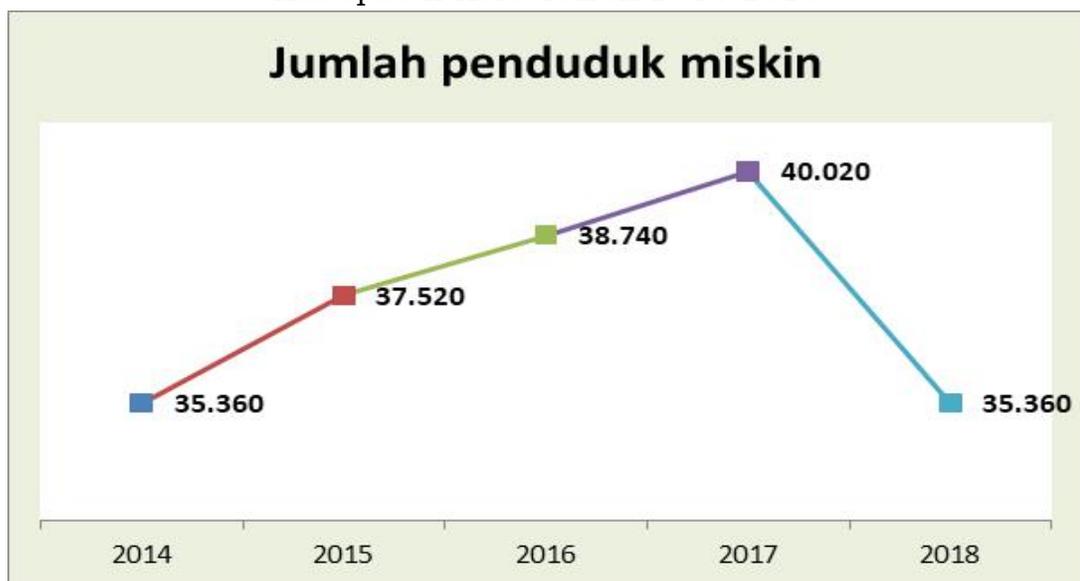
Gambar 2.5
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2019

Seiring dengan penurunan dan peningkatan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin juga mengalami perubahan. Pada tahun 2017 sebesar 40.020 jiwa kemudian menurun pada tahun 2018 karena menurunnya persentase kemiskinan menjadi 35.360 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk miskin digambarkan pada gambar 2.6.

Gambar 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018



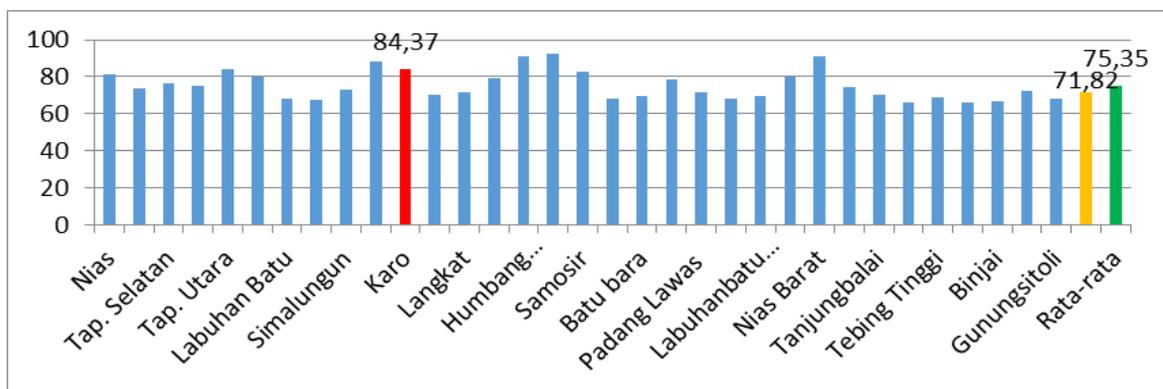
Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2019

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah angka yang menunjukkan ratio antara banyaknya angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja. Untuk Kabupaten Karo bahwa Tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung fluktuatif dari tahun 2014-2018, tercatat pada tahun 2014 sebesar 79,74%, meningkat tahun 2015 menjadi sebesar 85,25%, menurun kembali pada tahun 2017 menjadi sebesar 78,07% dan meningkat kembali menjadi sebesar 84,10%. Semakin meningkat angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Sesuai dengan hasil Susenas mencatat bahwa jumlah angkatan kerja Kabupaten Karo tahun 2017 meningkat dari 218.308 orang dan menjadi 237.335 orang pada tahun 2018.

Gambar 2.7

Posisi Relatif TPAK Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara



Tabel 2.16

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	79,74	85,25	-	78,07	84,10

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2019

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karo mengalami penurunan, Kabupaten Karo berada di bawah angka Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara. TPT di Kabupaten Karo cukup kecil dibanding daerah lain di Sumatera Utara hal ini

disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja sebagai petani. Tingkat pengangguran ini sebaiknya dipertahankan atau ditekan dengan memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi di Kabupaten Karo.

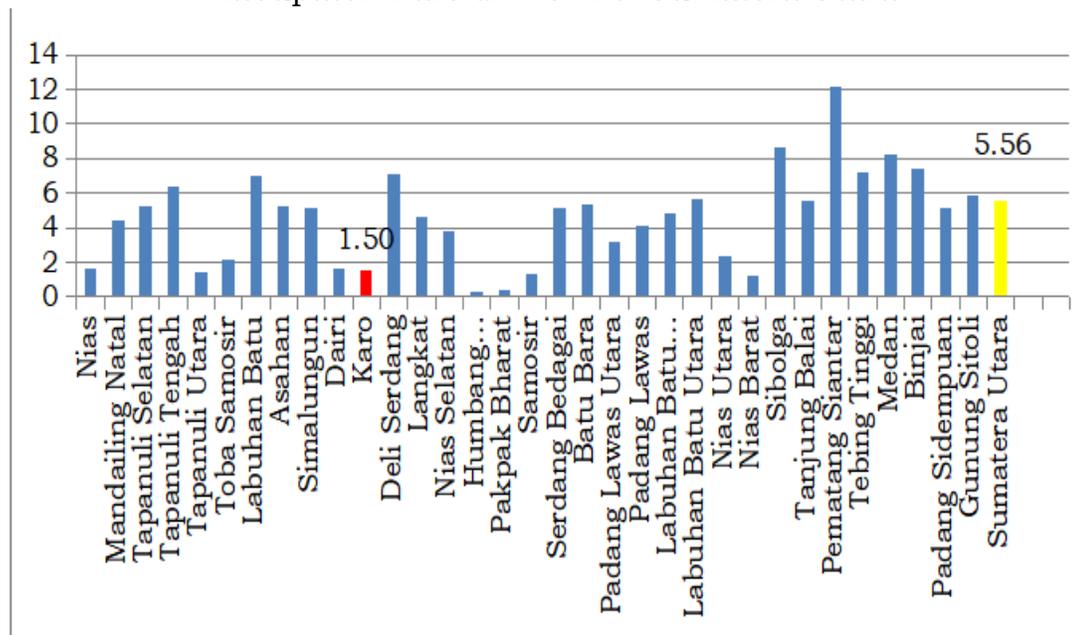
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karo Tahun 2014-2018, disajikan dalam pada tabel 2.17, sebagai berikut:

Tabel 2.17
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	1,02	2,23	-	1,34	1,50

Sumber: BPS, Kabupaten Karo Dalam Angka 2019

Gambar 2.8. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara



Sumber : BPS, Sumatera Dalam Angka (Diolah)

g. Rasio Penduduk Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Jika dilihat dari kondisi Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 maka Rasio penduduk yang bekerja paling rendah

terdapat pada tahun 2015 yakni sebesar 97,77% dan mengalami peningkatan sampai tahun 2018 menjadi sebesar 99,35%. Kondisi Rasio Penduduk Yang Bekerja Tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.18
Rasio Penduduk Yang Bekerja
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)	98,98	97,77	-	98,21	98,5

Sumber: BPS, Kabupaten Karo Dalam Angka (diolah)

h. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dapat diperoleh dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah pendapatan daerah. Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah ini tentu tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu unsur dari pendapatan daerah. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya sendiri. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melihat perkembangan persentase PAD terhadap pendapatan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.19
Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	7,21	5,96	6,86	10,86	10,65

Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo (diolah)

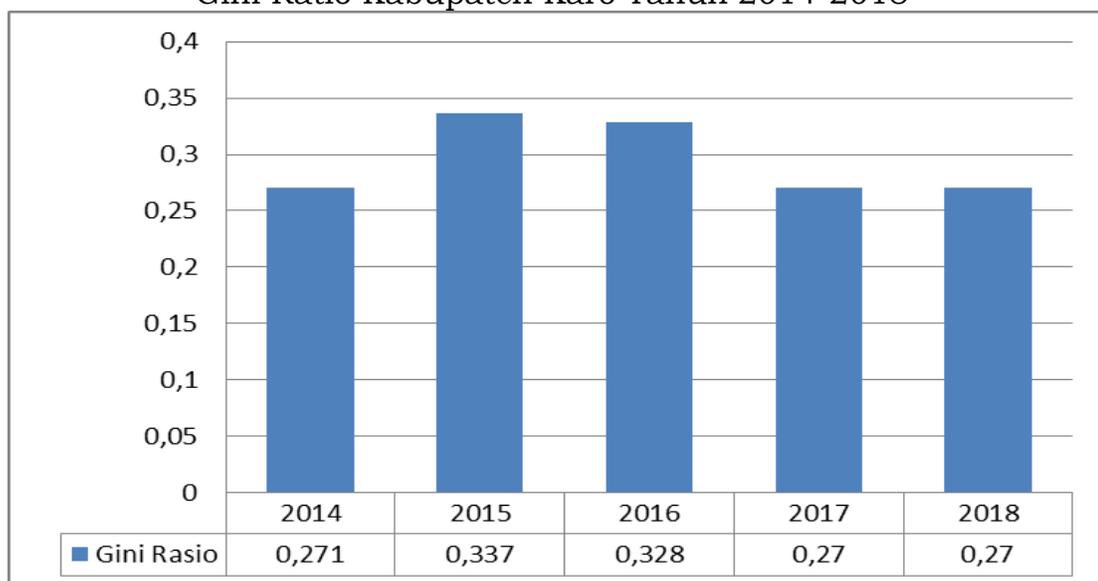
Sesuai dengan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa PAD Kabupaten Karo pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu

sebesar 10,79% pada tahun 2017 menurun menjadi sebesar 10,65% pada tahun 2018, tentunya hal ini mengharuskan Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan antara lain dengan cara mendayagunakan kekayaan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang berhubungan dengan penerimaan daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah.

i. **Gini Ratio**

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat secara menyeluruh dalam suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Ukuran kesenjangan Koefisien Gini berada pada besaran 0 (nol), yang menunjukkan pemerataan sempurna, dan 1 (satu), yang menunjukkan ketimpangan sempurna. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi ($G < 0,3$; ketimpangan rendah; $0,3 \leq G \leq 0,5$ ketimpangan sedang; $G > 0,5$, ketimpangan tinggi).

Gambar 2.9
Gini Ratio Kabupaten Karo Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2019

Secara umum pada tahun 2014-2018 ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Karo masih berada pada kategori ketimpangan rendah sampai dengan sedang. Untuk ketimpangan pendapatan tahun 2018 berada dibawah 0,3 berarti berada pada kategori rendah.

j. Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran Per Kapita merupakan komponen yang memberikan gambaran tingkat daya beli masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Untuk melihat gambaran tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.20
Pengeluaran per Kapita
Kabupaten Karo Tahun 2014 – 2018 (dalam ribuan)

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (ribu Rp)/tahun	11.548	11.925	11.925	12.059	12.367

Sumber : BPS, Provsu, 2018

Jika dilihat dari tabel di atas maka pengeluaran per Kapita di Kabupaten Karo setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Pengeluaran per Kapita Kabupaten Karo berada pada kategori tertinggi.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut:

a. Pendidikan

Harapan Lama sekolah

Harapan lama sekolah yaitu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada tahun 2014-2018 angka harapan lama sekolah menunjukkan kemajuan atau peningkatan, pada tahun 2018 menunjukkan anak-anak yang berusia 7 (tujuh) tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,71 tahun (hingga Diploma I) lebih lama 0,02 tahun dari tahun 2017. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Harapan Lama Sekolah (EYS)
2014	11,89
2015	12,22
2016	12,65
2017	12,71
2018	12,73

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2019

Angka Melek Huruf

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial untuk urusan pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah. Angka Melek Huruf merupakan kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk dewasa yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin lainnya.

Angka melek huruf pada tahun 2018 sebesar 99,61 persen artinya masih terdapat 0,39 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Karo yang buta huruf. Salah satu penyebabnya selain masih kurangnya pembangunan di bidang pendidikan adalah penduduk usia lanjut yang lahir saat pembangunan belum sebaik sekarang.

Selanjutnya, perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Karo sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 disajikan pada tabel 2.22.

Tabel 2.22
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Karo Tahun 2014 – 2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka melek huruf	99,08	98,89	99,08	99,26	99,61

Sumber: BPS, Kab. Karo, 2019

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan lainnya yaitu rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Karo sebesar 9,33 tahun pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 9,55 tahun pada tahun 2018. Dari data tersebut, pendidikan penduduk Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan karena rata-rata penduduk Kabupaten Karo hanya tamat pendidikan menengah pertama.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23
Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Karo Tahun 2014 - 2018

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
2014	9,33
2015	9,5
2016	9,51
2017	9,54
2018	9,55

Sumber : BPS, Kabupaten Karo, 2019

b. Kesehatan

Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk

Indikator kesehatan adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Nilai indikator tersebut dapat memberikan petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan atau populasi tertentu atau sekelompok orang. Indikator kesehatan

untuk indikator, angka usia harapan hidup, persentase balita gizi buruk di Kabupaten Karo sampai dengan tahun 2018 sudah cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.24.

Tabel 2.24
Indikator Kesehatan
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka usia harapan hidup (tahun)	70,42	70,62	70,69	70,77	70,97
2.	Persentase balita gizi buruk (%)	0,02	0,18	0,0013	0,043	0,07

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, 2019
BPS Kabupaten Karo, 2019

c. Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo Tahun 2018 sebesar 99,35% jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih ada angkatan kerja untuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja hanya sebanyak 0,65% karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja sebagai petani, dapat dilihat pada tabel 2.25

Tabel 2.25
Rasio Penduduk Bekerja
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio Penduduk yang bekerja Dalam Angkatan Kerja (%)	98,98	97,77	98,98	98,66	99,35

Sumber: BPS, Kab. Karo, 2019

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui pembangunan manusia. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak namun dengan

memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila angka IPG sama dengan IPM. Apabila angka IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender.

Adapun komponen pembentuk indeks pembangunan gender terdiri dari angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Adapun Pengkategorian IPG menurut UNDP 1. Kelompok tinggi, jika $IPG \geq 80$ 2. Kelompok menengah atas, jika $IPG 66 \leq x < 80$ 3. Kelompok menengah bawah, jika $IPG 50 \leq x < 66$ 4. Kelompok rendah, jika $IPG < 50$.

Tabel 2.26
Perkembangan IPG dan IPM
Kabupaten Karo Tahun 2017-2018

Tahun	IPM	IPG	Kesimpulan
2018	73,53	96,08	Perkembangan IPG Kab. Karo tahun 2017-2018 mengalami peningkatan, hal ini menjelaskan bahwa pencapaian pembangunan gender semakin membaik
2017	73,91	96,27	pembangunan perempuan tumbuh lebih cepat dibanding pembangunan laki-laki yang menyebabkan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) lebih besar terhadap IPM pada tahun 2017 -2018 Walaupun IPG sudah tinggi tetapi perlu dikaji per indikator/variabel pembentuk IPG, karena pada umumnya di Indonesia variabel pendapatan perkapita perempuan sangat rendah dibanding laki-laki

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo, 2019

e. Indeks Development Gender (IDG)

IDG menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial), dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.

IDG terdiri dari tiga dimensi antara lain: keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan

indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi laki-laki dan perempuan, dan distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.

Pada indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Kabupaten Karo pada tahun tahun 2014 sebesar 11,43% dan pada tahun 2015-2018 meningkat menjadi 20%. Sedangkan indikator partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2014 sebanyak 4.434 orang, paling tinggi ditahun 2015 sebanyak 4.758 orang pada tahun 2016 menurun menjadi 4.332 orang tahun 2017 kembali menurun menjadi 4.046 dan tahun 2018 menjadi 4.053.

Tabel 2.27
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (orang)
2014	4.434
2015	4.758
2016	4.332
2017	4.046
2018	4.053

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo, 2019

Tabel 2.28
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan DPRD
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan	Jumlah Total Kursi Keanggotaan DPRD	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR (%)
2014	4	35	11,43
2015	7	35	20,00
2016	7	35	20,00
2017	7	35	20,00
2018	7	35	20,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo, 2019

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap beberapa indikator yaitu jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Tabel 2.29

menunjukkan perkembangan seni dan budaya yang berfluktuasi diakibatkan oleh jumlah penduduk yang bertambah dalam kurun waktu tahun 2014-2018 di Kabupaten Karo.

Tabel 2.29
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Karo Tahun 2014 - 2018

No.	Capaian Pembangunan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah grup kesenian/10.000 penduduk.	0,275	0,314	0,314	0,314	0,314
2	Jumlah gedung kesenian/10.000 penduduk.	0,027	0,026	0,026	0,026	0,026
3	Jumlah klub olahraga/10.000 penduduk.	2,199	2,091	2,279	2,258	1,952
4	Jumlah gedung olahraga/10.000 penduduk.	0	0	0	0	0

Sumber :

- Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Karo
- Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo

Perkembangan bidang seni dan budaya sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat terutama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab dan berkualitas. Kabupaten Karo yang terdiri dari 17 kecamatan dan 269 desa/kelurahan, memiliki berbagai adat istiadat serta kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada di masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan daerah.

Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Karo perlu mendapat perhatian jika dilihat dari jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke 2015 namun mulai tahun 2015 sampai 2018 tidak ada peningkatan sehingga dibutuhkan upaya untuk mengaktifkan kembali sanggar seni yang selama ini tidak aktif antara lain dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah atraksi seni dan budaya yang dapat mendukung pariwisata daerah. Demikian halnya dengan ketersediaan gedung kesenian, pada tahun 2014 sebesar 0,027 angka tersebut menurun menjadi 0,026 sampai tahun 2018.

Kondisi tersebut tentu membutuhkan sentuhan langsung dari pemerintah dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan dalam bidang seni dan budaya, baik melalui regulasi maupun program dan kegiatan yang memicu perkembangan seni dan budaya daerah.

Perkembangan seni dan budaya tersebut diharapkan dapat memberi efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perkembangan Olahraga di Kabupaten Karo, dilihat dari jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk pada tahun 2014 sebesar 2,199 dan pada tahun 2018 menurun mejadi 1,952, hal ini dikarenakan jumlah klub olahraga tidak bertambah pada tahun 2018, permasalahan lainnya bahwa keberadaan klub olahraga tidak diiringi dengan pembangunan sarana olahraga dimana Kabupaten Karo belum memiliki gedung olahraga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

a. Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Tabel 2.30
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Siswa pada Jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun	Pendidikan Anak Usia Dini
2014	4.454	24.888	17,90
2015	7.303	25.610	28,52
2016	5.954	26.285	22,65
2017	5.798	26.529	21,80
2018	9.829	26.758	36,73

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Karo

Berdasarkan tabel di atas pendidikan usia dini Kabupaten Karo 2014-2018 mengalami penurunan, tahun 2014 sebesar 17,90% meningkat tahun 2018 menjadi 36,73%.

Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) adalah untuk melihat partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan (berapa pun usianya) sesuai dengan jenjang pendidikan sebagai salah satu indikator keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan. Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MI di Kabupaten Karo tahun 2014 sebesar 113,80 sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 107,03. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs tahun 2014 sebesar 78,29 dan tahun 2018 meningkat menjadi 88,67 tahun 2018.

Berikut disajikan tabel 2.31 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Karo.

Tabel 2.31
Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	SD/MI (%)	113,80	109,76	110,31	105,51	107,03
2.	SMP/MTs (%)	78,29	95,41	88,41	84,96	88,67

Sumber : BPS Kab. Karo, 2019

Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM Kabupaten Karo pada Tahun 2018 sebesar 99,15 masih ada yang tidak sekolah tepat waktu pada jenjang SD/MI sebesar 0,85%, dan SMP/MTs sebesar 83,14 masih ada yang tidak sekolah tepat waktu pada jenjang SMP/MTs sebesar 16,86%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	APM SD/MI/Paket A	99,58	98,47	99,35	98,44	99,15
2.	APM SMP/MTs/Paket B	78,29	81,17	83,47	81,47	83,14

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2019

Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah di setiap jenjang pendidikan masih ada, untuk tahun 2018 angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,25% menurun dari tahun-tahun sebelumnya, jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 0,65% jenjang ini capaiannya meningkat dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, angka putus sekolah yang paling besar adalah jenjang pendidikan SMP/MTs hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, seperti terlihat berikut.

Tabel 2.33
Angka Putus Sekolah
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,4	0,30	0,44	0,35	0,25
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	3,55	0,28	0,33	0,44	0,65

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2019

Angka Kelulusan

Angka kelulusan murid pada jenjang pendidikan dasar mencapai 100% pada tahun 2015 dan 2016, pada tahun 2017 menurun menjadi 99,86 sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 98,99 tetapi capaian ini belum mencapai 100%. Untuk jenjang SMP/MTs periode 2014-2018 hanya pada tahun 2015 yang mencapai 100%, capaian selama lima tahun cenderung menurun, dimana pada tahun 2016 menurun menjadi 99,99% pada tahun 2017 menurun menjadi 98,39% dan tahun 2018 menjadi 98,84% artinya pada tahun 2018 masih ada siswa yang tidak lulus sebesar 1,16%. Angka kelulusan jenjang pendidikan dasar disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	98,99	100	100	99,86	98,99
2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	98,65	100	99,99	98,39	98,84

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2019

Angka Melanjutkan

Angka kelulusan berkaitan erat dengan angka melanjutkan sekolah karena siswa yang lulus tersebutlah yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk jenjang SD/MI tahun 2014-2018 masih belum bisa mencapai 100% berarti masih ada yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs, sedangkan tingkat SMP/MTs pada tahun 2018 sudah mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya angka melanjutkan disajikan pada tabel 2.35.

Tabel 2.35
Angka Melanjutkan Sekolah
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI (%)	97,291	92,13	98,46	97,82	92,75
2.	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs (%)	93,84	79,40	98,05	94,80	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2019

Fasilitas Pendidikan

Jumlah sekolah di Kabupaten Karo jenjang pendidikan dasar dan menengah masih kurang. Sekolah dan sarana prasarana dalam kondisi baik belum mencapai 100%, masih memerlukan anggaran yang besar untuk pemeliharaan dan rehab sehingga kondisi baik mencapai 100%. Fasilitas pendidikan dasar dan menengah kondisi baik tahun 2014-2018, seperti terlihat pada tabel 2.36 di bawah ini.

Tabel 2.36
Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sekolah SD/MI kondisi baik (%)	70	88,91	19,84	34,02	32,17
2.	Sekolah SMP/MTs kondisi baik (%)	78	82,3	82,15	23,07	24,65
3.	Sekolah SD/MI Memiliki ruang perpustakaan (%)	29,59	29,59	80,07	89,80	87,75
4.	Sekolah SMP/MTs Memiliki ruang perpustakaan (%)	80,00	83,00	90	90,48	98,44
5.	Sekolah SMP/MTs Memiliki ruang laboratorium (%)	58,00	58,00	94,29	88,89	49,22
6.	Persentase Kecamatan yang memiliki TK Pembina (%)	23	23	23,53	23,53	23,53
7.	Persentase Kelurahan/desa yang memiliki lembaga PAUD Non Formal (%)	45	50,56	37,55	48,7	48,7

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2019

Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan diperlukan ketersediaan infrastruktur pendidikan yakni ketersediaan gedung sekolah. Ketersediaan gedung sekolah harus sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah, ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI) cenderung menurun, dimana pada tahun 2014 sebesar 62,74, tahun 2015 menurun menjadi 62,13, kembali menurun menjadi 61,14 tahun 2016 dan meningkat menjadi 61,71 pada tahun 2017 tetapi kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 59,45.

Begitu juga untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah pada tahun 2014 sebesar 35,92, kemudian pada tahun 2015 menurun menjadi 34,43 kemudian menurun kembali menjadi 33,99 tahun 2016, pada tahun 2017 meningkat menjadi 36,52 tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 30,65. Rasio ketersediaan gedung sekolah per penduduk usia sekolah Kabupaten Karo disajikan dalam tabel 2.37.

Tabel 2.37
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Karo Tahun 2014 - 2018

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	<i>SD/MI</i>					
1.1	Jumlah gedung sekolah	294	296	297	291	294
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	46.859	47.638	48.570	47.159	49.424
1.3	Rasio per 10.000 penduduk	62,74	62,13	61,15	61,71	59,45
2	<i>SMP/MTs</i>					
2.1	Jumlah gedung sekolah	73	70	70	64	64
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	20.319	20.333	20.595	17.527	20.879
2.3	Rasio per 10.000 penduduk	35,92	34,43	33,99	36,52	30,65

Sumber : BPS Kab.Karo, 2019 (diolah)

Rasio Guru/Murid

Periode waktu 2014-2018, jumlah tenaga pendidikan dan peserta didik juga harus disesuaikan untuk menciptakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI) rasio guru dan murid paling tinggi pada tahun 2016 yaitu 658,2 dan paling rendah pada tahun 2014 sebesar 405,52 sedangkan tahun 2018 mencapai 575,8 artinya tersedia 575 orang guru untuk 10.000 orang siswa.

Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) rasio Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Karo paling tinggi pada tahun 2015 sebesar 853 sedangkan paling rendah pada tahun 2014 sebesar 405,52 sedangkan tahun 2018 mencapai 635,60 artinya bahwa pada tahun 2018 tersedia kurang lebih 635 orang guru untuk 10.000 orang siswa. Rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Karo disajikan dalam tabel 2.38.

Tabel 2.38
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Karo Tahun 2014 – 2018

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	2.838	3.240	3.145	2.679	2.699
1.2	Jumlah Murid	69.985	56.066	47.782	46.529	45.168
1.3	Rasio guru per 10.000 siswa	405,52	577,89	658,2	575,77	597,547
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	1.450	1.812	1.814	1.348	1.337
2.2	Jumlah Murid	20.848	21.229	21.695	21.040	21.036
2.3	Rasio guru per 10000 siswa	695,51	853,55	836,14	640,684	635,607

Sumber : BPS Kab. Karo, 2019 (diolah)

Pada tahun 2018 jumlah guru paling banyak berada di Kecamatan Kabanjahe yakni sebanyak 419 guru dengan jumlah murid 9.301 jiwa dan yang paling rendah di Kecamatan Merdeka sebanyak 53 guru dengan jumlah murid sebanyak 724 jiwa. Rasio Jumlah Guru dan Murid paling tinggi berada di Kecamatan Kutabuluh sebesar 845,50 dan terendah di Kecamatan Berastagi sebesar 430,42.

Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) jumlah guru paling banyak di Kecamatan Kabanjahe

sebanyak 273 guru dengan jumlah murid 5.658 jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Dolat Rayat sebanyak 12 guru dengan jumlah siswa 154 jiwa sedangkan di Kecamatan Merdeka belum memiliki gedung sekolah tingkat SMP sederajat.

Untuk rasio Jumlah Guru dan murid paling tinggi di Kecamatan Simpang Empat sebesar 975,31 dan terendah di Kecamatan Kabanjahe sebesar 482,50. Rasio jumlah guru/murid menurut kecamatan di kabupaten Karo dapat disajikan dalam tabel 2.39.

Tabel 2.39
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2018

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Mardingding	149	2715	548,80	63	1.151	547,35
2	Laubaleng	143	2.550	560,78	50	854	585,48
3	Tigabinanga	171	2.558	668,49	80	1.439	555,94
4	Juhar	114	1.420	802,82	43	553	777,58
5	Munte	186	2.359	788,47	52	608	855,26
6	Kutabuluh	110	1.301	845,50	42	610	688,52
7	Payung	89	1.100	809,09	45	505	891,09
8	Tiganderket	120	1.508	795,76	41	627	653,91
9	Simpang Empat	130	1.724	754,06	79	810	975,31
10	Naman Teran	105	1.526	688,07	35	488	717,21
11	Merdeka	53	724	732,04	0	0	0
12	Kabanjahe	419	9.301	450,49	273	5.658	482,50
13	Berastagi	296	6.877	430,42	238	4.168	571,02
14	Tigapanah	228	3.273	696,61	115	1.467	783,91
15	Dolat Rayat	62	840	738,10	12	154	779,22
16	Merek	142	2.935	483,82	65	776	837,63
17	Barusjahe	182	2.457	740,74	104	1.168	890,41
	Jumlah	2699	45168	597,55	1.337	21.036	635,58

Sumber : BPS, Karo Dalam Angka 2019 (diolah)

Penumpukan guru di daerah tertentu dan kekurangan guru di daerah terpencil dan perbatasan menjadi permasalahan pendidikan yang harus diperhatikan. Pemerataan dan penataan guru menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan Rasio guru terhadap jumlah siswa yang proporsional di setiap daerah sehingga dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran di sekolah. Melalui regulasi yang sudah dibuat bahwa setiap guru yang ditempatkan

harus memenuhi masa tugas selama 5 tahun untuk bisa bertugas ditempat lain. Begitu juga mengatasi guru yang berada di daerah terpencil dan perbatasan akan dibuat regulasi yang mengatur insentif khusus. Pemerintah juga melakukan distribusi tenaga pendidikan di setiap kecamatan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI).

Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata

Indikator rasio guru/murid per kelas rata-rata Kabupaten Karo dari Tahun 2014-2018 sudah terlihat baik seperti disajikan pada tabel 2.40 berikut ini.

Tabel 2.40
Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	SD/MI per 1.0000 murid	405,52	577,89	15,19	658,2	575,8
2.	SMP/MTs per 1.0000 murid	695,51	853,55	11,96	836,14	640,7

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2019

Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV

Persentasi tenaga pendidik yang S-1/DIV Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya untuk mencapai S-1/DIV adalah guru dan kepala sekolah agar mencapai 100% serta kepala sekolah untuk memiliki sertifikat diklat kepala sekolah serta peningkatan kompetensi, ini dapat tergambar pada tabel 2.41.

Tabel 2.41
Persentasi Tenaga Pendidik S-1/DIV
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Guru yang memenuhi S-1/DIV	66,14	67,81	83,95	77,45	88,34
2.	Kepala Sekolah yang memenuhi S-1/DIV	75,00	85,00	95	90	90
3.	Kepala Sekolah yang memiliki sertifikat Diklat Kepala Sekolah	2	2	0	8	8
4.	Pengawas Sekolah yang memenuhi S-1/DIV	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2019

Jumlah Guru Bersertifikat

Undang-undang sistem pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat 1 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan adalah guru yang bermutu yaitu guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah.

Guru yang profesional dinilai dari kepemilikan sertifikat pendidik guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikasi guru bertujuan untuk:

- a) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- b) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
- c) Meningkatkan martabat guru
- d) Meningkatkan profesionalitas guru

Persentase guru SD PNS yang bersertifikat pada tahun 2014 sebesar 74,06% dan non PNS sebesar 10,56%, tahun 2015 menurun menjadi 73,40% untuk PNS dan non PNS menurun menjadi 10,44%, tahun 2016 meningkat menjadi 86,64% untuk PNS dan non PNS meningkat menjadi 11,09%, tahun 2017 menurun menjadi 80,53% untuk PNS dan non PNS menurun menjadi 10,00% serta tahun 2018 kembali menurun menjadi 70,77% untuk PNS dan non PNS meningkat menjadi 10,83%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.42. Jumlah Guru Tingkat SD Bersertifikat Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

TAHUN	GURU SD					
	JUMLAH GURU		GURU BERSERTIFIKAT			
	PNS	NON PNS	PNS		NON PNS	
			Jumlah	%	Jumlah	%
2014	1430	900	1059	74,06	95	10,56
2015	1470	987	1079	73,40	103	10,44
2016	1490	1010	1291	86,64	112	11,09
2017	1500	1050	1208	80,53	105	10,00
2018	1591	1062	1126	70,77	115	10,83

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2019

Data untuk Guru bersertifikasi tingkat SMP, persentase guru SD PNS yang bersertifikat pada tahun 2014 sebesar 72,25% dan non PNS sebesar 17,11%, tahun 2015 meningkat menjadi 72,58% untuk PNS dan non PNS meningkat menjadi 16,45%, tahun 2016 meningkat menjadi 90,78% untuk PNS dan non PNS meningkat menjadi 19,57%, tahun 2017 menurun menjadi 81,46% untuk PNS dan non PNS menurun menjadi 17,23% serta tahun 2018 kembali menurun menjadi 76,77% untuk PNS dan non PNS meningkat menjadi 19,42%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Jumlah Guru Tingkat SMP yang bersertifikat
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

TAHUN	GURU SMP					
	JUMLAH GURU		GURU BERSERTIFIKAT			
	PNS	NON PNS	PNS		NON PNS	
			Jumlah	%	Jumlah	%
2014	890	450	643	72,25	77	17,11
2015	890	468	646	72,58	77	16,45
2016	900	470	817	90,78	92	19,57
2017	917	470	747	81,46	81	17,23
2018	917	479	704	76,77	93	19,42

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2019

Dari penjelasan di atas, periode 2014-2018 terjadi penurunan persentase guru yang bersertifikat tingkat SD dan SMP di Kabupaten Karo hal ini disebabkan antara lain:

1. Sebagian Guru yang mengikuti pratest yang dilaksanakan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mencapai nilai kriteria minimum
2. Sebagian Guru Non PNS yang mengajar di sekolah negeri tidak Memiliki NUPTK, dimana untuk penerbitan NUPTK dikeluarkan SK Bupati sebagai guru honorer
3. Sebagian guru Non PNS diangkat menjadi guru setelah akhir Tahun 2015 dan juga adanya CPNS Guru yang diangkat setelah akhir Tahun 2015

Capaian SPM Urusan Pendidikan

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), jenis

pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pendidikan Dasar (SD dan SMP)
3. Pendidikan Kesetaraan

Adapun realisasi pemenuhan pencapaian SPM Pendidikan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Rekapitulasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan
Kabupaten Karo Tahun 2018

No	Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Anak	Sedang Bersekolah					Capaian (%)
			TK/RA/Sederajat	SD/MI/Sederajat	SMP/MTs/Sederajat	Kesetaraan	Jumlah	
1	5-6	17.834	5.382	2.939	-	-	8.321	46,66
2	7-12	50.045	144	42.675	4.578	17	47.414	94,74
3	13-15	21.145	-	794	17.218	27	18.039	85,31
4	16-18	18.439	-	-	782	142	924	5,01

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya.

Pembangunan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai

investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Angka Kematian Ibu

Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera per 100.000 kelahiran hidup.

Kabupaten Karo jumlah kematian ibu pada tahun 2014 sebanyak 6 kematian atau 88 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2015 sebanyak 5 kematian atau 73 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2016 sebanyak 9 kematian atau 129 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2017 sebanyak 6 kematian atau 91 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan tahun 2018 sebanyak 7 kematian atau 105 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya pada tahun 2018 angka kematian ibu meningkat dibandingkan pada tahun 2017 dan target RPJMN pada tahun 2019 capaian Kabupaten Karo sudah berada dibawah target capaian nasional. Adapun perkembangan angka kematian ibu di Kabupaten Karo disajikan pada tabel 2.45.

Tabel 2.45
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah kelahiran	Jumlah Kematian	Jumlah Kematian per 100.000 kelahiran
2014	6.753	6	88
2015	6.841	5	73
2016	6.969	9	129
2017	6.586	6	91
2018	6.637	7	105

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Angka Kematian Bayi

Infant Mortality Rate atau Angka Kematian Bayi (AKB) Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kondisi Angka Kematian Bayi Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Angka Kematian Bayi
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah kelahiran	Jumlah Kematian	Jumlah Kematian per 1000 kelahiran
2014	6.753	56	8,29
2015	6.841	29	4,23
2016	6.969	15	2,15
2017	6.586	14	2,12
2018	6.637	26	3,91

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Perkembangan jumlah kematian bayi Kabupaten Karo periode 2014-2018 mengalami naik turun, tahun 2014 sebesar 8,29 per 1.000 kelahiran hidup, untuk tahun 2015 menurun menjadi 4,23 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2016 sebesar 2,15 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2017 menurun menjadi 2,12 tetapi pada tahun 2018 meningkat menjadi 3,91. Capaian pada tahun 2018 sebesar 3,91 diklasifikasikan pada kelompok rendah karena berada pada posisi dibawah ≥ 20 .

Rendahnya angka ini dimungkinkan karena kasus-kasus kematian yang dilaporkan hanyalah kasus kematian yang terjadi di sarana pelayanan kesehatan, sedangkan kasus-kasus kematian yang terjadi di masyarakat belum seluruhnya dilaporkan.

Berdasarkan capaian tersebut jika dibandingkan dengan target pada RPJMN 2015-2019 target angka kematian bayi pada tahun 2019 sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup sedangkan capaian Kabupaten Karo 2018 sebesar 3,91 sudah berhasil mencapai target dalam menekan angka kematian bayi.

Rasio Posyandu per Satuan Balita

Untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak bisa diakses di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah posyandu di Kabupaten Karo pada tahun 2018 sebanyak 403 posyandu dan jumlah balita sebanyak 43.260 jiwa. Dengan demikian rasio posyandu terhadap balita mencapai 107, hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu Kabupaten Karo melayani 107 balita. Berikut disajikan rasio posyandu di Kabupaten Karo tahun 2014-2018.

Tabel 2.47
Rasio Jumlah Posyandu terhadap Jumlah Balita
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Posyandu	396	396	399	394	403
2	Jumlah Balita	44.728	44.074	32.381	43.551	43.260
3	Rasio Posyandu Per Jumlah Balita	1 : 113	1 : 111	1 : 81	1 : 103	1 : 107

Sumber : BPS Kab. Karo, 2019 (diolah)

Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk

Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Karo tahun 2018 mencapai 1 : 102.418 artinya satu rumah sakit melayani 102.418 penduduk, idealnya satu rumah sakit melayani 100.000 penduduk. Kabupaten Karo dengan penduduk sebesar 403.207 jiwa dengan demikian rumah sakit sebanyak 4 (empat) belum bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal.

Rasio Puskesmas mencapai 1 : 21.561 artinya satu puskesmas melayani 21.561 penduduk, sedangkan rasio puskesmas mencapai 1 : 2.544 artinya 1 puskesmas melayani 2.544 penduduk. Bila

dibandingkan dengan konsep wilayah kerja puskesmas dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000 penduduk, dengan jumlah pelayanan puskesmas di Kabupaten Karo berada di bawah 30.000 penduduk hal ini diharapkan puskesmas dan Pustu sudah dapat menjangkau penduduk sasaran di wilayah kerjanya.

Dari data tersebut dengan adanya puskesmas, dan Pustu di setiap kecamatan diharapkan pelayanan kesehatan dapat diakses semua penduduk di Kabupaten Karo. Berikut tabel rasio Rumah Sakit, Rasio Puskesmas dan Pustu Per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo. Berikut tabel rasio Rumah Sakit, Rasio Puskesmas dan Pustu Per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo.

Tabel 2.48
Rasio Rumah Sakit dan Rasio Puskesmas, Polindes, Pustu
Per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Rumah sakit	5	5	5	5	4
Jumlah Puskesmas	19	19	19	19	19
Jumlah Pustu	230	230	321	230	161
Jumlah Penduduk	382.622	389.591	396.579	403.207	409.675
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk	1 : 76.524	1 : 77.918	1 : 79315	1 : 80641	1 : 102418
Rasio Puskesmas Persatuan penduduk	1 : 20.138	1 : 20.504	1 : 20872	1 : 21221	1 : 21561
Rasio Pustu Per Satuan Penduduk	1 : 1.663	1 : 1.693	1 : 1235	1 : 1753	1 : 2544

Sumber : BPS Kab. Karo, 2019

Rasio dokter per satuan penduduk dan Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah telah menyediakan tenaga kesehatan yang menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Karo. Adapun jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2018 yaitu dokter umum ada sebanyak 91 orang, dokter spesialis sebanyak 68 orang, dokter gigi sebanyak 23 orang sehingga seluruh tenaga medis ada sebanyak 182 orang.

Berikut disajikan tabel 2.49 rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Karo tahun 2014-2018.

Tabel 2.49
Rasio Tenaga Kesehatan
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Dokter					
Dokter Umum	85	85	65	91	91
Dokter Spesialis	18	18	18	68	68
Dokter Gigi	27	27	17	26	23
Jumlah Tenaga Medis	1.430	1.430	100	185	182
Jumlah Penduduk	382.622	389.591	396.598	354.242	409.675
Rasio Dokter Umum Persatuan Penduduk	1 : 4.501	1 : 4.583	1 : 6101	1 : 3892	1: 4501
Rasio Dokter Spesialis Persatuan Penduduk	1 : 21.257	1 : 21.257	1 : 22033	1 : 5209	1 : 6024
Rasio Dokter Gigi Persatuan Penduduk	1 : 14.171	1 : 14.171	1 : 23329	1 : 13624	1 : 17.811
Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	1 : 267	1 : 272	1 : 3965	1 : 1914	1 : 2.250

Sumber : BPS, Kab. Karo, 2019 (diolah)

Cakupan Anak yang Diimunisasi Campak

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur 1 tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia 1 tahun adalah anak usia 12-23 bulan.

Di Kabupaten Karo, tahun 2014-2018, jumlah terbanyak pada tahun 2016 sebesar 6.877 anak, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6.343, tahun 2018 menurun menjadi 6.138. Adapun perkembangannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah anak usia 1 tahun yang dapat imunisasi campak
2014	6.708
2015	6.708
2016	6.877
2017	6.343
2018	6.138

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (*alveoli*) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat dan/atau kesukaran bernafas, ditargetkan 100% atau tidak ada kasus, sedangkan di Kabupaten Karo kasus balita pneumonia tahun 2014-2018 tidak ada penderita pneumonia balita yang ditangani. Perkembangan Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani di Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani disuatu wilayah kerja	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita yang ditangani disuatu wilayah kerja	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani
2014	Nihil	4.645	-
2015	Nihil	4.654	-
2016	Nihil	986	-
2017	Nihil	12.055	-
2018	Nihil	12.250	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk

Tingkat prevalensi Tuberculosis di Kabupaten Karo 2014-2018, paling tinggi di tahun 2018 sebesar 229,20 dan terendah tahun 2016 sebesar 69,595. Sebelumnya tahun 2014 sebesar 73,440 dan tahun 2015 sebesar 85,730. Dari data terlihat peningkatan yang signifikan pada tahun tahun 2018. Perkembangan Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk di Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Tingkat Prevalensi Tuberculosis Per 100.000 Penduduk
Kabupaten Karo Tahun 2014-2019

Tahun	Banyaknya kasus penderita TBF (Baru dan Lama)	Jumlah Penduduk	Tingkat Prevalensi Tuberculosis
2014	281	382.622	73,440
2015	334	389.591	85,730
2016	276	396.579	69,595
2017	876	403.207	217,25
2018	939	409.675	229,20

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Tingkat Kematian Karena TB per 100.000 Penduduk

Tingkat kematian karena TB pada tahun 2014 tidak ada atau tidak ditemukan, tahun 2015 sebanyak 7 kasus atau 1,797 per 100.000 penduduk, tahun 2016 sebanyak 1 kasus atau 0,252 per 100.000 penduduk, tahun 2017 sebanyak 5 kasus atau 1,240 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2018 sebanyak 12 kasus atau 2,929 per 100.000 penduduk. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53
Tingkat Kematian Karena TBC
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah pasien TB yang meninggal	Jumlah Penduduk	Tingkat Kematian Karena TB per 100.000 Penduduk
2014	0	382.622	0,000
2015	7	389.591	1,797
2016	1	396.579	0,252
2017	5	403.207	1,240
2018	12	409.675	2,929

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

DOTS (*Directly Observed Treatment Succes Rate*) adalah strategi penyembuhan TB paru jangka pendek dengan pengawasan secara langsung Pengobatan yang dilakukan kepada pasien TB BTA melalui DOTS pada tahun 2014 sebanyak 623 pasien dan sebesar 53,45% Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS, tahun 2015 sebanyak 623 pasien dan sebesar 55,70% Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS, untuk tahun 2016 sebanyak 631 pasien dan sebesar 81,93% Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS, pada tahun 2017 sebanyak 645 pasien dan sebesar 97,36% Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS sedangkan tahun 2018 sebanyak 762 pasien dan sebesar 98,16% Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Data selengkapnya terkait Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54
Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah pasien TB BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS			Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS (%)
	Positif (+)	Negatif (-)	Jumlah		
2014	330	3	333	623	53,45
2015	294	53	347	623	55,70
2016	214	303	517	631	81,93
2017	174	454	628	648	97,36
2018	170	578	762	655	114,19

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Proporsi Kasus TBC Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS tahun 2014 sebesar 186,53%, tahun 2015 sebesar 175% tahun 2016 sebesar 120,88%, tahun 2017 sebesar 96,91% dan tahun 2018 sebesar 98,16%. Data selengkapnya disajikan pada tabel 2.55.

Tabel 2.55
Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah pasien TB BTA mendapat program DOTS			Jumlah pasien baru TB paru diobati	Proporsi Kasus TBC Sembuh Program DOTS (%)
	Positif (+)	Negatif (-)	Jumlah		
2014	330	3	623	334	186,53
2015	294	53	623	356	175,00
2016	214	303	631	522	120,88
2017	174	454	628	648	96,91
2018	170	578	748	762	98,16

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Karo tahun 2014-2018 mencapai 100%. Data selengkapnya disajikan pada tabel 2.56.

Tabel 2.56
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah penderita DBD yang yang ditangani sesuai SOP	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)
2014	248	248	100
2015	201	201	100
2016	363	363	100
2017	38	38	100
2018	81	81	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penderita diare yang ditangani tahun 2014 sebesar 108,97%, tahun 2015 sebesar 114,68%, tahun 2016 sebesar 3,51% tahun 2017 sebesar 5,42 dan tahun 2018 sebesar 1,11%. Data selengkapnya disajikan pada tabel 2.57.

Tabel 2.57
Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah penderita diare yang datang dan ditangani disarana kesehatan dan kader	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)
2014	9.085	8.337	108,97
2015	8.085	7.050	114,68
2016	751	21.416	3,51
2017	6.921	127.615	5,42
2018	3.165	283.536	1,11

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Angka Kejadian Malaria

Jumlah penduduk yang menderita malaria di Kabupaten Karo tahun 2014-2018 terbanyak pada tahun 2014 sebanyak 269 kasus dan terendah tahun 2018 sebanyak 0 kasus, sedangkan jumlah

kematian tersangka malaria di Kabupaten Karo belum ada ditemukan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.58
Angka Kejadian Malaria
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah penduduk yang menderita malaria
2013	269
2014	296
2015	296
2016	54
2017	0
2018	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang keempat atau lebih untuk mendapatkan pelayanan *Ante Care (ANC)* sesuai standar yang ditetapkan. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Karo tertinggi pada tahun 2014 sebesar 83,75% sedangkan terendah di tahun 2015 sebesar 74,16% sedangkan capaian tahun 2018 sebesar 76,00%. Data selengkapnya disajikan pada tabel 2.59.

Tabel 2.59
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jumlah sasaran ibu hamil	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)
2014	7.008	8.368	83,75
2015	7.259	9.788	74,16
2016	7.455	9.675	77,05
2017	7.048	9.661	72,95
2018	7.290	9.591	76,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Cakupan Pelayanan Nifas

Dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota untuk Cakupan Pelayanan Nifas ditargetkan sebesar 90%. Di Kabupaten Karo tahun 2014-2018 belum mencapai 90 %, capaian

tertinggi pada tahun 2014 hanya sebesar 74,63%. Data selengkapnya disajikan pada tabel 2.60.

Tabel 2.60
Cakupan Pelayanan Nifas
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Peserta Ibu Nifas Yang Telah Memperoleh 3 Kali Pelayanan Nifas Sesuai Standar	Jumlah ibu nifas	Cakupan Pelayanan Nifas (%)
2014	5.956	7.984	74,60
2015	6.286	9.344	67,27
2016	6.277	9.235	67,97
2017	5.823	9.222	63,14
2018	6.595	9.155	72,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota untuk cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani ditargetkan sebesar 80%. Di Kabupaten Karo tahun 2014-2018 belum mencapai 80 %, capaian tertinggi pada tahun 2014 hanya sebesar 2,81% dan capaian tahun 2018 masih mencapai 7,61. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
Kabupaten Karo Tahun 2014-2019

Tahun	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
2014	32	1.140	2,81
2015	19	1.335	1,42
2016	76	1.319	5,76
2017	63	1.245	5,06
2018	94	1.235	7,61

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat

Dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota untuk Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat ditargetkan sebesar 100%. Di Kabupaten Karo tahun 2018 sudah mencapai 100%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Murid SD dan Setingkat Yang Diperiksa Kesehatan	Jumlah Murid SD dan Setingkat Di Satu Wilayah Kerja	Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat (%)
2013	8.017	8.638	92,81
2014	7.836	8.219	95,34
2015	7.784	8.112	95,95
2016	7.728	8.119	95,18
2017	7.501	7.501	100
2018	6.969	6.969	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Angka Kesakitan (Morbiditas)

Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu atau mengalami sakit. Berbagai upaya dilakukan penduduk untuk menjaga kesehatan, baik secara mandiri maupun oleh keluarganya yang masih sehat. Upaya menjaga kesehatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan berobat sendiri, berobat jalan, maupun rawat inap. Berobat sendiri merupakan upaya mengobati penyakit atas inisiatif sendiri, berdasarkan pengetahuan kesehatan yang dimilikinya secara mandiri.

Pada tabel berikut diketahui bahwa penduduk Kabupaten Karo yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir pada tahun 2014 sebesar 24,25%, tahun 2015 menurun menjadi 23,71% kemudian meningkat menjadi 27,75% dan 31,20 pada tahun 2016 dan 2017 sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 27,52%.

Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Persentase Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama
Sebulan Terakhir Kabupaten Karo Tahun 2014 – 2018

Tahun	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
2014	24,25
2015	23,71
2016	27,75
2017	31,2
2018	27,52

Sumber BPS, Kab. Karo

Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek)

Stunting merupakan bentuk lain dari kegagalan pertumbuhan anak, dimana keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek. Stunting disebabkan oleh banyak faktor, baik itu faktor dari dalam maupun dari luar. Balita pendek (stunting) dapat diketahui bila bayi sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasilnya berada dibawah normal.

Masalah balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin dan masa bayi/balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Oleh kerennanya upaya perbaikan harus meliputi upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung (intervensi gizi spesifik) yang umumnya dilakukan di sektor kesehatan, namun hanya berkontribusi 70% dan upaya mencegah serta mengurangi gangguan secara tidak langsung (intervensi gizi sensitif) berkontribusi 70% melibatkan berbagai sektor seperti ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, sosial dsb.

Upaya intervensi gizi spesifik untuk balita pendek difokuskan pada kelompok 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan anak umur 0-23 bulan, karena penanggulangan balita pendek yang paling efektif dilakukan pada 1.000 HPK. Periode HPK meliputi 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi yang dilahirkan telah dibuktikan secara ilmiah merupakan periode yang menentukan kualitas

kehidupan. Oleh karena itu periode ini ada yang menyebutnya sebagai "periode emas", "periode kritis", dan Bank Dunia (2006) menyebutnya sebagai "window of opportunity".

Adapun kondisi Balita Pendek/Stunting(TB/U) berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) mulai tahun 2014-2018 untuk Kabupaten Karo dengan kategori sangat pendek, pendek dan dengan tinggi badan normal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan per Umur (TB/U) menurut Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2014-2018

Tahun	Status Gizi Menurut TB/U			Jumlah Stunting (Sangat pendek dan Pendek)
	Sangat Pendek	Pendek	Normal	
	(%)	(%)	(%)	(%)
2014	16,6	26,7	56,7	43,3
2015	12	17	71	29,0
2016	11,2	17,1	71,6	28,3
2017	9,6	21,2	69,2	30,8
2018	8	21,6	70,4	29,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan persentase status gizi balita pendek (pendek dan sangat pendek) di Kabupaten Karo tahun 2018 adalah 29,6% jika dibandingkan tahun 2014 (43,3%), tahun 2017 (30,8%) menunjukkan adanya perbaikan, walaupun belum bisa menyamai capaian pada tahun 2015 (29,0%) dan 2016 (28,3%).

Indikator Rumah Sakit Daerah

Rumah sakit Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan promotif, preventif, curative dan rehabilitative dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat. Dalam hal meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit salah satunya dengan menilai indikator mutu pelayanan rumah sakit yang dijadikan standar atau tolak ukur dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat.

Realisasi Indikator kinerja Rumah Sakit Umum Kabanjahe tahun 2014-2018 dapat di lihat pada tabel berikut

Tabel 2.65
Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Kabanjahe
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Rata-rata kunjungan rawat jalan (orang/hari)	149,78	205,97	173,14	176,06	233,18
Rata-rata kunjungan rawat Inap (orang/hari)	13,89	12,25	13,28	10,59	13,47
Rata- rata Pasien yang dirujuk (hari)	0,54	0,58	0,60	0,63	0,62
Gross death rate (GDR) adalah jumlah angka kematian umum bagi setiap 1000 pasien keluar. Indikator ini memberikan gambaran angka kematian total penderita keluar (hidup+mati)	31	49	35	29	35
Net death rate (NDR) adalah jumlah angka kematian lebih dari > 48 jam setelah dirawat bagi setiap 1000 pasien keluar.	23	28	22	27	22
Averegelage of stay (LOS) adalah rata-rata lama perawatan seorang pasien. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas dan memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit	5 Hari	5 Hari	5 Hari	5 Hari	3 Hari
Bed of occupancy rate (BOR) adalah presentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemafaatan tempat tidur rumah sakit.	62%	61%	56%	52%	52%
Bed Turn Over (BTO) adalah frekwensi pemakaian tempat tidur	47X	41X	45X	36X	61X

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efektifitas pada pemakaian tempat tidur.					
Turn Over Interval (TOI) TOI adalah Interval penggunaan tempat tidur dari saat kosong hingga saat terpakai kembali. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efektifitas dari penggunaan tempat tidur	3 Hari	4 Hari	4 Hari	5 Hari	3 Hari

Sumber : Rumah Sakit Umum Kabanjahe, 2019

SPM Urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Urusan Kesehatan yang merupakan hak kesehatan yang diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun Capaian urusan kesehatan pada tabel 2.66 dan capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Karo pada tahun 2014-2018 dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta rata-rata capaian 76,82%.
2. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan rata-rata capaian 75,70%.
3. Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar rata-rata capaian 85,54%.
4. Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun rata-rata capaian 50,02%.
5. Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar rata-rata capaian 97,26%.

6. Jumlah penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun rata-rata capaian 0,18%.
7. Jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun rata-rata capaian 61,7%.
8. Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun rata-rata capaian 20,24%.
9. Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun rata-rata capaian 59,10%.
10. Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun rata-rata capaian 42,60%.
11. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun rata-rata capaian 37,39%.
12. Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun rata-rata capaian 23,44%.

Tabel 2.66
Capaian Urusan Kesehatan
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL						
	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100	83,7	74,2	77,1	73	76,1
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN						
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100	84,9	73,7	76	71,5	72,4
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR						

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)				
			2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100	97,2	79	83,5	80,3	87,5
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA						
	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	53,9	45,6	54,6	55	41
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR						
	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100	95,3	96	95,2	100	100
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF						
	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	0,17	0,18	0,18	0,19	0,21
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT						
	Jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	23,6	23,6	99,6	100	61,7
8	PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA HYPERTENSI						
	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	20,36	21,14	20,91	28,48	10,32
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MILITUS						
	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	56,6	57,3	59,5	60,2	61,91

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)				
			2014	2015	2016	2017	2018
	sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun						
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT						
	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	41	42	42	43	45
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB						
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	52,9	47,16	34	26,97	25,94
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV						
	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100	18,14	19,82	20,36	23,84	35,03

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dari sejumlah indikator mencerminkan hasil dari pengembangan kapasitas dan kualitas layanan infrastruktur seperti jalan/jembatan, irigasi dan keciptakaryaan dan Penataan Ruang. Mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi atau yang disebut Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

SPM Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang disebutkan SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya sebesar 70%;
2. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang sebesar 60%;
3. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota sebesar 100%;
4. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman sebesar 81,77%;
5. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai sebesar 60%;
6. Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun sebesar 50%;
7. Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan sebesar 60%;
8. Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) sebesar 60%;
9. Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap sebesar 100%;

Pekerjaan Umum

Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran transportasi darat, kelancaran lalu lintas penunjang perekonomian disuatu daerah. Kinerja pembangunan jaringan jalan dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, rusak sedang, rusak dan rusak berat.

Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Karo pada tahun 2018 adalah 62,06% atau meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya sekitar 45,32%.

Tabel 2.67
Kondisi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1. Pekerjaan Umum						
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	45,32%	48,33%	37,28%	61,06%	62,06%
2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,003184	0,003127	0,003072	0,003021	0,003143
3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	0	0	0	0	0
4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	69,2	71,36	71,38	73	73,08
5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	50	51	52	54	46,7
6.	Rasio jaringan irigasi	80	80	80	80	80
7.	Persentase penduduk berakses air minum	57,16	60,63	61,42	67,5	67,5
8.	Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk	2,56	2,7	2,61	2,56	2,81
9.	Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65	65,5	66	69	80
2. Penataan Ruang						
1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	20%	20%	20%	20%	20%
2.	Ketaatan terhadap RTRW	0	0	0	0	0
3.	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	0,12	0,10	0,11	0,10	0,10

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo, 2019

Dibanding dengan jumlah penduduk sekitar 409.675 jiwa pada tahun 2018, maka rasio ketersediaan jalan baru sekitar 0,003143. Untuk jalan Kabupaten pada tahun 2018, sebagian besar jalan berupa hotmix/aspal sepanjang 862,51 Km, telfrod/batu/krikil sepanjang 232,11 Km, dan tanah sepanjang 123,54 Km.

Selain jalan, indikator lain terkait urusan pekerjaan umum adalah proporsi rumah tangga bersanitasi yang baik dan pelayanan air minum, di Kabupaten karo untuk sanitasi, pada tahun 2018,

sebesar 73,08%, sedangkan untuk air minum hanya 67,5%. Meskipun meningkat dari tahun sebelumnya namun masih jauh dari target RPJMN sebesar 100%.

Selanjutnya, kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan dibanding tahun 2017, dimana tahun 2017 mencapai 50% sedangkan pada tahun 2018 hanya 46,70%. Sedangkan indikator lain yakni ketersediaan tempat ibadah mengalami kenaikan dari rasio 2,56 tahun 2017 menjadi 2,81 pada tahun 2018.

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk tahun 2014-2018 dapat dilihat berikut ini.

Tabel 2.68
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	75,53	80,55	62,13	101,77	103,43
2.	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	100	100	100	100	100
3.	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	115,33	118,93	118,97	121,67	121,80
4.	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	71,43	72,86	74,29	77,14	66,71
5.	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	69,90	74,15	75,11	82,55	82,55
6.	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	60	70	74	76	80
7.	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	20	16,67	18,33	16,67	16,67
8.	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	20%	20%	20%	20%	20%
9.	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target capaian SPM bidang Pekerjaan Umum ada yang sudah tercapai tetapi ada juga yang masih 0% pencapaiannya. Kondisi jalan baik contohnya, realisasi terus meningkat sejak tahun 2014, bahkan pada tahun 2018 sudah mencapai 104,43%. Akan tetapi untuk jasa konstruksi belum ada realisasi hingga tahun 2018.

Penataan Ruang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang disebutkan SPM bidang Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 100%;
2. Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sebesar 50%.

Di Kabupaten Karo, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau tidak mengalami perubahan sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 yang baru mencapai 20%. Sedangkan untuk ketaatan terhadap RTRW belum bisa dinilai karena RTRW Kabupaten Karo belum diperdakan.

Capaian SPM urusan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69
Capaian SPM Bidang Penataan Ruang
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	0	0	0	0	0
2.	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	200	200	200	200	200

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo, 2019

Dari tabel di atas bahwa capaian SPM urusan penataan ruang khususnya Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital masih)% karena RTRW Kabupaten Karo belum ditetapkan. Sedangkan untuk luas rth sudah melebihi target SPM yakni 10% Luas RTH dari luas perkotaan.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tertuang dalam SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang disebutkan SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 10%;

Luas permukiman kumuh di wilayah perkotaan di Kabupaten Karo pada Tahun 2012 adalah seluas 133,06 ha dan menurun menjadi 110 ha pada tahun 2016, bahkan pada tahun 2018 hanya tertinggal 21,47 ha. Selanjutnya, terkait perumahan, indikator penting lainnya adalah rasio rumah layak dan rasio permukiman layak huni. Untuk rasio rumah layak, pada tahun 2018 sebesar 0,22, mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 yang hanya sebesar 0,19.

Untuk cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan dari 21% pada tahun 2014 menjadi 94,054 pada tahun 2018. Sedangkan untuk persentase luasan permukiman kumuh, pada tahun 2018 sebesar 58%.

Selanjutnya, untuk capaian SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 menurun hingga hanya 93,80%.

Tabel 2.70
Capaian Indikator Pembangunan
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio rumah layak huni (rasio)	0,19	0,200	0,203	0,228	0,223
2	Rasio permukiman layak huni (rasio)	0,5	0,51	0,514	0,951	0,989
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	21,00	23,00	24,00	94,402	94,054
4	Persentase pemukiman yang tertata (%)	47,00	49,00	51,00	95,1	98,9
5	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	17,00	19,00	21,00	24,922	58,00
6.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	43,03	45,22	48,19	49,22	61,81

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019

Capaian SPM

Untuk capaian SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 menurun hingga hanya 93,80%. Capaian SPM urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	97,03	97,55	98,02	98,44	93,80

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019

d. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dilihat pada tabel 2.72 di bawah ini.

Tabel 2.72
Capaian Indikator Pembangunan Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/orang	27	27	27	27	27	27
2	Persentase Penegakan PERDA	59,87%	58,68%	61,85%	62,43%	66,66%	66,66%
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,65%	0,65%
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%

Sumber : Badan Kesbang dan Linmas Kab. Karo, 2019
Satpol PP Kab. Karo, 2019

d. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar, yang menjadi sasaran pembangunan di bidang sosial. Adapun capaian pembangunan PMKS dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.73
Persentase Panti Sosial Yang Menerima KUBE Atau Kelompok Sosial
Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun peserta program KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun seharusnya menjadi peserta program KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis
2014	350	800
2015	-	-
2016	60	-
2017	40	-
2018	0	0

Sumber : Dinas Sosial Kab.Karo, 2019

Dari tabel di atas, kondisi PMKS yang diberdayakan melalui KUBE tahun 2014-2018 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun 2014 Kabupaten Karo mendapat bantuan dari pusat, untuk tahun selanjutnya kegiatan dimaksud dibiayai anggaran daerah yang terbatas anggarannya.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Karo yang mendapatkan bantuan diuraikan sebagai berikut :

1. Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial tahun 2014, 2015 dan 2017 sebesar 0%, tahun 2016 sebesar 3,6% dan 2018 meningkat menjadi 86,39%.
2. Lansia tidak potensial tahun 2014 -2017 sebesar 0,14% sedangkan 2018 meningkat menjadi 1,15%.
3. Penyandang Disabilitas tahun 2014 -2017 sebesar 0,51% sedangkan 2018 meningkat menjadi 1,43%.
4. Keluarga tidak mampu 2014-2016 sebesar 0% sedangkan tahun 2017 sebesar 67,21% dan tahun 2018 meningkat menjadi 67,30%.

Kurangnya keakuratan data selama ini merupakan salah satu permasalahan dalam pemberian bantuan kepada PMKS. Data selengkapnya mengenai persentase PMKS yang tertangani disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Persentase PMKS Yang Tertangani
Kabupaten Karo 2014-2018

Jenis PMKS	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial (%)	0	0	3,6	0	86,39
Lansia tidak potensial (%)	0,14	0,14	0,14	0,14	1,15
Penyandang Disabilitas (%)	0,51	0,51	0,51	0,51	1,43
Keluarga tidak mampu (%)	0	0	0	67,21	67,30

Sumber: Dinas Sosial Kab. Karo, 2019

Capaian SPM Urusan Sosial.

Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar Urusan Sosial yang merupakan hak sosial yang diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial yang belum mencapai target 100% yaitu rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti masih mencapai 1,43% dan rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti capaian sebesar 1,15%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Capaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Sosial
Kabupaten Karo Tahun 2018

No.	Indikator	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	976	14	1,43
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	1	1	100
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	17.079	197	1,15
4	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	40	40	100
	Bantuan Jaminan Hidup (JADUP)	7.690	7.690	100
	Bantuan Hunian Tetap (HUNTAP)	2.168	2.168	100

Sumber: Dinas Sosial Kab. Karo, 2019

Tabel 2.76
Korban Bencana Penerima Bantuan Sosial Masa Tanggap Darurat dan
Korban Bencana Yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Prasarana
Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Korban Bencana yang Penerima Bantuan Sosial Masa Tanggap Darurat		Korban Bencana yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa
2014	2197	6686	1914	7392
2015	2309	6996	3030	10184
2016	1987	6163	0	0
2017	3065	13418	0	0
2018	2228	2228	0	0

Sumber: Data Olahan BPBD Kabupaten Karo, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Kepala Keluarga yang menerima bantuan sosial ada setiap tahun mulai tahun 2014 hingga 2018 akibat letusan Gunung Api Sinabung. Jumlah penerima fluktuatif, paling tinggi pada tahun 2017 sebanyak 3065 KK dan paling sedikit pada tahun 2016 sebanyak 1987 KK. Selanjutnya untuk korban bencana yang dievakuasi terbagi menjadi relokasi tahap I, relokasi Mandiri dan relokasi tahap III, dimana jumlah yang sudah di relokasi sebanyak 4.944 KK dan diharapkan akan rampung pada tahun 2020 ini.

Ketersediaan panti asuhan mulai tahun 2014-2018 di Kabupaten Karo sebanyak 7 unit, melihat potensi PMKS yang berkembang ketersediaan panti yang dibutuhkan sebanyak 8 unit.

Tabel 2.77
Jumlah Panti Sosial yang Menyediakan
Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos
2014	5	8
2015	5	8
2016	5	8
2017	6	8
2018	7	8

Sumber : Dinas Sosial Kab.Karo, 2019

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a. Tenaga Kerja

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kabupaten Karo tergolong kecil yaitu sebesar 1,78% dari 56 perusahaan yang terdaftar, kasus sengketa pengusaha hanya sebanyak 1 perusahaan pada tahun 2018, sedangkan besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama mencapai 100% artinya semua kasus dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama.

Pencari kerja yang ditempatkan merupakan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan. Jika dilihat dari data diatas maka besaran pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2018 (73,07%) mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 (62,13%).

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan tenaga kerja adalah besaran pekerja/buruh yang

menjadi peserta program Jamsostek (kepesertaan BPJS ketenagakerjaan). Capaian besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek di Kabupaten Karo pada tahun 2018 sebesar 45,02% menurun dari tahun 2017 yaitu 46,69% untuk meningkatkan capaian ini tetap dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan di Kabupaten Karo. Indikator pembangunan daerah terkait tenaga kerja di Kabupaten Karo dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.78
Indikator Pembangunan Tenaga Kerja
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2017	2018
1	Angka Sengketa Pengusaha-pekerja per tahun		1,78%
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100%	100%
3.	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang di tempatkan	62,13%	73,07%
4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	46,69%	45,02%
5.	Besaran Pemeriksa Perusahaan	51,11%	80,35%
6.	Yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		44,4%
7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	65,52%	41,66%
8.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	29,57%	12,46%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, UMKM dan Koperasi, 2019

Data besaran pemeriksa perusahaan merupakan persentase jumlah perusahaan yang telah diperiksa dibanding jumlah perusahaan yang terdaftar, pada tahun 2018 besaran pemeriksa perusahaan sebesar 80,35%, meningkat dari tahun 2017 yaitu sebesar 51,11%.

Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Karo masih sebesar 44,40% dari tenaga kerja yang terdaftar sehingga perlu untuk terus ditingkatkan pelatihan dilakukan melalui Balai Latihan Kerja. Untuk besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan adalah tenaga kerja yang tidak mendapatkan sertifikat kompetensi, pada tahun 2018 sebesar 41,66% menurun dari tahun 2017 yaitu sebesar 65,52%, selanjutnya rasio lulusan merupakan jumlah

lulusan s1/s2/s3 dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio lulusan s1/s2/s3 pada tahun 2018 sebesar 12,46% menurun dari tahun 2017 yaitu sebesar 29,57%.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator pembangunan daerah terkait pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karo antara lain: indikator partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2014 sebanyak 4.434 orang, paling tinggi ditahun 2015 sebanyak 4.758 orang pada tahun 2016 menurun menjadi 4.332 orang tahun 2017 kembali menurun menjadi 4.046 dan tahun 2018 menjadi 4.053.

Tabel 2.79
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah
2014	4.434 orang
2015	4.758 orang
2016	4.332 orang
2017	4.046 orang
2018	4.053 orang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo, 2019

Untuk melihat partisipasi perempuan dalam politik, dapat dilihat pada indikator proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR dari tahun 2014-2018 belum mencapai 30% tetapi mulai tahun 2015 sudah mencapai 20%.

Tabel 2.80
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan DPRD
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan	Jumlah Total Kursi Keanggotaan DPRD	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR (%)
2014	4	35	11,43
2015	7	35	20,00
2016	7	35	20,00
2017	7	35	20,00
2018	7	35	20,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2019

Indikator untuk perlindungan anak dan perempuan dapat dilihat melalui rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Tahun 2014-2018 KDRT paling tinggi pada tahun 2014 sebesar 0,018 dengan jumlah KDRT sebanyak 19 kasus, pada tahun 2018 menjadi 0,004% dengan KDRT sebanyak 5 kasus.

Tabel 2.81
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga
2014	19	103.503	0,018
2015	8	104.955	0,008
2016	8	106.842	0,007
2017	9	106.842	0,008
2018	5	120.966	0,004

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Karo, 2019

Adapun indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu masih dalam kategori rendah pada tahun 2014-2016 karena capaian dibawah 60%. Akan tetapi pada tahun 2017-2018 sudah mencapai 100%. Informasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.82
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan Terpadu	Jumlah Laporan/Pengaduan yang Masuk ke Unit Pelayanan Terpadu	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)
2014	65	109	59,63
2015	66	117	56,41
2016	66	117	56,41
2017	59	59	100,00
2018	36	36	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Karo, 2019

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum tahun 2014-2018 sudah mencapai 100%. Artinya setiap korban kekerasan sudah bisa mendapat layanan hukum. Informasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.83
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Korban Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Korban yang Membutuhkan Bantuan Hukum	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan (%)
2014	65	65	100
2015	66	66	100
2016	66	66	100
2017	59	59	100
2018	36	36	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2019

c. Pangan

Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Ketersediaan pangan merupakan sub sistem ketahanan yang cukup penting. Masyarakat Kabupaten Karo masih sangat tergantung pada beras sebagai bahan pangan utama. Untuk itu, diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk minimalisasi konsumsi beras juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga nutrisi yang diterima oleh tubuh dapat bervariasi dan seimbang. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang meningkat, perubahan iklim, dan kondisi geografis yang ekosistemnya tidak selalu sesuai untuk budidaya padi akan menimbulkan kerentanan dimasa yang akan datang.

Untuk capaian indikator pembangunan daerah urusan pangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 2.84. Tabel tersebut menunjukkan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Karo sejumlah 74,70% (tahun 2016), 85,70% (tahun 2017), dan sebesar 100% (tahun 2018).

Tabel 2.84
Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1.	Ketersediaan pangan utama (%)	74,70	85,70	100
2.	Ketersediaan energy dan Protein (kkal/kap/hari)	2014 energi, 77 protein	1976 energi, 77 protein	2404 energi, 68 protein
3.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan pangan	0	91,66%	91,66%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo, 2019

d. Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan Pembangunan Berkelanjutan. Setelah berakhirnya era *Millenium Development Goals (MDG's)*, dunia dihadapkan pada era pembangunan baru yaitu *Sustainable Development Goals (SDG's)*. Pembangunan dengan memperhatikan isu keseimbangan lingkungan, saat ini menjadi titik fokus dalam pembangunan global. Kualitas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program-program perencanaan pembangunan. Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah.

Capaian Indikator bidang lingkungan hidup di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.85
Capaian Indikator Lingkungan Hidup
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada				
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada				
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah/provinsi	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Tidak ada	ada	ada	ada	ada
5	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak ada	ada	ada	ada	Ada
6.	Persentase cakupan area pelayanan	65%	65%	65%	70,58 %	75,57 %
7.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	67,51	72,36	78,18	81,06	82,78
8.	Indeks Kualitas Air					100,00
9.	Indeks Kualitas Udara					96,08
10.	Indeks Kualitas Tutupan lahan					70,72

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, 2019

Salah satu masalah persampahan di Kabupaten Karo yaitu pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir yang layak belum tersedia. Keberadaan tempat pembuangan sampah akhir selain dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Pengelolaan sampah di Kabupaten Karo sampai tahun 2018 belum dapat dikatakan baik, mengingat volume sampah yang tertangani pada tahun 2018 masih 82,78% dengan kata lain masih ada 17,22% sampah yang belum ditangani sehingga hal ini masih perlu untuk tetap diperhatikan.

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kesadaran penduduk dalam melengkapi dokumen pribadi di Kabupaten Karo masih rendah, berdasarkan rasio bayi berakte Kelahiran 2014-2017 menunjukkan rasio meningkat setiap

tahunnya tetapi masih berada dibawah 50. Tercatat tahun 2014 sebesar 42,29 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 44,49 sedangkan tahun 2018 sudah mencapai 50 dengan angka 51,09. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.86
Rasio Bayi Berakte Kelahiran
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah bayi berakte kelahiran	Jumlah bayi	Rasio Bayi Berakte Kelahiran
2014	2.856	6.753	42,29
2015	3.041	6.841	44,45
2016	3.286	6.969	47,15
2017	2.930	6.586	44,49
2018	3.391	6.637	51,09

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2019

Jumlah Tahun 2014 menunjukkan capaian sebesar 9,22 dan tahun 2018 meningkat menjadi 15,64 atau capaian setiap tahunnya masih di bawah 20. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.87
Rasio Pasangan Berakte Nikah
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah	Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah	Rasio Pasangan Berakte Nikah
2014	6.754	73.243	9,22
2015	8.765	75.669	11,58
2016	10.542	90.289	11,68
2017	28.919	178.801	16,10
2018	39.159	250.535	15,64

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2019

Untuk penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Karo tahun 2014-2018 sudah dilakukan setiap tahunnya dan cakupan penerbitan KTP setiap tahunnya capaiannya sudah tinggi, pada tahun 2014 sebesar 90 dan tahun 2018 sebesar 96,74 dan tahun 2018 mencapai 96,74.

Data selengkapnya terkait Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.88
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Sudah/Belum
2014	Sudah
2015	Sudah
2016	Sudah
2017	Sudah
2018	Sudah

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Karo, 2019

Tabel 2.89
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah KTP ber-NIK	Jumlah penduduk wajib KTP	Cakupan penerbitan KTP
2014	267.724	297.472	90,00
2015	245.677	272.975	90,00
2016	241.092	267.880	90,00
2017	262.530	288163	91,10
2018	289.219	298.956	96,74

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2019

Cakupan penerbitan akta kelahiran cenderung meningkat setiap tahunnya antara tahun 2014-2018, pada tahun 2014 sebesar 45,55 dan tahun 2018 sebesar 52,10. Informasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.90
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Lahir Memperoleh Akta Kelahiran	Jumlah Kelahiran	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
2014	3.076	6.753	45,55
2015	3.123	6.841	45,65
2016	3.286	6.969	47,15
2017	3.449	6.586	52,37
2018	3.458	6.637	52,10

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2019

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian indikator pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Karo Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel 2.91 di bawah ini.

Tabel 2.91
Capaian Indikator Pembangunan Daerah
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	40	45	45	50	50
2.	Jumlah PKK aktif	78	125	125	287	287
3.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	20	30	30	40	40

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karo, 2019
Badan Kesbang dan Linmas Kab. Karo, 2019

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TFR merupakan salah satu indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 perempuan yang hidup hingga akhir masa reproduksinya (BKKBN, 2006).

Di Kabupaten Karo data yang tersedia yakni TFR tahun 2010 sebesar 3.02 dan tahun 2015 sebesar 2,73. Artinya pada tahun 2010 setiap wanita di Kabupaten Karo memiliki anak kurang lebih 3 orang anak dan tahun 2015 memiliki 2-3 orang anak.

Program yang dilakukan dalam pemerintah dalam mendukung program keluarga berencana yaitu salah satunya melalui kampung KB yang dilaksanakan mulai tahun 2016. Pelaksanaan program kampung KB bertujuan meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, peran pemerintah, lembaga non pemerintah serta swasta dalam melaksanakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Untuk mensukseskan pengendalian penduduk dilakukan kerjasama pendidikan kependudukan. Pada tahun 2014 dilaksanakan 5 kerjasama, tahun 2015 sebanyak 9 kerjasama, tahun 2016 sebanyak 9 kerjasama dan tahun 2017 sebanyak 11 kerjasama sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 20 kerjasama. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92
Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan
Formal, Non Formal dan Informal
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan
2014	5
2015	9
2016	9
2017	11
2018	20

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Karo, 2019

Untuk rasio akseptor KB yaitu untuk melihat usia pasangan subur menggunakan salah satu cara atau kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, di Kabupaten Karo rasio akseptor KB hampir setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2014 rasio akseptor KB sebesar 79,51%, tahun 2015 menurun menjadi 75,71% dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 77,09% kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 78,92 sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 73,75%. Data selengkapnya terkait Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.93
Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	PUS	Jumlah Akseptor KB	Rasio Akseptor KB (%)
2014	61.963	49.264	79,51
2015	61.178	46.316	75,71
2016	63.905	49.264	77,09
2017	66.175	52.230	78,92
2018	73.320	54.080	73,75

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2019

Untuk pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, pada tahun 2014 sebesar 70,00%, pada tahun

2017 mencapai 78,92 sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 72,39%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.94
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Perempuan Menikah Usia 15-49
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Peserta KB Aktif	Jumlah Pasangan Usia Subur	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Perempuan Menikah Usia 15-49 (%)
2014	45.620	65.171	70,00
2015	46.699	67.091	69,61
2016	45.767	65.752	69,61
2017	52.230	66.175	78,92
2018	53.080	73.320	72,39

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2019

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) di Kabupaten Karo cukup tinggi berada diatas 10%, hal ini menjadi permasalahan salah satunya karena rendahnya rasio petugas KB dibanding wilayah yang harus dibina. Pada tahun 2014 *Unmet need* sebesar 10,8% sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 15,00%.

Data selengkapnya terkait Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*)
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi	Jumlah PUS	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (%)
2014	7.038	65.171	10,80
2015	6.992	67.091	10,42
2016	7.215	65.752	10,97
2017	6.897	66.175	10,42
2018	11.000	73.320	15,00

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2019

Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Karo juga masih rendah berada dibawah 50%. Tahun 2014 sudah mencapai 31,84% dan tahun 2018 hanya mencapai 22,61%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.96
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah akseptor KB pengguna MKJP	Jumlah akseptor KB	Persentase penggunaan MKJP (%)
2014	15.251	47.895	31,84
2015	16.589	52.953	31,33
2016	21.796	49.322	44,19
2017	16.053	52.230	30,19
2018	12.003	53.080	22,61

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2019

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Karo menunjukkan angka yang masih rendah dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2014 sudah mencapai angka 36,07% sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 36,25%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.97
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Jumlah akseptor KB	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
2013	18.297	40.526	45,15
2014	17.276	47.895	36,07
2015	14.158	52.953	26,74
2016	16.430	49.322	33,31
2017	13.945	52.230	26,69
2018	19.240	38.080	36,25

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2019

PKB/PLKB sangat menentukan keberhasilan dalam pengendalian penduduk. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah dbidang pengendalian penduduk di Kabupaten Karo tahun 2014-2018 menunjukkan angka 100% setiap tahunnya.

Tabel 2.98

Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Kabupaten Karo 2014-2018

Tahun	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	Jumlah PKB dan PLKB	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB bidang pengendalian penduduk
2014	29	29	100
2015	27	27	100
2016	27	27	100
2017	8	8	100
2018	7	7	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2019

Petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa kelurahan disediakan disetiap desa dan kelurahan dengan jumlah 259 orang atau dengan rasio 100% setiap tahunnya.

Tabel 2.99

Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa Kelurahan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah petugas pembantu Pembina KB desa (PPKBD)	Jumlah Desa/kelurahan	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setia Desa Kelurahan
2014	259	259	100
2015	259	259	100
2016	269	269	100
2017	269	269	100
2018	269	269	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2019

h. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian indikator pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Karo Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel 2.100 di bawah ini.

Tabel 2.100

Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	40	45	45	50	50
2.	Jumlah LSM Aktif	2	2	2	2	2
3.	Jumlah PKK aktif	78	125	125	283	283
4.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	20	30	30	30	30

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karo, 2019
Badan Kesbang dan Linmas Kab. Karo, 2019

i. Perhubungan

Indikator pembangunan untuk urusan perhubungan ini, dapat dilihat pada tabel 2.101 di bawah ini.

Tabel 2.101
Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	4.938.570	4.938.570	3.411.274	3.675.672	3.696.720
2.	Rasio ijin trayek per jumlah penduduk	0,000086	0,000086	0,000086	0,000010	0,000010
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	5.509	5.477	5.015	5284	4272
4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1
5.	Persentase layanan angkutan darat	100	100	100	100	100
6.	Pemasangan rambu-rambu	2,71	2,71	9,33	37,50	51,0661
7.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,038444	0,039728	0,04329	0,037099	0,03622

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang di wilayah Kabupaten Karo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 sebesar 4.938.570 menurun menjadi 3.411.274 pada 2016 dan meningkat menjadi menjadi 3.696.720 pada tahun 2018. Akan tetapi terkait jumlah uji KIR cenderung mengalami penurunan dari 5.509 tahun 2014 menjadi hanya 4.274 pada tahun 2018. Selanjutnya, persentasi jumlah terminal bus masih tetap 1 hingga tahun 2018. Selengkapannya terkait indikator bidang perhubungan dapat dilihat pada tabel di atas.

j. Komunikasi dan Informatika

Capaian indikator urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.102
Capaian Indikator pembangunan Daerah
Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah jaringan komunikasi	7	8	8	8	8
2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.005	0.004349	0.004349	0.004349	0,00024
3.	Jumlah surat kabar nasional/local	1/30	1/30	1/30	1/31	1/31
4.	Jumlah penyiaran radio/TV local	7	7	7	7	7
5.	Web site milik pemerintah daerah	4	4	4	4	4
6.	Rasio penduduk yang menggunakan Handphone/HP	80%	87%	87%	87%	89%
7.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (unit)	4	6	6	6	6
8.	Cakupan layanan telekomunikasi	92,19%	92,19%	92,19%	92,19%	92,19%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kab, Karo, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terkait urusan komunikasi dan informatika, indikator jumlah jaringan komunikasi, ketersediaan internet, jumlah surat kabar, jumlah penyiaran radio/TV Lokal, jumlah website pemerintah, cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dan cakupan layanan telekomunikasi cenderung sama dengan tahun-tahun berikutnya.

k. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Indikator koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Karo mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkan baik

jumlah maupun persentasi koperasi yang aktif. Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, penurunan kemiskinan, dan perluasan lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Pada tahun 2018, jumlah koperasi sebanyak 436 koperasi dengan jumlah anggota sebanyak 56.008 orang, namun persentasi koperasi aktif hanya sebanyak 65,89%, angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 34,11% koperasi yang tidak aktif sehingga masih perlu peningkatan lebih lanjut.

Demikian halnya dengan UKM, Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Jumlah UKM menunjukkan sedikit penurunan di tahun 2018 dibanding tahun 2017 sehingga perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk menciptakan wirausaha baru melalui berbagai progam dan kegiatan yang inovatif dan kreatif, dapat dilihat pada tabel 2.103.

Tabel 2.103
Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentasi koperasi aktif (%)	55,6	56,8	57,86	58,8	65,89
2.	Persentase UKM non BPR/LKM UKM	1,09	1,08	1,07	0,42	0,06
3.	Persentase BPR/LKM	100	100	100	100	100
4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,28	98,30	98,21	98,22	98,11

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Karo, 2019

1. Penanaman Modal

Perkembangan jumlah investor pada tahun 2014 sampai dengan 2018 sebanyak 56 menjadi 64 investor yang terdiri dari 40 PMDN

dan 24 PMA. Perkembangan investor PMDN dan PMA dari data terlihat bahwa perkembangan jumlah investor PMDN mulai dari tahun 2014-2018 bertambah dan PMA juga mengalami peningkatan dari 22 menjadi 24, hal tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan, perkembangan jumlah investor dan nilai investasi dapat dilihat seperti pada tabel 2.104 dan 2.105. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMA dan PMDN juga meningkat sesuai dengan penambahan jumlah PMA dan juga jumlah PMDN bertambah, ini dapat dilihat pada tabel 2.106.

Tabel 2.104
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Karo
Tahun 2014 - 2018

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2014	Jumlah Investor	34	22	56
2015	Jumlah Investor	34	27	61
2016	Jumlah Investor	34	27	61
2017	Jumlah Investor	38	24	62
2018	Jumlah Investor	40	24	64

Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara, 2019

Tabel 2.105
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo
Tahun 2014 - 2018

Tahun	Uraian	PMDN (Rp)	PMA (US\$)
2014	Nilai Investasi	508.259,0	3.040.340
2015	Nilai Investasi	266.561,0	5.397.220
2016	Nilai Investasi	514.466,2	2.856.128
2017	Nilai Investasi	589.920,5	3.780.418
2018	Nilai Investasi	605.179,5	5.306.862

Tabel 2.106
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karo
Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	5.931	6.126	6.126	6.169	6.093
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	56	61	61	62	64
3	Rasio daya serap tenaga kerja	105,91	100,42	100,43	99,50	95,20

Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara, 2019

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan dan fasilitasi organisasi pemuda. Periode tahun 2014-2018 Persentase organisasi pemuda yang aktif setiap tahunnya mencapai 100%.

Tabel 2.107
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Organisasi Pemuda Aktif	Jumlah Organisasi Pemuda	Persentase Pemuda Aktif
2014	31	31	100
2015	32	32	100
2016	32	32	100
2017	32	32	100
2018	32	32	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2019

Peningkatan minat serta kualitas olahraga melalui pembinaan olahraga terhadap cabang olahraga yang terdaftar dengan cakupan sebesar 100% setiap tahunnya. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.108
Cakupan Pembinaan Olahraga
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina	Jumlah Seluruh Cabang Olahraga Terdaftar	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)
2014	6	6	100
2015	7	7	100
2016	7	7	100
2017	7	7	100
2018	7	7	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2019

Dengan adanya pembinaan dan fasilitasi minat dan bakat atlet olahraga, Kabupaten Karo memperoleh beberapa kejuaraan baik tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2014 atlet berprestasi yang memperoleh kejuaraan sebanyak 270 kejuaraan, tahun 2015 sebanyak 189 kejuaraan, 2016 sebanyak 215 kejuaraan dan 2017 sebanyak 223 kejuaraan sedangkan tahun 2018 sebanyak 253, artinya jika dilihat tren lima tahun cenderung meningkat.

Data selengkapnya terkait Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Karo 2014-2018, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.109
Jumlah Atlet Berprestasi
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Atlet Juara Tingkat Nasional dan Internasional
2014	270
2015	189
2016	221
2017	215
2018	253

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2019

Kabupaten Karo memiliki prestasi baik tingkat propinsi, nasional dan internasional, prestasi didapat dari even keolahragaan diikuti oleh cabang olahraga tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.110
Prestasi Cabang Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2017

Tahun 2017								
No.	Cabang Olahraga	Medali Tingkat provinsi			Medali Tingkat Nasional			Medali Tingkat Internasional
		Emas	Perak	Perunggu	Emas	perak	Perunggu	
1.	Atletik	8	4	4	2	3	-	1 emas & 2 perunggu
2.	Basket	-	-	1	-	-	-	-
3.	Catur	1	2	3				
4.	Gulat	15	2	15	-	-	2	
5.	Karate	11	21	10	8	5	6	
6.	Pencak Silat	7	7	11	-	1	2	
7.	Taekwondo	28	12	8	-	-	1	
8.	Wushu	-	-	-	3	1	1	
	Jumlah	70	48	52	13	10	12	1 emas & 2 perunggu

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2019

Kabupaten Karo memiliki prestasi baik tingkat propinsi, nasional dan internasional, prestasi didapat dari even keolahragaan diikuti oleh cabang olahraga tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.111

Prestasi Cabang Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2018

Tahun 2018								
No.	Cabang Olahraga	Medali Tingkat provinsi			Medali Tingkat Nasional			Medali Tingkat Internasional
		Emas	Perak	Perunggu	Emas	perak	Perunggu	
1.	Atletik	10	8	7	1	-	1	
2.	Catur	2	1	1	-	1	1	
3.	Gulat	31	6	26	-	-	5	
4.	Pencak Silat	8	7	19	-	-	1	
5.	Taekwondo	15	7	18	2	-	1	
6.	Wushu	12	3	3	4	5	3	
7.	Jodo	-	3	-	-	1	1	
8.	Petanque	2	-	-	-	-	-	
9.	National Paralympic Commite (NPOC)	-	-	-	5	3	-	
	Jumlah	80	35	75	12	10	12	-

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2019

Berdasarkan data diatas pada periode tahun 2017-2018, prestasi olahraga tingkat provinsi pada tahun 2017 medali emas diraih sebanyak 70 buah, perak 48 buah dan perunggu 52 buah. Tingkat nasional medali emas diraih sebanyak 13 buah, perak 10 buah, dan perunggu sebanyak 12 buah serta pada tingkat internasional berhasil meraih 1 emas dan 2 perunggu.

Pada tahun 2018, prestasi olahraga tingkat provinsi medali emas diraih sebanyak 80 buah, perak 35 buah dan perunggu 75 buah. Tingkat nasional medali emas diraih sebanyak 12 buah, perak 10 buah, dan perunggu sebanyak 12 buah sedangkan pada tingkat internasional belum berhasil meraih medali.

Cakupan Pelatih Bersertifikat

Cakupan pelatih olahraga yang bersertifikat di Kabupaten Karo Tahun 2017 sebanyak 29 orang atau 100% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 31 orang atau 100%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.112
Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat
Kabupaten Karo Tahun 2017-2018

Tahun	Jumlah Pelatih	Jumlah Pelatih Bersertifikat
2017	29 orang	29 orang
2018	31 orang	31 orang

n. Statistik

Kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel (daftar) dan atau diagram yang dapat memberikan informasi kepada pembacanya. Informasi statistik Kabupaten Karo khususnya buku Karo Dalam Angka dan PDRB setiap tahunnya rutin dicetak seperti tergambar pada tabel 2.113 di bawah ini.

Tabel 2.113
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Statistik
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	tidak	tidak	tidak	tidak	Tidak
2.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS, Kabupaten Karo 2019

o. Kebudayaan

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia

sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Indikator pembangunan daerah untuk urusan kebudayaan dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dan budaya ditahun 2014 sebanyak 4 kali dan meningkat ditahun 2015 dan 2016 dan turun kembali di tahun 2017 dan 2018. Penyelenggaraan festival seni dan budaya tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak swasta. Penyelenggaraan festival seni dan budaya harus tetap ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun melibatkan oleh pihak. Indikator Pembangunan daerah urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel 2.114 berikut ini.

Tabel 2.114
Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	5	7	9	7	6
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karo, 2019

p. Perpustakaan

Secara umum perpustakaan berfungsi sebagai Sumber informasi, Sarana pendidikan dan pembelajaran, Penelitian, Pengabdian masyarakat, dan Rekreasi. Untuk itu peran dan fungsi perpustakaan menentukan berkembangnya ilmu pengetahuan masyarakat. Beberapa indikator perpustakaan antara lain rasio perpustakaan persatuan penduduk menunjukkan kapasitas perpustakaan untuk memfasilitasi kebutuhan membaca masyarakat. Di Kabupaten Karo tahun 2014-2018 jumlah perpustakaan cenderung meningkat, pada tahun 2014 hanya sekitar 58 unit sedangkan pada tahun 2018 bertambah menjadi 484 unit karena mulai tahun 2017 sudah ada pembangunan perpustakaan di desa-desa.

Data rasio perpustakaan persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk
Kabupaten Karo 2014-2018

Tahun	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Penduduk	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk
2014	58	382.622	0,152
2015	58	389.591	0,149
2016	58	396.579	0,146
2017	484	389.591	1,215
2018	484	405.162	1,194

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2018

Untuk melihat minat masyarakat dalam berliteralisasi dapat dilihat dari jumlah kunjungan ke perpustakaan umum daerah, dari tahun 2014-2018 jumlah pengunjung meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2014 jumlah pengunjung hanya 5.891 orang pada tahun 2018 meningkat menjadi 38.928 orang, data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.116
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Kabupaten Karo 2014-2018

Tahun	Jumlah kunjungan perpustakaan	Jumlah populasi yang harus dilayani	Persentase Jumlah Kunjungan Terhadap Populasi yang Harus Dilayani
2014	5.891	70.890	8,31
2015	11.371	72.246	15,74
2016	11.452	73.479	15,59
2017	19.025	74.704	25,46
2018	38.928	75.950	51,25

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2019

Koleksi buku yang disediakan diperpustakaan daerah menjadi program prioritas dengan menambah koleksi judul buku, pada tahun 2014 jumlah koleksi judul buku 5.906 judul dan jumlah koleksi buku 17.326, tahun 2018 meningkat menjadi 3.057 judul

koleksi dan 17.677 jumlah koleksi buku. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.117
Koleksi Buku Perpustakaan Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia
2014	5.906	17.326
2015	5.506	10.446
2016	5.908	12.358
2017	2.884	15.082
2018	3.057	17.677

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2019

Meningkatnya pengelolaan perpustakaan harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya pustakawan. Tahun 2014-2018 dengan jumlah pustakawan yang meningkat setiap tahun, jumlah pustakawan/tenaga teknis/penilai yang memiliki sertifikat meningkat juga setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah pustakawan/tenaga teknis/penilai yang memiliki sertifikat 12 orang dari jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai sebanyak 420 dan pada tahun 2018 menjadi 17 jumlah pustakawan/tenaga teknis/penilai yang memiliki sertifikat dan 508 jumlah pustakawan. Jumlah pustakawan/tenaga teknis/penilai yang memiliki sertifikat masih sangat minim masih perlu ditingkatkan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.118
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Memiliki Sertifikat
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai
2014	12	420
2015	12	420
2016	14	423
2017	14	484
2018	17	508

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2019

q. Kearsipan

Kearsipan adalah kumpulan dari pada surat menyurat yang terjadi oleh karena pekerjaan aksi transaksi, tindak tanduk, dokumenter yang disimpan, sehingga pada tiap-tiap saat dibutuhkan dapat dipersiapkan untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya.

Capaian indikator urusan kearsipan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 dapat dilihat dari persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku meningkat setiap tahunnya tahun 2014 sebanyak 29 perangkat daerah dan tahun 2018 meningkat menjadi 40 perangkat daerah. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.119
Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Karo 2014-2018

Tahun	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip	Jumlah perangkat daerah
2014	29	58
2015	29	58
2016	29	58
2017	30	60
2018	40	60

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2019

Peningkatan SDM pengelola kearsipan bagi perangkat daerah dilakukan hampir setiap tahunnya, pada tahun 2014 sebanyak 59 orang dengan 1 kali kegiatan melibatkan 58 perangkat daerah sedangkan tahun 2018 sebanyak 291 orang dengan 2 kali kegiatan dan melibatkan 60 perangkat daerah ditambah 259 desa di Kabupaten Karo.

Informasi selengkapnya terkait Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.120
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Jumlah perangkat daerah (PD)
2014	1 keg /59 orang	58 PD
2015	1 keg /59 orang	58 PD
2016	0	58 PD
2017	2 keg/329 orang	60 PD + 259 desa
2018	2 keg/291 orang	60 PD + 259 desa

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2019

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Pariwisata

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Karo mempunyai cukup banyak potensi dimana sebagian besar merupakan wisata alam. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pariwisata Kabupaten Karo tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 2.121
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata
Kabupaten Karo Tahun 2014- 2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tamu Domestik	324.670	370.412	435.587	552.430	524.238
2.	Tamu Asing	1.951	752	437	5.887	6.014
Jumlah		326.621	371.164	436.024	558.317	530.252
Target Kunjungan		326.621	371.164	550.000	750.000	850.000
Kunjungan Wisata (%)		100	100	79,27	74,44	62,38
PAD Sektor pariwisata (%)		73,31	81,67	94,15	101,47	98,35
Lama Kunjungan Wisata (Tamu Asing) (hari)		1,11	1,13	1,11	1,17	1,07
Lama Kunjungan Wisata (Tamu Domestik) (hari)		1,12	1,14	1,1	1,11	1,11

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

b. Pertanian

Sektor Pertanian merupakan bagian terpenting dalam perekonomian Kabupaten Karo. Peranan sektor ini terhadap PDRB Karo pada tahun 2018 sekitar 54,14 persen untuk harga berlaku. Potensi wilayah pada sektor pertanian di Kabupaten Karo sudah lama terkenal sebagai daerah pertanian khususnya sebagai salah satu penghasil hortikultura utama di Provinsi Sumatera Utara. Sebagian produksi hasil pertanian dari Kabupaten Karo dipasarkan juga ke Provinsi lainnya bahkan juga dipasarkan hingga keluar Negeri. Pembangunan sektor pertanian meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, bahan makanan, tanaman perkebunan dan peternakan beserta hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Karo terlihat pada tabel 2.122 di bawah ini.

Tabel 2.122
Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar(kw/Ha)x100%						
1.	Padi Sawah	51,28	59,40	56,56	59,11	59,07
2.	Padi Gogo	39,7	36,73	36,61	46,48	36,42
3.	Jagung	64,14	63,18	68,86	66,67	59,99
4.	Ubi Jalar	145,82	139,19	157,90	152,40	194,35
5.	Kontribusi Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	56,41	55,79	55,04	55,17	54,14
6.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	5,81	5,40	5,28	5,33	5,68
7.	Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok)	2.931	2.994	3.035	3.057	3.058

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2019

c. Kehutanan

Capaian indikator urusan Kehutanan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.123
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Kehutanan
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Luas Lahan Kritis (Ha)	12.272,390	12.272,390	12.272,390	12.272,390	12.272,390
2.	Luas Reboisasi (Ha)		184,0		50	5
3.	Luas Kawasan Hutan	103.282	103.282	103.282	103.282	103.282

Sumber : UPT KPH Wilayah XV Kabanjahe, BPS 2019

d. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada tahun 2017, jumlah pelanggan PLN ranting Kabanjahe, Berastagi dan Tigabinanga berjumlah 103.494 pelanggan, sedangkan tahun 2018 jumlah pelanggan meningkat sehingga berjumlah 122.241 pelanggan, persentase jumlah rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2018 sebanyak 99% artinya masih terdapat 1% rumah tangga belum dialiri oleh listrik, hal tersebut diakibatkan antara lain karena masih terdapat desa yang berada pada kawasan hutan. Untuk melihat persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dapat dilihat pada tabel 2.124.

Tabel 2.124
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kabupaten Karo Tahun 2014 - 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	97%	98,2%	98,9%	98,9%	99%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

e. Perdagangan

Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah regional

maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas.

Perdagangan di Kabupaten Karo diupayakan terus ditingkatkan untuk kesiapan dalam menghadapi persaingan perdagangan global. Perdagangan di Kabupaten Karo juga berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Capaian indikator urusan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.125
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perdagangan
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 (miliar Rp)

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ekspor (ADHK)	3.235,00	3.440,59	3.602,60	3.830,19	3.858,78
2.	Impor (ADHK)	3.018,47	3.121,33	3.193,52	3.317,15	3.449,27

Sumber: BPS Karo, 2019

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun 2014 sampai dengan 2017 cenderung meningkat, sedangkan untuk nilai ekspor bersih perdagangan tahun 2014-2018 berfluktuatif, pada tahun 2014 sebesar 3.235,00 miliar rupiah, meningkat menjadi 2.440,59 miliar rupiah (tahun 2015), menjadi 3.602,60 miliar rupiah (tahun 2016), meningkat menjadi sebesar 3.830,19 miliar rupiah (tahun 2017), menjadi 3.858,78 (tahun 2018). Untuk itu perlu perhatian dalam peningkatan lebih lanjut pada sektor perdagangan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

f. Perindustrian

Industri Kecil menengah (IKM) yang berkembang di Kabupaten Karo sebahagian besar merupakan industri rumah tangga. Adapun cabang industri atau sentra industri yang berkembang di Kabupaten Karo antara lain: kerajinan, bahan bangunan, pangan, dan logam. IKM di Kabupaten Karo perlu ditingkatkan sejalan dengan potensi Kabupaten Karo di bidang pertanian dan sebagai daerah tujuan wisata sehingga dalam rangka menunjang sektor pariwisata dan pertanian maka sektor industri perlu mendapat prioritas. Kontribusi

sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017.

Pada kategori industri pengolahan sendiri secara umum berkontribusi sebesar 3,63. Sejak tahun 2014-2018 kondisi sektor industri pengolahan terus mengalami peningkatan. Untuk melihat cakupan bina kelompok pengrajin dan kontribusi sektor industri dapat dilihat melalui tabel 2.126 berikut:

Tabel 2.126
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perindustrian
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	11,11	18,18	15,38	13,33	16,67
2.	Kontribusi sektor Industri pengolah terhadap PDRB (%)	3,26	3,39	3,37	3,54	3,63

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo, 2019

g. Kelautan dan Perikanan

Di sektor perikanan, dapat dilihat produksi perikanan Kabupaten Karo pada tahun 2014 sebesar 52,37%, kondisi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar 14,99% hal ini terjadi karena diakibatkan faktor lingkungan yang menyebabkan kematian massal ikan pada tahun tersebut dan tahun 2016 kembali meningkat menjadi 29,6% namun pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 1,06% hal ini disebabkan karena sesuai dengan amanat Perpres 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba adalah bahwa dimana danau di kawasan Kabupaten Karo harus zero KJA, pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan yaitu menjadi 1,08%.

Luas potensi perikanan budidaya di Kabupaten Karo seluas 449,24 Ha, sedangkan luas lahan budidaya yang sudah dikembangkan hanya 24,97 Ha penurunan luas lahan budidaya ini disebabkan oleh karena lahan budidaya yang sebelumnya digunakan untuk berbudidaya ikan tidak dapat lagi digunakan karena erupsi Gunung Sinabung, sehingga budidaya ikan hanya berfokus pada kecamatan-kecamatan yang tidak terdampak erupsi. Produksi

perikanan di Kabupaten Karo diharapkan akan terus meningkat hal ini dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam yang potensial untuk budidaya perikanan. Pemanfaatan tersebut antara lain didukung oleh ketersediaan irigasi yang memadai dan meningkatkan minat masyarakat. Capaian indikator urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.127
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Produksi perikanan (%)	52,37	14,99	29,6	1,06	1,08
2.	Data Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	9,80	10,24	11,94	12,73	18,06

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Karo, 2019

2.3.4. Fokus Urusan Penunjang

a. Perencanaan Pembangunan

Urusan penunjang terkait dokumen RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Karo, untuk lima tahun terakhir dari tahun 2014-2018 belum dapat disediakan, seperti dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.128
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Tidak	Ada	Ada
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
5.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	75	85	86	81,70	86,67
6.	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%)	73	81	87	90,20	92,87
7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Belum bisa dihitung				

Sumber: Bappeda Kabupaten Karo, 2019

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025

b. Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keuangan daerah merupakan komponen yang paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk melihat beberapa capaian indikator untuk urusan keuangan dapat disajikan sebagai pada tabel berikut:

Tabel 2.129 Capaian Indikator Urusan Keuangan
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	SILPA (ribu)	192.972.148	336.246.488	249.825.108	182.204.341	350.172.679
2.	Perbandingan Belanja Langsung dengan belanja APBD	37%	43%	41%	48%	44%
3.	Perbandingan Belanja Tidak Langsung dengan belanja APBD	63%	57%	59%	52%	56%
4.	Persentase Belanja Pendidikan	45%	34%	38%	33%	29%
5.	Persentase Belanja Kesehatan	11%	10%	5%	6%	8%
6.	Persentase program yang tidak terlaksana		2%	2%	3%	
7.	Penetapan APBD	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
8.	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	DISCLAIMER	WDP

Sumber : BPKPAD, 2019 (diolah)

c. Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

Indikator pencapaian kinerja urusan kepegawaian salah satunya dapat dilihat dari persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Tahun 2014-2015 dengan total jabatan sebanyak 870, jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2014 sebanyak 3 orang dan tahun 2015 sebanyak 2 orang sedangkan tahun 2016-2018 tidak ada pendidikan dan pelatihan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.130
Persentase ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah ASN Mengikuti Diklat Struktural	Jumlah Total Jabatan	Persentase ASN Mengikuti Diklat Struktural
2014	3	870	0,34
2015	2	870	0,23
2016	0	870	0,00
2017	0	837	0
2018	0	837	0

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo, 2019

Persentase Pelanggaran ASN

Indikator pelanggaran Aparatur Negeri Sipil Kabupaten Karo, tahun 2015 sebesar 0,027%, tahun 2016 meningkat menjadi 0,033% dan tahun 2018 juga meningkat menjadi 0,33%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.131
Persentase Pelanggaran ASN
Kabupaten Karo Tahun 2015-2017

Tahun	Persentase Pelanggaran ASN
2015	0,027
2016	0,033
2017	0,330

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Karo, 2019

d. Penelitian dan pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo Tahun 2009-2016 dilaksanakan oleh eselon 4 pada Bappeda yang beban kerjanya didominasi terkait perencanaan sehingga terkait kelitbangan agak tersingkirkan. Tahun 2017 masih tetap di Bappeda

dan dilaksanakan oleh bidang atau eselon 3, tetapi pekerjaan masih didominasi terkait perencanaan dan belum melakukan pemantauan terkait pelaksanaan kelitbangan di Kabupaten Karo. Tahun 2018, mulai dilakukan pemantauan untuk 5 (lima) tahun terakhir dengan melihat kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan Perangkat Daerah sejak tahun 2016-2018 seperti terlihat pada tabel 2.134 berikut ini.

Tabel 2.132
Jumlah Kegiatan Kelitbangan RKPD
Kabupaten Karo Tahun 2016-2018

Tahun	Penelitian	Pengkajian	Pengembangan	Penerapan	Inovasi
2016	2	1	0	1	1
2017	1	5	14	1	0
2018	1	2	6	5	6

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo, 2019

e. Sekretariat Dewan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan dapat diukur melalui Indikator kinerja. Periode tahun 2014-2018 indikator kinerja penunjang urusan Sekretariat Dewan dilaksanakan setiap tahunnya oleh Sekretariat Dewan Kabupaten Karo.

Adapun data indikator selengkapannya disajikan pada tabel 2.133 di bawah ini.

Tabel 2.133
Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Dewan
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Keterangan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Kab.Karo, 2019

f. Sekretariat Daerah

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Berdasarkan data capaian indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Karo rata-rata sudah mencapai mencapai 100% pada tahun 2018. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.134
Capaian Indikator Sekretariat Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2017-2018

No	Indikator	2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	6	4	66,66	2	3	150
2	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja	59	59	100	59	59	100
3	Nilai hasil evaluasi SAKIP	C	C	C	C	C	C
4	Persentase Perangkat Daerah menyusun LPPD	60	60	100	60	60	100
5	Jumlah kecamatan yang mengadministrasikan pembakuan nama rupa bumi	17	17	100	17	17	100
6	Persentase Perangkat Daerah yang Kelembagaannya telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	60	60	100	60	60	100
7	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat waktu	272	264	97	222	222	100
8	Jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah						
	<i>Media Massa</i>	30	30	100	28	28	100
	<i>Media Elektronik</i>	10	10	100	18	18	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019

g. Urusan pengawasan

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Karo, mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di antaranya berisi beragam temuan dan rekomendasi kepada entitas pengelola keuangan negara. Bahwa persentase tindak lanjut yang sudah selesai ditindaklanjuti pada tahun 2014 sebesar 92,30%, tahun 2014 sebesar 73,07%, tahun 2015 sebesar 86,58, tahun 2016 sebesar 83,33% dan tahun 2018 sebesar 80,76% atau berada pada rata-rata 83,21%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.135
Persentase Temuan BPK Ditindaklanjuti
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut			Persentase Sudah Selesai ditindaklanjuti
			Sudah Selesai	Belum Selesai	Belum ditindaklanjuti	
2018	11	52	42	10	0	80,76
2017	14	66	55	9	2	83,33
2016	16	82	71	11	0	86,58
2015	10	26	19	7	0	73,07
2014	10	13	12	1	0	92,30

Sumber: Inspektorat Kabupaten Karo, 2019

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan penduduk Kabupaten Karo terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pengeluaran rata-rata perkapita perbulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga selama sebulan untuk konsumsi rumah tangga baik konsumsi makanan maupun bukan makanan dibagi dengan banyaknya rumah tangga.

Persentase pengeluaran per kapita sebulan menurut jenis pengeluaran (makanan dan bukan makanan), dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Semakin tinggi persentase

pengeluaran untuk bukan makanan, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduknya. Pengeluaran per kapita per bulan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.136
Pengeluaran/kapita/Bulan dan Persentase/Kapita/Bulan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

TAHUN	Pengeluaran/Kapita/Bulan			% Pengeluaran/Kapita/Bulan		
	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah
2014	538.483	297.809	836.292	64,39	35,61	100,00
2015	582.337	435.323	1.017.660	57,22	42,78	100,00
2016	617.920	388.489	1.006.410	61,40	38,60	100,00
2017	701.333	362.710	1.064.042	65,91	34,09	100,00
2018	797.509	479.008	1.276.517	62,48	37,52	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Karo 2019, (diolah)

Jika dilihat dari pola pengeluaran masyarakat Kabupaten Karo, pengeluaran untuk makanan pada tahun 2018 masih cenderung lebih besar dari konsumsi non-makanan, berarti sebagian besar masyarakat dari penduduk masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer.

b. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Karo, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan ekspor Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2.137
Perkembangan Ekspor
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Total Nilai Ekspor					
ADHB (Miliar Rp)	3.578,57	3.779,72	4.059,60	4.846,40	5.610,46
ADHK 2010 (Miliar Rp)	3.235,00	3.440,59	3.602,60	3.830,19	3.858,78
Proporsi terhadap PDRB	25,90	24,95	24,27	26,83	28,98
Pertumbuhan	4,51	6,36	4,71	6,32	0,75

Sumber : BPS Kabupaten Karo 2019

Secara total, dalam kurun waktu 2014-2018 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2014 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 3,58 triliun rupiah meningkat menjadi sebesar 3,78 triliun rupiah pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016-2018 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 4,06 triliun rupiah; 4,85 triliun rupiah; dan 5,61 triliun rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 3,24 triliun rupiah (2014); 3,44 triliun rupiah (2015); 3,60 triliun rupiah (2016); 3,83 triliun rupiah (2017) dan 3,86 triliun rupiah (2018). Sementara itu, pada periode 2014-2018, proporsi dalam PDRB mengalami fluktuasi dari 25,90 persen pada tahun 2014 menjadi 28,98 persen di tahun 2018. Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang tinggi khususnya pada tahun 2015 mencapai 6,36 persen. Sementara itu pada tahun lainnya pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar 4,51 persen (2014); 4,71 persen (2016); 6,32 persen (2017); dan 0,75 persen (2018).

c. Impor Barang dan jasa

Berbeda dengan komponen ekspor transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Karo di luar domestik baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Karo terhadap ekonomi atau produk wilayah lain baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi propinsi lain maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Karo meningkat (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2014 sampai 2018. Pada tahun 2014 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 3.443 triliun rupiah, kemudian meningkat di tahun 2015 menjadi 3.555 triliun rupiah; 3.729 triliun rupiah pada tahun 2016; 4.651 triliun rupiah pada tahun 2017 dan 5.690 triliun rupiah pada tahun 2018. Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2014 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 24,92 persen kemudian menurun menjadi 23,46 (2015) dan turun lagi menjadi 22,29 persen pada tahun 2016. Selanjutnya, pada tahun 2017-2018 proporsi impor barang dan jasa meningkat sebesar 25,74 persen, dan 29,39 persen.

Tabel 2.138
Perkembangan Impor
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Total Nilai Impor					
ADHB (Miliar Rp)	3 442,76	3 555,00	3 729,33	4 651,05	5 690,10
ADHK 2010 (Miliar Rp)	3 018,47	3 121,33	3 193,52	3 317,15	3 449,27
Proporsi terhadap PDRB	24,92	23,46	22,29	25,74	29,39
Pertumbuhan	2.42	3.41	2.31	3.87	3,98

Sumber : BPS Kabupaten Karo 2019

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan

jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

a. Perhubungan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan). Tabel 2.139 berikut ini menunjukkan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dan jumlah barang yang terangkut melalui angkutan umum dan terminal per tahun.

Tabel 2.139
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Karo Tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Panjang Jalan	1.218,15	1.218,15	1.218,15	1.218,15	1.218,15
Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Tedaftar	26.684	28.185	31.686	30.662	28.139
Rasio panjang jalan (km) per jumlah kendaraan	0,047	0,044	0,040	0,041	0,045
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	459.401	3.451.565	3.343.653	3.338.655	3.411.274

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, 2019 (Data olahan)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa panjang jalan di Kabupaten Karo tidak ada penambahan dari tahun 2014 hingga tahun 2018, akan tetapi jumlah kendaraan yang terdaftar cenderung bertambah, meskipun pada tahun 2018 ada penurunan. Oleh karena itu, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan juga cenderung mengalami penurunan.

b. Penataan Ruang

1) Luas Wilayah Produktif

Kawasan budidaya adalah kawasan di mana manusia dapat melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan baik sebagai tempat tinggal atau berkegiatan untuk memperoleh pendapatan/kemakmuran. Kawasan budidaya yang digunakan masyarakat terdiri dari hutan produksi, lahan kering dan lahan basah (sawah). Luas wilayah produktif di Kabupaten Karo cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2014, dimana pada tahun 2014 sekitar 163.463 Ha menjadi 202.766 Ha pada tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan luas seluruh wilayah budidaya yang ada di Kabupaten Karo rasio luas wilayah produktif cenderung mengalami penurunan dimana tahun 2017 sekitar 1,6106 sedangkan tahun 2018 hanya 1,0742.

Tabel 2.140
 Persentase Luas Wilayah Produktif
 Kabupaten Karo Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Luas wilayah produktif (Ha)	163.463	203.283	202.766	202.766	202.766
2.	Luas seluruh wil. Budidaya (Ha)	125.894	125.894	125.894	125.894	188.757
3.	Rasio (1./2.)	1,2984	1,6147	1,6106	1,6106	1,0742

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dapat dilihat pada tabel 2.114 di bawah ini, dimana paling tinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 23,00 dan paling rendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 20,46.

Tabel 2.141
Angka Kriminalitas Kabupaten Karo
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No	Jenis Kriminal	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	851	894	912	860	838
2.	Jumlah penduduk	382.622	389.591	396.598	403.207	409.675
3.	Angka kriminalitas per 10000 penduduk	22,24	22,95	23,00	21,33	20,46

Sumber: Polres Tanah Karo, 2019

b. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demo paling tinggi pada tahun 2014 yaitu 21 kali, hal ini karena suhu politik di Kabupaten Karo lagi memanas disajikan tabel 2.142 berikut ini.

Tabel 2.142
Jumlah Demo
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah unjuk rasa	21	13	7	17	11

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat Kab. Karo, 2019

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan mampu melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam sumber daya manusia, yang diliput bukan terbatas kepada tenaga ahli, tenaga berpendidikan atau pun tenaga yang berpengalaman saja, tetapi semua tenaga kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Mendapatkan SDM yang berkualitas tentunya

merupakan impian dari suatu daerah, hal ini disebabkan karena SDM merupakan salah satu langkah awal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk membangun dan memajukan suatu daerah. Adapun persentase menurut ijazah Diploma I, II, III, IV dan S1 Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 143
Persentase Penduduk Menurut Ijazah
Diploma I, II, III, IV dan S1 Keatas
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Diploma I & II	Diploma III	D IV/S1 Keatas
2018	0,21	1,47	4,67
2017	0,69	2,34	4,84
2016	0,37	1,69	5,43
2015	0,85	2,01	3,93
2014	0,63	1,99	4,12

Sumber BPS Kab.Karo, 2019

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Hasil analisis rasio ketergantungan terlihat bahwa rasio ketergantungan semakin menurun dimana tahun 2018 sebesar 57,50%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 57,88% (tahun 2017) seperti disajikan tabel 2.146 sebagai berikut:

Tabel 2.144
Rasio Ketergantungan
Kabupaten Karo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio ketergantungan	58,78	58,15	57,88	57,88	57,50

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2019

BAB III

PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 20 (dua puluh) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka pemerintah daerah dapat mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi kegagalan dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan dan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah jangka panjang di Kabupaten Karo, sebagai berikut:

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Potensi pengembangan wilayah

Pengembangan wilayah sangat erat kaitannya dengan letak geografis suatu daerah. Letak Kabupaten Karo secara geografis sangat strategis, karena merupakan daerah yang menjadi penghubung Ibukota Provinsi Sumatera Utara Medan dengan Kabupaten lain seperti Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir dan Provinsi Aceh. Akan tetapi letak strategis tersebut memberikan beberapa permasalahan antara lain terkait infrastruktur dan budaya.

Sebagai salah satu akses utama Jalan Jamin Ginting dari Medan ke Kabupaten Karo sering mengalami kemacetan akibat penggunaan jalan meningkat. Akibatnya arus lalu lintas barang, jasa maupun orang dari maupun menuju Medan menjadi terganggu. Selain itu, Kabupaten Karo banyak diserbu masyarakat pendatang dari daerah tetangga terutama sebagai tenaga kerja. Masyarakat pendatang tersebut banyak memberikan manfaat bagi Kabupaten Karo, disamping itu menyebabkan permasalahan budaya dan sosial di masyarakat.

b. Wilayah rawan bencana

Di Kabupaten Karo terdapat 2 (dua) Gunung Api aktif yakni Gunung Api Sinabung meliputi Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Tiganderket dan Gunung Api Sibayak (sebagian) berada di Kecamatan Merdeka, Kecamatan Dolat Rayat, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Berastagi. Potensi bahaya yang ditimbulkan dari letusan gunung Api tersebut adalah aliran piroklastik atau aliran awan panas, jatuhnya piroklastik, lava, abu vulkanik dan aliran lahar dingin. Selain potensi bencana akibat letusan gunung api, potensi bencana yang lain di Kabupaten Karo adalah bencana banjir, longsor dan angin puting beliung.

Di Kabupaten Karo terdapat beberapa desa yang rawan banjir yang tersebar di Kecamatan Mardinding dan Laubaleng. Selanjutnya, bencana lain yang potensial di Kabupaten Karo adalah bencana gerakan tanah/longsor terdapat di beberapa Kecamatan di

Kabupaten Karo. Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah potensi gerakan tanah/longsor, antara lain: Kecamatan Mardinding, Kecamatan Kutabuluh, Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Barusjahe, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Merek, Kecamatan Munte, Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Juhar. Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki potensi gerakan tanah mulai dari menengah sampai tinggi.

Terkait bencana tersebut, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah mitigasi bencana. Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait mitigasi bencana adalah sebagai berikut:

1. Belum lengkapnya dokumen penanganan bencana di Kabupaten Karo.
2. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur di daerah relokasi bencana dan di daerah terdampak bencana;
3. Belum optimalnya SDM terkait penanganan bencana;
4. Belum maksimalnya peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat yang terkena dampak bencana khususnya bencana Gunung Api Sinabung.

c. Demografi

Aspek demografi untuk melihat dinamika kependudukan di Kabupaten Karo, berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 sebesar 2,00%, hal ini mengindikasikan pertumbuhan penduduk yang relatif besar sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan rasio jenis kelamin bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari penduduk perempuan, jika dilihat kebutuhan untuk daerah pertanian lebih menuntut peran laki-laki. Ketidakmerataan atau ketimpangan sebaran penduduk menjadi masalah, kepadatan berpusat di perkotaan hal ini berdampak pada permasalahan perumahan, kesehatan dan keamanan. Dari aspek rasio ketergantungan sebesar 57,49 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak kurang lebih 58 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Berdasarkan struktur kependudukan pada usia 15-24 tahun dan

25-29 tahun banyak yang berada di luar daerah Kabupaten Karo, diasumsikan pada usia tersebut merupakan usia menduduki pendidikan perguruan tinggi dan bekerja yang mengharuskan berada di luar daerah. Setelah usia 30 tahun struktur penduduk mulai seimbang, akan tetapi usia 30 tahun menuju usia non produktif struktur penduduk cenderung menurun.

3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Jika dilihat dari kinerja kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Karo beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat bahwa dari sisi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung fluktuatif beberapa lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang melambat, pendapatan perkapita masyarakat cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018, tercatat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penurunan produksi tanaman hortikultura tahunan terutama jeruk. Penurunan produksi tersebut karena serangan hama lalat buah yang masih terjadi di Kabupaten Karo, tetap membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah.

Kondisi ketimpangan pendapatan/Gini Ratio menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan, pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,26 (kategori rendah) yang artinya memiliki ketimpangan yang rendah. Indikasi perbaikan perekonomian yang terus berlanjut masih dibayangi oleh beberapa faktor risiko yang perlu terus dikendalikan.

Kabupaten Karo memiliki sumber daya alam yang melimpah. Untuk itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam perlu dioptimalkan guna menunjang pembangunan di segala bidang. Pertanian merupakan sektor terbesar yang memiliki kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Karo, sektor pertanian memiliki kekuatan sebagai penyedia lapangan kerja potensial sekaligus berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, potensi pariwisata dengan keindahan alam merupakan sumber daya yang potensial yang perlu terus dikelola, tidak hanya objek yang telah ada tetapi perlu

dikembangkan objek-objek wisata baru dengan berkolaborasi dengan pihak swasta maupun masyarakat.

Kabupaten Karo berpeluang untuk terus meningkatkan ekonominya dengan memperbaiki daya saing produknya, dengan menjual produk dalam bentuk barang jadi ataupun setengah jadi. Ini dapat dilakukan dengan pengembangan industri pengolahan baik skala kecil, menengah maupun besar serta pengembangan ekonomi kreatif dengan penerapan inovasi dan teknologi. Nilai tambah yang dihasilkan dapat berdampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan meminimalisasi eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan.

Pembangunan ekonomi kerakyatan terus didorong dengan berbasis potensi lokal melalui pengembangan UMKM dan koperasi yang dapat memperkuat ekonomi rakyat. Kegiatan ekonomi yang lebih produktif di tingkat rakyat sekaligus dapat melahirkan jiwa kewirausahaan. Selain itu, hubungan antar produksi, distribusi dan konsumsi saling membutuhkan dan dapat berjalan dengan baik. Kerjasama Pemerintah, dunia usaha dan akademisi terus dikembangkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan tersebut. Dengan penguatan ekonomi kerakyatan diharapkan mengurangi pengangguran dan masyarakat miskin sehingga pendapatan perkapita masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat.

Permasalahan utama adalah masih terdapat penduduk di bawah garis kemiskinan dan masih belum meratanya pembangunan dari sektor pendidikan, kesehatan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan hak atas lingkungan yang berkelanjutan dan perumahan yang layak.

Selain itu, pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur jalan. Daerah yang memiliki akses jalan yang memadai, biasanya lebih cepat berkembang dibandingkan dengan daerah pinggiran dan terisolir.

Di wilayah Kabupaten Karo masih ada beberapa daerah yang ketersediaan infrastruktur jalan masih belum memadai, yaitu daerah di Kecamatan Mardinding, Lau Baleng, Kutabuluh, Tigabinanga dan

Juhar. Selain ketersediaan infrastruktur jalan, ketersediaan sarana perhubungan juga sangat berpengaruh untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan sarana perhubungan dengan ketersediaan infrastruktur adalah sejalan. Artinya makin buruk ketersediaan jalan, maka makin sulit sarana perhubungan masuk ke daerah itu. Oleh karena itu, masalah perhubungan juga terjadi di wilayah yang telah disebutkan di atas.

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia, dapat dilihat pada bidang pendidikan, angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2018 masih sebesar 9,55 persen atau masih setara lulusan SMP sederajat dan atau menuju kelas X serta angka melek huruf masih berada pada sekitar 0,39 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Karo yang buta huruf. Sedangkan pada bidang kesehatan masih terdapatnya kasus kematian bayi dan ibu. Kematian bayi pada tahun 2018 ada sebanyak 26 kematian dan kematian ibu sebanyak 7 kematian. Begitu juga tingkat kesejahteraan penduduk masih banyak berada dibawah garis kemiskinan, pada tahun 2018 ada sebanyak 8,89%.

Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi disebabkan belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kabupaten Karo hal ini dilihat dari nilai SAKIP kabupaten Karo sampai pada tahun 2018 masih C atau 39,63. Adapun faktor kelemahan SAKIP Kabupaten Karo antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Karo masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan output kegiatan dan belum berorientasi hasil (*outcome*).
- b. Pemerintah Kabupaten Karo belum intensif melakukan penerapan AKIP.
- c. Masih rendahnya Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Ombudsman RI hal ini dikarenakan Perangkat Daerah belum menerapkan Standar Pelayanan publik.

Untuk itu, perlu langkah-langkah peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Karo dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi kemudian dikembangkan dengan pembuatan *Grand Desain* Reformasi Birokrasi Kabupaten Karo

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKM Kabupaten Karo sudah dinilai sejak tahun 2017. Penyelenggara pelayanan publik yang dinilai pada tahun 2017, hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dengan nilai 72,5 dengan kategori “Baik”. Tahun 2018, IKM Kabupaten Karo dengan jumlah penyelenggara pelayanan publik yang dinilai sebanyak 41 (empat puluh satu) dengan rincian 18 Puskesmas, 17 Kecamatan dan 6 Perangkat Daerah. Nilai IKM Kabupaten Karo Tahun 2018 sebesar 83,04 dan berada pada kategori BAIK. Selanjutnya, pada tahun 2019, IKM Kabupaten Karo dengan jumlah penyelenggara pelayanan publik yang dinilai sebanyak 43 (empat puluh tiga) dengan rincian 7 (tujuh) Perangkat Daerah, 17 (tujuh belas) Kecamatan, dan 19 (sembilan belas) Puskesmas, dengan nilai sebesar 83,60 dan berada pada kategori “BAIK”.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dilihat dari bidang pendidikan yang menjadi masalah yaitu indikator angka melek huruf, masih ada sekitar 0,39 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Karo yang buta huruf. Begitu juga dengan angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2018 masih sebesar 9,55 persen atau masih setara lulusan SMP sederajat. Masih terdapatnya kasus kematian bayi dan kematian ibu serta derajat kesehatan masyarakat masih perlu di tingkatkan.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni budaya dilakukan melalui festival maupun pameran kebudayaan pada even kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah daerah lainnya. Akan tetapi eksplorasi seni budaya belum maksimal dengan adanya even. Daya tarik masyarakat masih rendah akan kegiatan budaya yang

diselenggarakan, disamping minimnya aktifitas gedung kesenian yang melaksanakan kegiatan seni budaya.

Pada pembangunan olahraga, fokus permasalahan pada sarana dan prasarana keolahragaan. Tingginya minat olahraga masyarakat, tetapi pemerintah belum bisa menyediakan gedung olahraga dan lapangan olahraga di pedesaan serta sarana pendukung lainnya.

3.1.3. Aspek Pelayanan Umum

a. Fokus Layanan Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib pendidikan yaitu:

- Angka Partisipasi Sekolah jenjang PAUD masih rendah (14,14%) dan tingkat SD dan SMP belum mencapai 100% .
- Kualitas Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang dalam kondisi baik masih rendah. Capaian pada tahun 2018 Sekolah SD/MI kondisi baik hanya 32,17% dan Sekolah SMP/MTs kondisi baik hanya 24,65%. Hal ini disebabkan perawatan dan pemeliharaan yang kurang memadai serta sarana prasarana yang telah memiliki masa pakai lama. Sementara itu, dari segi kuantitas hanya 23,53% Kecamatan yang memiliki TK Pembina karena setiap kecamatan telah memiliki TK swasta yang memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan anak.
- Belum terpenuhinya sumber daya tenaga pendidik (guru) baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan, masih belum meratanya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di setiap sekolah di Kabupaten Karo, masih rendahnya manajemen kinerja pendidik dan tenaga pendidik, mulai lunturnya loyalitas serta integritas dalam menjalankan profesinya sehingga mempengaruhi mutu kinerja dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa dan masih rendahnya mutu dan prestasi siswa baik di bidang akademik maupun non akademik.

2. Kesehatan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib kesehatan yaitu:

- Masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan dasar disebabkan belum memadainya sarana dan prasarana minimal di rumah Sakit dan Puskesmas, masih adanya kondisi gedung puskesmas yang belum sesuai standar serta belum adanya bangunan Rumah Sakit Umum Daerah.
- Rasio jumlah rumah sakit yang ideal adalah satu rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sementara kondisi Kabupaten Karo saat ini adalah 1 : 102.418, kondisi ini tidak terlalu jauh tetapi akan tetap perlu ditingkatkan dengan peningkatan status beberapa sarana pelayanan kesehatan menjadi Rumah Sakit.
- Masih rendahnya kompetensi SDM kesehatan yang sesuai profesinya dalam memberi pelayanan kesehatan serta belum terpenuhinya tenaga kesehatan berdasarkan jenis ketenagaan, misalnya: Dokter spesialis (anastesi, mata, dan jantung), tenaga gizi, sarjana kesehatan dan tenaga administrasi di puskesmas.
- Belum semua masyarakat memiliki jaminan Kesehatan Masyarakat.
- Masih ditemukan penyakit HIV AIDS, dan penyalahgunaan narkoba
- Ada kecenderungan peningkatan kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dll. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat.
- Seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah yang belum terakreditasi sementara menurut ketentuan Permenkes No. 46 Tahun 2015 pada tahun 2019 sudah harus terakreditasi pada tahun 2018 masih 14 puskesmas yang terakreditasi.
- Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab

Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Satu hal yang sering diperhatikan masyarakat dalam pelayanan publik adalah mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

- Permasalahan pelayanan publik bidang pendidikan yaitu ketersediaan guru, penumpukan guru di daerah tertentu dan kekurangan guru di daerah terpencil dan perbatasan, nilai sertifikasi guru rendah yang menunjukkan kurangnya standar profesional guru PNS. Pada tahun 2018, tingkat SD masih mencapai 70,77 % dan tingkat SMP sebesar 76,77%. Begitu juga dengan kondisi sekolah dan sarana prasarana, pada tahun 2018 Sekolah SD/MI kondisi baik hanya 32,17% dan Sekolah SMP/MTs kondisi baik hanya 24,65%. Permasalahan selanjutnya yaitu masih rendahnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP/MTs masih mencapai 88,67% pada tahun 2018 serta Angka Partisipasi Murni jenjang SD/MI dan SMPT/MTs masing-masing belum mencapai 100%.
- Pada bidang kesehatan yang menjadi permasalahan belum tersedianya dokter spesialis yang wajib ada pada rumah sakit umum daerah seperti dokter spesialis mata, dokter spesialis patologi klinis dan dokter spesialis anestesi. Permasalahan lainnya masih rendahnya capaian indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diukur dalam lima tahun terakhir antara lain: jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar rata-rata capaian 20,24%, jumlah penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar rata-rata capaian 0,18%, jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes rata-rata capaian 23,44%, jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar rata-rata capaian 42,60%, dan jumlah orang yang

mendapatkan pelayanan TB sesuai standar rata-rata capaian 37,39%.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib pekerjaan umum yaitu:

- Kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari proporsi panjang jalan dalam kondisi baik yang masih rendah. Pada tahun 2014 proporsi jalan baik di kabupaten Karo sekitar 45,32%, meskipun meningkat menjadi 61,35% tahun 2018 akan tetapi dianggap belum maksimal.
- Masih rendahnya persentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi. Pada tahun 2018, akses sanitasi di Kabupate Karo baru 73,08%, sedangkan untuk air minum hanya 67,5%. Capaian ini masih jauh dari Target Nasional 100% akses air minum dan sanitasi.
- Penyediaan infrastruktur irigasi yang mendukung ketahanan pangan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari persentasi irigasi Kabupaten Karo dalam kondisi baik yang mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Tahun 2017 mencapai 54% sedangkan tahun 2018 hanya 46,70%.
- Belum ditetapkannya RTRW Kabupaten Karo dan RDTR yang belum terealisasi hingga 2018. Disamping itu, luasan RTH yang masih 20% dari target 30%.
- Masih kurangnya drainase yang terintegrasi dengan baik.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Pada urusan wajib perumahan, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Masih terdapat rumah tidak layak huni. Hal ini dapat terlihat dari cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 94,4% pada tahun 2018.
- Masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman kumuh. Persentase lingkungan permukiman kumuh sekitar 54,6 Ha pada tahun 2018.
- Tempat pemakaman umum belum tertata dan terkelola dengan optimal.

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yaitu:
 - Rendahnya jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial khususnya lansia tidak potensial dan penyandang disabilitas
 6. Sosial
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib sosial yaitu:
 - Masih tingginya risiko bencana di Kabupaten Karo yang antara lain akibat dokumen penanggulangan bencana belum tersedia belum tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang optimal dan SDM penanggulangan bencana belum optimal.
 - Penerima bantuan sosial belum tepat sasaran, diperlukan kegiatan validasi dan verifikasi data kemiskinan.
 - Minimnya pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Fokus Layanan Urusan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib tenaga kerja yaitu:
 - Tidak seimbang antara angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
 - Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja.
 - Masih rendahnya kreativitas dan produktivitas angkatan kerja dalam menciptakan lapangan usaha baru.
 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Pemberdayaan perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang menjamin hak dan tumbuh kembang anak. Sampai saat ini kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaannya adalah belum terdatanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara akurat karena kebanyakan korban merasa malu untuk melaporkan kasusnya. Disamping itu, sering kali kasus tidak disertai bukti dan saksi yang lengkap sehingga sulit untuk ditindaklanjuti.

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain:

- Minimnya peran aktif dan pemberdayaan perempuan dalam berpartisipasi politik, pengambilan keputusan dan aksesibilitas terhadap sumberdaya ekonomi.
- Masih minimnya kebijakan dan prasarana pendukung peningkatan kualitas hidup anak. Banyaknya masalah terkait peningkatan kualitas hidup anak, seperti tinggi usia perkawinan dini, banyaknya kenakalan anak, minimnya prestasi anak, tingginya angka anak putus sekolah dll. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) masih diperlukan, Belum adanya penyusunan data terpilah untuk melihat potensi dan permasalahan gender di Kabupaten Karo.
- Belum optimalnya kelembagaan dan minimnya regulasi atau kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) serta minimnya program kegiatan yang responsif gender.
- Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengaduan dan penanganan tindak kekerasan sehingga penanganannya kurang efektif.

3. Pangan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib pangan yaitu:

- Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk dan belum sesuai dengan pola konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi seimbang.
- Database sumber daya pangan, ketersediaan dan infrastruktur yang belum tersedia.
- Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap konsumsi beras dan terigu.

- Masih terdapat daerah rawan pangan (kecamatan Mardinding, Kabanjahe, Kutabuluh, Tiganderket, Dolatrayat).
- Masih terdapat penggunaan bahan kimia pada pangan segar dan produk olahan pangan.
- Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal.
- Jaringan distribusi pangan masih belum optimal.

4. Pertanahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib pertanahan yaitu belum optimalnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta perlunya penyediaan tanah untuk fasilitas umum.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib lingkungan hidup yaitu:

- Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum lengkap.
- Kualitas lingkungan yang cenderung mengalami degradasi.
- Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat perkotaan dan belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- Penanganan air limbah rumah tangga/domestik belum dilakukan secara terpadu.
- Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang.
- Belum adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal karena lahan yang tidak tersedia.
- Indeks Tutupan Lahan semakin lama semakin berkurang karena meningkatnya pertambahan jumlah penduduk.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan- permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Dalam bidang *database* dan informasi kependudukan, masih belum adanya suatu sistem manajemen pengelolaan data dan informasi kependudukan terintegrasi, akurat, dipercaya dan mudah diakses dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat administrasi kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu:

- Masih rendahnya kualitas aparatur pemerintah desa, sehingga kegiatan pemberdayaan maupun pembangunan fisik desa masih rendah kualitasnya.
- Masih minimnya pendapatan asli desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera yaitu:

- Masih tingginya laju pertumbuhan yakni 2% pertumbuhan penduduk yang tinggi salah satu penyebabnya yakni adanya peningkatan arus migrasi yang ingin bekerja di Kabupaten Karo sehingga berkontribusi pada meningkatnya jumlah pengangguran.
- Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk, faktor kemungkinan dapat dilihat dari masih rendahnya pemakaian kontrasepsi/CPR pada usia pasangan subur hanya sebesar 72,39% tahun 2018 dan cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ada sebesar 15,00% tahun 2018.

9. Perhubungan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib perhubungan yaitu:

- Perlunya peningkatan uji KIR bagi angkutan umum. Dari indikator jumlah uji KIR angkutan umum cenderung mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga tahun 2018, sedangkan jumlah angkutan umum ada peningkatan.
- Perlunya peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas serta pengawasan. Di Kabupaten Karo ada beberapa titik kemacetan seperti di wilayah perkotaan Kabanjahe dan Berastagi. Selain itu di titik-titik tertentu seperti di Pasar Tigapanah dan Roga juga menjadi titik kemacetan pada jam-jam tertentu.
- Masih kurang optimalnya sarana dan prasarana perhubungan serta pengaturan trayek. Di Kabupaten Karo

hanya ada 1 (satu) terminal Tipe B, namun belum memenuhi syarat. Demikian juga dengan dermaga angkutan danau di Tongging, kondisinya belum memadai.

- Peningkatan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap pelayanan jasa angkutan belum optimal. Masih ada beberapa desaterutama di desa-desa terpencil yang belum memiliki angkutan yang layak seperti di daerah Liang Melas Kecamatan Mardinding, Lau Baleng dan Kutabuluh.
- Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana lalulintas belum optimal. Pemasangan rambu-rambu juga masih belum optimal meskipun mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2015 yang hanya 2,71% menjadi 51,06 % pada tahun 2018.
- Belum adanya norma/kebijakan regulasi terkait bidang perhubungan (perparkiran, penertiban, belum ditetapkannya regulasi kelas jalan di Kabupaten Karo).

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib komunikasi dan informatika yaitu:

- Belum optimalnya penggunaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Karo. Hal ini dapat terlihat dari jumlah *website* pemerintah daerah yang tidak ada penambahan dari tahun 2014 hingga 2018. Selain itu jaringan internet belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Karo, dimana masih ada beberapa wilayah kecamatan yang belum mendapat akses internet seperti kecamatan Juhar.
- Masih terbatasnya SDM terkait pengelolaan perangkat IT. Penggunaan teknologi informasi yang semakin meningkat membutuhkan SDM yang memadai, akan tetapi di Kabupaten Karo tenaga ini masih sangat kurang.
- Masih ada beberapa desa yang belum tersedia jaringan telepon dan internet. Pada tahun 2018, ada 21 desa yang belum tersedia jaringan telepon dan internet.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah yaitu:

- Masih ada Koperasi yang tidak aktif dan belum optimalnya pengelolaannya secara baik sesuai dengan fungsinya.
- Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Koperasi.
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung Koperasi.
- Klaster bisnis UMKM belum ada karena sulitnya melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM.
- Rendahnya daya saing produk UMKM karena Inovasi dan kreatifitas pengolahan produk masih kurang.
- Masih rendahnya akses UMKM terhadap permodalan dan pemasaran.
- Kurangnya peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Belum optimalnya kemitraan pelaku Usaha Mikro dengan dunia usaha.

12. Penanaman Modal

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib penanaman modal yaitu:

- Kurangnya pemahaman *stakeholder* dan masyarakat terhadap perizinan.
- Kurangnya pembinaan dan pengawasan penanaman modal.
- Belum kondusifnya Iklim investasi khususnya dalam hal pelayanan perizinan.
- Belum tersedianya data dan peta potensi investasi daerah yang informatif.
- Belum jelasnya regulasi investasi bagi investor.
- Belum optimalnya pengembangan SDM untuk peningkatan pelayanan penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib kepemudaan dan olahraga yaitu:

- Belum optimalnya pengembangan kepemudaan dan keolahragaan dikarenakan kurangnya kegiatan dan even

dalam pemberdayaan kepemudaan dan peningkatan olahraga.

- Belum adanya Gedung Olahraga (GOR), minimnya lapangan olahraga serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga sehingga mengakibatkan minimnya minat masyarakat untuk dalam berolahraga.
- Pemuda lebih mementingkan kegiatan politik praktis untuk mencari kekuasaan dibanding kegiatan kepeloporan, aksi bakti sosial serta pembinaan kepemimpinan dan kewirausahaan, pemuda yang terbelenggu dengan IPTEK dengan akses negatif, maraknya kejahatan remaja dan pemuda di Kabupaten Karo.
- Belum adanya data potensi kepemudaan sehingga perencanaan pembangunan kepemudaan kurang maksimal, seperti pemberdayaan untuk peningkatan kewirausahaan pemuda.

14. Statistik

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib statistik yaitu:

- Data Karo Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka sudah ada setiap tahun dikeluarkan oleh BPS, akan tetapi sistem data tersebut belum terintegrasi.
- Masih banyak data terkait statistik yang belum lengkap. Seperti data rumah tidak layak, akses air minum dan lain lain sebagainya.

15. Kebudayaan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib kebudayaan yaitu:

- Belum optimalnya pengelolaan sanggar seni dan budaya.
- Perkembangan masyarakat yang dinamis akibat globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak terhadap pergeseran nilai kearifan lokal budaya Karo (adat istiadat).
- Belum terkelolanya kekayaan budaya dengan baik (antara lain: rumah adat, museum, bangunan peninggalan sejarah)

- Rendahnya pendapatan seniman dan budayawan dari kegiatan seni budaya menyebabkan turunnya daya tarik bidang tersebut untuk ditekuni.
- Menurunnya kepedulian sosial masyarakat.

16. Perpustakaan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib perpustakaan yaitu:

- Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan tetapi dukungan sarana prasarana perpustakaan masih belum memadai, diperlukan penambahan ruang perpustakaan dan pembuatan pagar untuk keamanan gedung.
- Masih minimnya SDM pengelola perpustakaan yang memiliki sertifikat.
- Belum terkelolanya penataan perpustakaan berbasis digital.

17. Kearsipan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib kearsipan yaitu:

- Kurangnya SDM dan Anggaran dalam Penataan Arsip di SKPD.
- Belum memiliki Pengarsipan secara digital.

c. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan pilihan pariwisata yaitu:

- Persentase kunjungan belum sesuai target yang direncanakan dan menurun dari capaian tahun sebelumnya.
- Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW masih kurang.
- Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM pariwisata.
- Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah.
- Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dalam satu kawasan wisata dan pengembangan desa wisata.
- Kurangnya infrastruktur dasar pariwisata.

- Kurangnya pemasaran/promosi pariwisata dan pelaksanaan event-event yang mendukung pariwisata.
- Belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis UMKM dan ekonomi kreatif.
- Belum optimalnya pengembangan wisata yang berwawasan lingkungan.

2. Pertanian

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan pilihan pertanian yaitu:

- Serangan OPT masih tinggi akibat cuaca ekstrim, perilaku petani dan kurangnya petugas pengamat OPT lapangan.
- Masih rendahnya pengetahuan petani dalam menerapkan *Good Agriculture Practice (GAP)* Pertanian.
- Masih terdapat alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian.
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian antara lain: Ketersediaan pupuk, benih/bibit, alsintan, sumber-sumber air dan JUT.
- Keterbatasan akses pemasaran produk pertanian akibat kurangnya kemitraan petani dengan dunia usaha di bidang pertanian.
- Kurangnya sarana dan prasarana pasca panen.
- Rantai pemasaran produk pertanian masih terlalu panjang.
- Kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal karena kurangnya kesadaran petani terhadap arti pentingnya kelembagaan yang ada di petani.
- Masih kurangnya penerapan teknologi pertanian.

3. Kehutanan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan pilihan kehutanan dan bukan lagi merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, yaitu:

- Terjadinya kerusakan sumber daya alam seperti hutan, tanah, dan sumber daya air akibat bencana alam Gunung Sinabung.
- Fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal.

- Akses petani kehutanan terhadap sumber permodalan masih kurang.
 - Luas hutan rakyat semakin berkutang akibat kegiatan perambahan hutan.
 - Luas lahan kritis masih cukup banyak.
4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral yaitu:

- Banyaknya terjadi gerakan tanah pada beberapa kecamatan di daerah Kabupaten Karo.
- Terbatasnya ketersediaan air tanah di alam dan maraknya pengambilan sumber air karena tuntutan kebutuhan akan air yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal ini didukung karena *supply* air minum dan PDAM masih kurang.
- Tidak adanya informasi lintasan sebaran dan kemenerusan suatu endapan bahan galian.
- Potensi kekayaan sumberdaya mineral sebagai salah satu aspek sumberdaya alam, memiliki kandungan yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya agar pemanfaatan potensi sumberdaya mineral dapat dilakukan secara optimal.
- Kurangnya pembinaan melalui peraturan/regulasi pengelolaan air tanah.
- Belum terbentuknya jaringan data dan informasi air tanah yang baik antar lembaga pengumpul atau pengelola data air tanah.
- Kurangnya minat investor didalam pengelolaan bahan galian industri.
- Pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung belum terdata dengan baik.
- Kerusakan perlengkapan listrik akibat kurangnya rasa memiliki dari masyarakat.
- Potensi energi baru dan terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal akibat pembebasan lahan dari masyarakat

terkendala, masih banyak potensi energy yang berada di kawasan hutan.

5. Perdagangan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan pilihan perdagangan, yaitu:

- Belum optimalnya ekspor komoditas dari Kabupaten Karo, daya saing produk di pasar nasional dan global belum optimal.
- Masih lemahnya perlindungan konsumen di Kabupaten Karo.
- Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional sesuai standar.

6. Perindustrian

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan pilihan perindustrian yaitu:

- Belum optimalnya daya saing usaha IKM (Inovasi dan Kreativitas).
- Belum adanya sentra IKM.
- Penguasaan dan penerapan teknologi IKM masih kurang (pengolahan masih bersifat tradisional).
- Kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi IKM masih rendah.
- Akses permodalan bagi IKM masih rendah.
- Masih rendahnya minat Pengusaha menginvestasi modalnya di sektor Industri Kecil dan Menengah.
- Kemitraan antar pelaku usaha belum optimal.

7. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan pilihan kelautan dan perikanan yaitu:

- Belum optimalnya produksi bibit unggul.
- Sumber daya alam yang potensial untuk budidaya perikanan belum dimanfaatkan secara optimal. Luas potensi perikanan budidaya seluas 449,24 Ha sedangkan luas lahan budidaya yang sudah dikembangkan hanya 129,17 Ha.
- Kurangnya minat masyarakat untuk berbudidaya ikan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan

masyarakat tentang cara berbudidaya ikan yang baik dan benar. Jumlah Kelompok Perikanan di Kabupaten Karo tahun 2016 sebanyak 83 kelompok yang aktif hanya 20 kelompok.

- Kurangnya populasi sumber daya ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) (danau dan sungai).
- Kurangnya tenaga penyuluh perikanan di Kabupaten Karo.

d. Fokus Layanan Urusan Penunjang

1. Perencanaan Pembangunan

- Belum ditetapkannya dokumen RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025.
- Belum ditetapkannya dokumen RTRW Kabupaten Karo.
- Belum 100% konsisten penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD.
- Adanya program pada RKPD yang tidak ada pada RPJMD.
- Belum 100% konsisten penjabaran program RKPD ke dalam APBD
- Adanya program pada APBD yang tidak ada pada RKPD.

2. Keuangan

- Belum tercapainya opini BPK dengan kategori WTP atas pelaporan keuangan daerah.
- Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan asset dan barang milik daerah.
- Proporsi belanja langsung lebih kecil dari belanja tidak langsung sehingga berdampak pada pendanaan belanja pembangunan yang direncanakan.
- Potensi PAD belum tergali secara optimal.

3. Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan penunjang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah rendahnya pelaksanaan diklat prajabatan dan struktural bagi ASN.

4. Penelitian dan pengembangan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan penunjang penelitian dan pengembangan adalah:

- Kebijakan pembangunan belum berdasarkan rekomendasi hasil kajian atau penelitian.
- Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM kelitbangan untuk memaksimalkan peran penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Tidak tersedianya tenaga fungsional peneliti.
- Inovasi belum menjadi budaya kerja.

5. Pengawasan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada urusan penunjang pengawasan adalah hasil rekomendasi tindak lanjut masih rendah, karena Perangkat Daerah kurang menindaklanjuti hasil rekomendasi baik eksternal dan internal karena kurang *punishment* dari auditor.

3.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung meningkat, sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi tersebut pendapatan perkapita masyarakat juga mengalami peningkatan, Jika dilihat dari rata-rata pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Karo selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan hal ini cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Disamping peningkatan rata-rata pengeluaran, indikasi meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan terjadinya pergeseran pola konsumsi. Pola konsumsi sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dapat pula dikatakan membaik apabila pendapatan meningkat dan sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk mengkonsumsi non-makanan, begitupun sebaliknya.

Pergeseran pola pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan anggapan bahwa setelah kebutuhan makanan telah terpenuhi, kelebihan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi suatu kelompok masyarakat sangat ditentukan pada pendapatan. Atau secara umum dapat dikatakan

tingkat pendapatan yang berbeda-beda menyebabkan keanekaragaman taraf konsumsi suatu masyarakat atau individu.

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Di Kabupaten Karo penambahan panjang jalan dari tahun 2014 sebesar 45,32% menjadi 61,35% tahun 2018. Jumlah kendaraan yang terdaftar cenderung bertambah, meskipun pada tahun 2016 ada penurunan. Oleh karena itu rasio panjang jalan per jumlah kendaraan juga cenderung mengalami penurunan. Begitu juga dengan jumlah barang/orang yang terangkut cenderung mengalami penurunan.

Selain jalan, indikator lain terkait daya saing daerah untuk focus infrastruktur adalah terkait tata ruang. Isi utama terkait tata ruang di Kabupaten Karo adalah belum ditetapkannya RTRW Kabupaten Karo. Meskipun begitu dokumen tersebut sudah selesai disusun menunggu pengesahan dari DPRD Kabupaten Karo. Kawasan budidaya yang digunakan masyarakat terdiri dari hutan produksi, lahan kering dan lahan basah (sawah). Luas wilayah produktif di Kabupaten Karo cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2014, dimana pada tahun 2014 sekitar 163.463 Ha menjadi 2.020.766 Ha pada tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan luas seluruh wilayah budidaya yang ada di Kabupaten Karo rasio luas wilayah produktif cenderung mengalami penurunan dimana tahun 2017 sekitar 1,6106 sedangkan tahun 2018 hanya 1,0742.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Kondisi penanaman modal di Kabupaten Karo baik pada perusahaan PMA dan PMDN belum berkembang secara optimal. Hal ini dikarenakan belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dan belum tersedianya data dan informasi peluang investasi Kabupaten Karo yang memadai. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain penyediaan regulasi yang mendukung agar investor mau menanamkan modalnya dan mudah dalam mengembangkan usahanya, menyediakan data potensi investasi yang lengkap, dukungan infrastuktur dalam mengembangkan investasi di daerah, promosi investasi daerah yang inovatif, kondisi keamanan yang terjaga dan ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai.

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia merupakan upaya meningkatkan kualitas manusia, beberapa hal dapat kita ukur antara lain dari aspek pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dll. Aspek pendidikan masih rendahnya mutu dan pelayanan pendidikan menjadi permasalahan signifikan, dengan dukungan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan belum mampu menciptakan murid/siswa/tenaga pendidik yang berprestasi. Begitu juga partisipasi sekolah pada pendidikan usia dini cakupan anak yang bersekolah sangat rendah hanya 36,73% begitu juga dengan partisipasi sekolah jenjang Perguruan Tinggi hanya sebesar 17,31%.

Dengan rendahnya mutu dan kualitas pendidikan, inovasi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja menjadi minim. Denganrendahnya pendidikan masyarakat juga rentan akan masalah/konflik sosial, hal ini terlihat dari banyaknya kasus narkoba khususnya pada kalangan usia produktif yang paling dominan terjerat kasus, dan kasus HIV/AIDS yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

Kualitas SDM dari sisi kesehatan, masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan sehingga akses kesehatan masih belum merata, begitu juga penempatan tenaga kesehatan disetiap kecamatan tidak merata khususnya di daerah perbatasan dan terpencil.

Pemberdayaan masyarakat masih rendah, penggunaan dana desa masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Masih banyaknya kemiskinan di pedesaan karena kurangnya lapangan kerja di pedesaan, seharusnya melalui dana desa pembangunan desa mampu menekan jumlah penduduk miskin.

3.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di sub-bab di atas, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Disamping itu, harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 20 (dua

puluh) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, penelaahan kebijakan pembangunan nasional, isu dunia internasional dan daerah lain di sekitar Kabupaten Karo. Isu strategis merupakan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan Kabupaten Karo selama 20 tahun ke depan.

3.2.1. Penelaahan Isu-isu Strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Utara

Perumusan isu-isu strategis Kabupaten Karo dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional agar tercipta suatu keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan. Analisis isu-isu strategis dilakukan untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Sustainable Development Goals (SDGs) disepakati saat pertemuan dunia September 2015, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* (SDGs)) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Hal ini telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs sangat erat kaitannya dengan isu Hak Azasi Manusia, Sosial, Ekonomi dan Lingkungan termasuk didalamnya perubahan iklim. Terdapat 17 tujuan dan 169 target dimana setiap Negara harus ambil bagian dalam pencapaian tersebut.

Dalam mengidentifikasi isu-isu strategis bukan hanya mempertimbangkan isu strategis daerah lain tapi juga kesesuaian atau sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang

Provinsi Sumatera Utara, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Identifikasi Isu-Isu Strategis

No.	Isu Strategis		
	Dunia Internasional	Kebijakan Nasional	Kebijakan Regional
1.	Mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan	Mengurangi jumlah penduduk	
2.	Mencapai pendidikan dasar untuk semua	Meningkatkan kualitas penduduk seperti pendidik, kesehatan dan lingkungan	
3.	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan akan mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan kehidupan sumberdaya manusia serta peningkatan kehidupan anak.
4.	Menurunkan angka kematian bayi	Menurunkan angka kematian bayi	
5.	Menurunkan angka kematian ibu akibat melahirkan	Menurunkan angka kematian ibu melahirkan	
6.	Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya	Menurunkan angka kesakitan dan kematian	
7.	Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketersediaan energi	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara tepat	
8.	Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan		
9.		Menurunkan pertumbuhan penduduk	
10.		Pembangunan jatidiri bangsa Indonesia seperti penghargaan pada nilai budaya dan	

No.	Isu Strategis		
	Dunia Internasional	Kebijakan Nasional	Kebijakan Regional
		bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air.	
11.		Peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi
12.		Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana baik kualitas maupun cakupan pelayanan	Efektifitas sistem transportasi darat
13.		Pemerataan pembangunan	Kesenjangan ekonomi antar daerah dan pemerataan pendapatan
14.		Mendukung ketahanan pangan di daerah, mendorong sektor produksi serta mendukung pengembangan wilayah	
15.		Meningkatkan profesionalisme birokrasi	
16.		Rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Mengurangi pemukiman dan perumahan kumuh serta meningkatkan aksesibilitas dan kesenjangan wilayah dan tata ruang; Menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem
17.			Pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan

No.	Isu Strategis		
	Dunia Internasional	Kebijakan Nasional	Kebijakan Regional
			Pengembangan Koperasi, UKM dan Sektor Informal
12.	Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatkan rumah tangga ber-sanitasi	Meningkatkan akses sanitasi
13.	Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatkan Persentase Penduduk berakses air minum	Meningkatkan akses air minum
14.	Mengurangi persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Mengurangi Lingkungan pemukiman kumuh	Mengurangi pemukiman dan perumahan kumuh
15.	Pengembangan konektivitas dan transportasi	Peningkatan konektivitas wilayah	Meningkatkan aksesibilitas dan kesenjangan wilayah
16.	Meningkatkan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Meningkatkan Rumah Layak Huni	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni
17.	Menurunkan angka kelaparan	Modernisasi irigasi dan waduk multifungsi wilayah	Peningkatan daya saing sektor agraris
20.		Rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem
22.	Pengurangan Indeks Risiko Bencana	Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan ketahanan bencana
23.	Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Ke depan, risiko ketidakpastian global masih mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8

persen per tahun, sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa. Ketidakpastian Proteksionisme, Brexit, fluktuasi harga komoditas, modernisasi pertumbuhan China serta keamanan, geopolitik dan perubahan iklim terus membayangi seluruh dunia.

Ketidakpastian global tersebut memberikan risiko kepada tingkat permintaan dunia, tentunya hal tersebut berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia karena Indonesia merupakan bagian dari mitra dagang, dan Tiongkok adalah sebagai mitra dagang utama. Ketidakpastian mempengaruhi Nilai tukar rupiah yang tidak stabil, kinerja kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor-impor); konsumsi dan investasi, dampak lainnya yang diperkirakan memberikan risiko pada neraca perdagangan, penerimaan Negara dan subsidi.

Ancaman krisis ekonomi global dan persaingan ekonomi global semakin kuat berpengaruh pada pembangunan nasional. Perekonomian nasional menjadi lebih terbuka sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan daerah. Dalam kaitan itu, daerah dituntut terus menyiapkan diri menghadapi ekonomi global untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dari persaingan global melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, daerah harus dapat memanfaatkan potensi dan peluang keunggulan daerah dalam rangka mendukung daya saing nasional sekaligus meminimalkan dampak negatif globalisasi.

Ekonomi Sumatera Utara tentunya tidak terlepas dari perekonomian global dan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa ekonomi Sumatera Utara ditopang komoditas utama sawit, karet dan kopi yang harganya berfluktuasi mengikuti perkembangan ekonomi dunia.

Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber-sumber daya alam tak terbarukan, untuk masa depan perlu diubah menjadi perekonomian yang produk-produknya mengandalkan keterampilan SDM serta mengandalkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global sehingga ekspor bahan mentah dapat dikurangi kemudian digantikan dengan ekspor produk yang bernilai tinggi dan berdaya saing global.

Disamping itu, Globalisasi menawarkan peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi, yaitu: Pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor; kemudahan untuk mengakses capital dan teknologi/pengetahuan yang berasal dari luar negeri; kemudahan mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum dapat di produksi di dalam negeri; dan peningkatan kegiatan pariwisata sekaligus yang membuka lapangan kerja dan juga menjadi ajang promosi produk-produk lokal. Bentuk nyata dari globalisasi ekonomi salah satunya adalah pasar bebas yang sangat kompetitif. Peningkatan daya saing wilayah merupakan keharusan untuk mengantisipasi dan berpartisipasi dalam persaingan global.

Perekonomian Kabupaten Karo secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan internal perekonomian Kabupaten Karo dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian lokal Kabupaten Karo dan perkembangan lingkungan eksternal perekonomian Kabupaten Karo sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian regional Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Target indikator makro ekonomi regional Kabupaten Karo yang ingin dicapai, sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi Internasional, nasional, regional dan internal Kabupaten Karo. Peningkatan kualitas produksi, peningkatan kualitas SDM, infrastruktur dan investasi serta ketersediaan regulasi yang jelas dengan berbasis IPTEK dan inovasi secara berkelanjutan menjadi bagian dari isu penting untuk pembangunan daerah.

Selain isu strategis di atas, sesuai dengan Sidang Umum PBB yang diikuti 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia telah menyetujui **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)** atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* tersebut berisikan 17 *Goals* dan 169 target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Sebagai komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tujuan tersebut wajib diselesaikan sebagai bagian dari penyelesaian 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu: lingkungan, sosial dan ekonomi. Keseluruhan tujuan global tersebut adalah:

1. Tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
2. Tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Pendidikan berkualitas, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Kesetaraan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi layak, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Energi bersih dan terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Industri, inovasi dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
11. Kota dan komunitas berkelanjutan, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem laut, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Ekosistem daratan, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Kabupaten Karo tetap secara berkesinambungan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut melalui pencapaian indikator matriks yang telah disusun, matriks tersebut sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara.

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik daerah yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah

dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik, sehingga upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terus dilanjutkan. Memperhatikan kondisi tersebut, sejalan dengan kebijakan pusat 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; 2. Meningkatkan ketahanan bencana dan iklim; serta 3. Menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon menjadi salah satu isu penting bagi pembangunan. Saat ini, kualitas lingkungan hidup baik air, udara maupun tutupan lahan semakin menurun. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan perlu terus menjadi perhatian kedepan dan harus dilakukan secara seimbang dan holistik bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan harus dipastikan agar tidak mengakibatkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan pencemaran.

3.2.2. Penelaahan RPJPD Daerah Lain

Dalam menentukan isu-isu strategis di Kabupaten Karo perlu diperhatikan pula isu-isu strategis daerah lain. Penelaahan RPJPD daerah lain diperlukan karena adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan dan adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama (khususnya pada daerah-daerah yang letaknya di daerah perbatasan dua wilayah) serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan. Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Identifikasi RPJPD Daerah Lain

No.	Daerah Lain	Periode RPJPD	Kebijakan Terkait
1.	Kabupaten Deli Serdang	2005-2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan Kabupaten yang berdaya saing • Meningkatkan kemandirian pangan melalui optimalisasi dan revitalisasi pertanian • Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan

No.	Daerah Lain	Periode RPJPD	Kebijakan Terkait
			<p>yang baik (<i>good governance</i>), bersih (<i>clean governance</i>), beribawa dan bertanggung jawab.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif • Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. • Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan perekonomian sesuai dengan kebijakan pengelolaan tata ruang yang berorientasi kepada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. • Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyediaan kebutuhan dasar masyarakat.
2.	Kabupaten Simalungun	2005-2025	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan wawasan kebangsaan nasional • Pembangunan supremasi hukum dan pemerintahan • Penguatan institusi pemerintah daerah • Penerapan pelayanan prima • Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) • Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan • Penguatan sarana dan prasarana pendidikan • Perbaikan sistem pendidikan baik secara manajerial maupun teknis profesional • Pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan • Penguatan sarana-prasarana kesehatan • Perbaikan sistem pelayanan kesehatan baik secara manajerial maupun teknis profesional • Pembangunan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan • Penanganan disparitas (ketimpangan) pembangunan

No.	Daerah Lain	Periode RPJPD	Kebijakan Terkait
			daerah dan penanggulangan pengangguran <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur (prasarana perkotaan dan utilitas umum) • Pemantapan sektor pertanian melalui pemberdayaan petani lokal.
3.	Kabupaten Dairi	2005-2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan masyarakat Dairi yang semakin sejahtera • Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik • Mewujudkan pembangunan dan pengembangan wilayah pemerintahan dengan ketersediaan infrastruktur berdasarkan tata ruang wilayah kabupaten • Mewujudkan pembangunan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran • Mewujudkan pengelolaan potensi daerah bidang industri pertanian rakyat, kepariwisataan dan sumber daya alam

3.2.3. Isu-isu Strategis Kabupaten Karo

Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Karo serta isu-isu strategis jangka panjang internasional, nasional serta regional dan aspek lainnya maka isu strategis pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi serta profesionalisme aparatur;

Reformasi Birokrasi menciptakan aparatur yang baik. Aparat pemerintah memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam hal pelaksanaan dalam bidang pemerintahan. Oleh karena itu agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dituntut tersedianya aparat pemerintah yang profesional serta diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat lainnya. Untuk mendapatkan aparat yang profesional tersebut diperlukan kualitas sumber daya aparatur yang sesuai dengan tuntutan organisasi. Sampai saat ini

Pemerintah Kabupaten Karo belum optimal dalam dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, disebabkan belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Karo yang masih bernilai C serta belum tersusunnya Grand design Reformasi Birokrasi Kabupaten Karo

2. Pembinaan pemuda dan olahraga;

Permasalahan dalam mendukung olahraga di Kabupaten Karo yaitu masih minimnya sarana dan prasarana olahraga antara lain keberadaan klub olahraga dan minat masyarakat untuk berolahraga tidak diiringi dengan pembangunan sarana olahraga dimana Kabupaten Karo belum memiliki gedung olahraga. Permasalahan dari bidang pemuda belum adanya data potensi kepemudaan sehingga perencanaan pembangunan kepemudaan kurang maksimal, seperti pemberdayaan untuk peningkatan kewirausahaan pemuda.

3. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas SDM;

Berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 sebesar 2,00% dan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya. Diperkirakan pada tahun 2030 Indonesia seperti Kabupaten Karo akan mengalami bonus demografi yakni usia produktif lebih banyak dari pada usia non produktif. Untuk itu dengan demikian usia kerja perlu di dikelola pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja supaya tidak terjadi pengangguran besar.

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan umum;

Pembangunan harus dirasakan oleh semua golongan penduduk. Penduduk miskin dengan ketidakberdayaan sulit menjangkau fasilitas pelayanan umum misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan dll. Oleh karena itu dibutuhkan program kegiatan yang mendekatkan masyarakat miskin dengan pembangunan sehingga hak-hak penduduk miskin bisa dipenuhi pemerintah

5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal;

Pembangunan ekonomi perlu mendapatkan akselerasi di tengah kondisi perekonomian global yang kurang kondusif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo sebesar 4,55 persen mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya akibat melambatnya produksi tanaman hortikultura tahunan dan pertumbuhan global yang lesu. Dari waktu ke waktu, sektor pertanian menjadi sektor dominan pembentuk struktur produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Karo, dengan kondisi tersebut menjadikan sektor pertanian juga menjadi sektor dominan yang menyerap tenaga kerja. Untuk itu, kedepan akan terus dilanjutkan upaya serius dalam rangka menggairahkan dinamika perekonomian Kabupaten Karo melalui sektor pertanian dan sektor-sektor potensial lainnya dengan perpaduan kebijakan pengembangan SDM dan bauran inovasi teknologi yang akan meningkatkan kualitas dan produktivitas.

6. Peningkatan akses sanitasi;

Sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam SDGs maka seluruh masyarakat seharusnya sudah mendapat akses sanitasi yang layak. Akses sanitasi di Kabupaten Karo pada tahun 2018 masih sekitar 73,08%, jadi masih ada sekitar 27% masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi yang layak.

7. Peningkatan akses air minum;

Sama halnya dengan sanitasi, target akses air minum secara internasional, nasional maupun kabupaten Karo adalah 100% masyarakat mendapat akses air minum yang aman dan layak. Pada tahun 2018, baru sekitar 67,5% masyarakat Karo yang mendapat akses air minum layak, sisanya masih memanfaatkan air yang belum layak.

8. Pengurangan kawasan kumuh;

Hingga tahun 2018 masih ada sekitar 54,6 Ha kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Karo, sedangkan target adalah 0 Ha. Selain itu kawasan yang sudah ditangani juga harus tetap dijaga agar tidak menjadi kumuh.

9. Peningkatan konektivitas antar wilayah;
Konektivitas antar wilayah erat kaitannya dengan ketersediaan jalan dan transportasi. Kondisi jalan mantap di Kabupaten Karo pada tahun 2018 adalah sekitar 61,35%. Artinya masih ada sekitar 40% jalan di kabupaten Karo yang kondisinya rusak terutama ke daerah-daerah pinggiran. Selain itu, sektor transportasi juga masih menemui kendala di Kabupaten Karo. Ke daerah pinggiran ketersediaan transportasi umum masih sangat terbatas, akan tetapi di daerah perkotaan banyak ditemui titik-titik kemacetan.
10. Peningkatan ketersediaan rumah layak huni;
Di Kabupaten Karo, ketersediaan rumah layak huni hingga tahun 2018 sudah mencapai 94,4%. Akan tetapi akibat penambahan penduduk maka ketersediaan rumah layak huni ini akan tetap menjadi isu strategis di Kabupaten Karo ke depan.
11. Peningkatan irigasi dalam kondisi baik;
Kondisi irigasi dalam kondisi baik hanya sekitar 46,70%. Kondisi ini diperparah akibat banyaknya alih fungsi lahan pertanian basah menjadi lahan pertanian kering di beberapa Daerah Irigasi Kabupaten Karo. Untuk meningkatkan ketahanan pangan maka peningkatan kualitas maupun kuantitas jaringan irigasi tersebut harus ditingkatkan.
12. Peningkatan dan pengembangan destinasi wisata dan pemasarannya;
Lemahnya daya saing pariwisata diindikasikan dengan penurunan jumlah kunjungan, lama kunjungan dan penurunan pendapatan daerah melalui sektor tersebut pada berbagai daerah tujuan wisata di Kabupaten Karo. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisata sebanyak 530.252 orang, turun dibandingkan tahun 2017 sebanyak 558.317 orang. Penurunan daya saing kunjungan wisatawan dapat disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas, amenities, atraksi dan aktivitas serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana destinasi pariwisata.
13. Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif;
Pada tahun 2018 jumlah investor di Kabupaten Karo terjadi peningkatan menjadi 64 investor meningkat dari tahun 2017

sebesar 62 investor. Iklim investasi terus ditingkatkan melalui kerjasama dibidang penanaman modal, promosi invesati dan daya tarik serta daya dukung invesatasidaguntuk meningkatkan jumlah investasi dan penyerapan tenaga kerja

14. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

Pada tahun 2018, persentase koperasi aktif sebanyak 65,89 persen angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 34,11 persen koperasi yang tidak aktif sehingga perlu peningkatan lebih lanjut. Demikian halnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan bagian yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin berkembangnya Koperasi dan UMKM maka semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Pemerintah harus tetap mendukung tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UMKM melalui berbagai program dan kegiatan yang inovatif dan kreatif

15. Peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup, perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak;

Pengarusutamaan Gender merupakan agenda pembangunan nasional. Dalam pengarusutamaan gender dibuat strategi agar semua golongan masyarakat dapat berpartisipasi dan menikmati pembangunan. Peningkatan kualitas hidup, partisipasi, serta adanya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi indikator pembangunan pengarusutamaan gender. Permasalahan yang ada di Kabupaten Karo antara lain masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan aksesibilitas terhadap sumberdaya ekonomi hal ini terlihat masih rendahnya jumlah perempuan yang menempati jabatan khususnya eselon 2 di pemerintahan, selanjutnya adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

16. Pengembangan agrobisnis, agroindustri dan ketahanan pangan yang berkelanjutan;

Pengembangan agrobisnis, agroindustri dan ketahanan pangan yang berkelanjutan; dan

Sesuai dengan potensi Kabupaten Karo pada sektor pertanian maka pengembangan usaha atau bisnis yang berbasis pada pertanian atau bidang-bidang lain yang mendukungnya sehingga dapat menghasilkan produk pertanian yang mempunyai nilai tambah dan berdaya saing tinggi. Disamping itu, ketersediaan pangan merupakan sub sistem ketahanan yang cukup penting. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2018 ketersediaan pangan utama sebesar 100 persen artinya kondisi ketersediaan pangan di Kabupaten Karo tersedia dari hasil produksi, cadangan pangan, serta pemasukan pangan. Masyarakat Kabupaten Karo masih sangat tergantung pada beras sebagai bahan pangan utama. Untuk itu, diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk minimalisasi konsumsi beras juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga nutrisi yang diterima oleh tubuh dapat bervariasi dan seimbang. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang meningkat, perubahan iklim, dan kondisi geografis yang ekosistemnya tidak selalu sesuai untuk budidaya padi akan menimbulkan kerentanan dimasa yang akan datang sehingga perlu untuk terus diperhatikan.

17. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pembangunan dengan memperhatikan isu keseimbangan lingkungan, saat ini menjadi titik fokus dalam pembangunan global. Kualitas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program-program perencanaan pembangunan.

18. Peningkatan ketaatan terhadap rencana tata ruang

Hingga tahun 2018, RTRW Kabupaten Karo belum ditetapkan, sehingga pengendalian penggunaan lahan masih belum optimal. Hal ini menyebabkan masih banyak alih guna lahan atau penggunaan lahan yang mungkin tidak sesuai di wilayah Kabupaten Karo.

19. Pengurangan Indeks Risiko Bencana;

Indeks Risiko Bencana merupakan salah satu indikator ketahanan daerah untuk menghadapi bencana baik bencana alam maupun bencana non alam. Akibat tingginya bahaya bencana di Kabupaten Karo terutama bahaya Gunung Api dan tanah longsor, kebakaran hutan bahkan bencana non alam seperti wabah penyakit, maka kapasitas daerah harus ditingkatkan.

20. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada saat ini begitu pesat termasuk di Kabupaten Karo. Perkembangan ini seperti dua mata pisau yang bisa saja menguntungkan dan bisa saja merugikan. Pemerintah Kabupaten Karo harus dapat memanfaatkan TIK tersebut untuk membantu mempercepat pembangunan.

Tabel 3.3.
Sinkronisasi Isu Strategis Internasional, Nasional, Regional,
dan Kabupaten Karo

No.	Internasional	Nasional	Regional	Kabupaten Karo
1.	Mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan	Mengurangi jumlah penduduk		Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas SDM
2.	Mencapai pendidikan dasar untuk semua	Meningkatkan kualitas penduduk seperti pendidik, kesehatan dan lingkungan		Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas SDM
3.	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan akan mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan kehidupan sumberdaya manusia serta peningkatan kehidupan anak.	Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No.	Internasional	Nasional	Regional	Kabupaten Karo
4.	Menurunkan angka kematian bayi	Menurunkan angka kematian bayi		Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas SDM
5.	Menurunkan angka kematian ibu akibat melahirkan	Menurunkan angka kematian ibu melahirkan		Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas SDM
6.	Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya	Menurunkan angka kesakitan dan kematian		Pembinaan pemuda dan olahraga
7.	Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketersediaan energi	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara tepat		Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
8.	Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan			Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal
9.		Menurunkan pertumbuhan penduduk		Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10.		Pembangunan jatidiri bangsa Indonesia seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air.		Peningkatan dan pengembangan destinasi wisata dan pemasarannya.
11.		Peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif.
12	Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatkan rumah tangga ber-sanitasi	Meningkatkan akses sanitasi	Peningkatan akses sanitasi

No.	Internasional	Nasional	Regional	Kabupaten Karo
13	Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatkan Persentase Penduduk berakses air minum	Meningkatkan akses air minum	Peningkatan akses air minum
14	Mengurangi persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Mengurangi Lingkungan pemukiman kumuh	Mengurangi pemukiman dan perumahan kumuh	Pengurangan kawasan kumuh
15	Pengembangan konektivitas dan transportasi	Peningkatan konektivitas wilayah	Meningkatkan aksesibilitas dan kesenjangan wilayah	Peningkatan konektivitas antar wilayah
16	Meningkatkan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Meningkatkan Rumah Layak Huni	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Peningkatan ketersediaan rumah layak huni
17.	Menurunkan angka kelaparan	Modernisasi irigasi dan waduk multifungsi wilayah	Peningkatan daya saing sektor agraris	Peningkatan irigasi dalam kondisi baik
18.		Pemerataan pembangunan	Kesenjangan ekonomi antar daerah dan pemerataan pendapatan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal
19.		Mendukung ketahanan pangan di daerah, mendorong sektor produksi serta mendukung pengembangan wilayah		Pengembangan agrobisnis, agroindustri dan ketahanan pangan yang berkelanjutan
20.		Meningkatkan profesionalisme birokrasi		Reformasi birokrasi serta profesionalisme aparatur.

No.	Internasional	Nasional	Regional	Kabupaten Karo
21.		Rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem	Peningkatan ketaatan terhadap rencana tata ruang;
22.			Pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan	Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan umum
23.			Pengembangan Koperasi, UKM dan Sektor Informal	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal
24.				Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
25	Pengurangan Indeks Risiko Bencana	Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana	Pengurangan Indeks Risiko Bencana
26.	Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi

Visi Kabupaten Karo Tahun 2025 merupakan rumusan umum yang menggambarkan kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan jangka panjang, yakni dalam jangka waktu 2005-2025. Visi bukanlah mimpi atau serangkaian harapan semata, namun suatu komitmen dan upaya dalam merancang serta mengelola perubahan dan peluang, serta mengantisipasi tantangan masa depan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan. Visi harus didasarkan pada realita dan harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Visi Kabupaten Karo Tahun 2025 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi cita-cita bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, visi dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah untuk menemukan perwujudan visi.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 yang telah disepakati adalah:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL

Pilihan pada visi di atas didasarkan pada situasi dan kondisi Daerah Kabupaten Karo serta komitmen yang kuat dari para pelaku pembangunan di daerah untuk merealisasikan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas rencana pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Visi Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2005–2025 ini adalah landasan bagi tahap pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemajuan, keadilan, keamanan dan ketentraman yang ingin dicapai.

Perumusan visi di atas dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Perumusan Visi

No.	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Maju	Standar Hidup Relatif Tinggi	Terwujudnya Masyarakat Karo yang Maju, Mandiri dan Adil
		Teknologi Tinggi	
		Ekonomi yang merata	
		Perkapita tinggi	
2.	Mandiri	Mampu	
		Tahan	
		Merdeka	
3.	Adil	Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat	
		Tidak ada diskriminasi	
		Kesempatan yang sama	

Visi di atas dapat dijelaskan seperti disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2.
Penjelasan Visi

No.	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Kondisi 2019	Target 2025	PENJELASAN
1.	Maju	Standar Hidup Relatif Tinggi	Angka harapan hidup	70,97 tahun	71,3 tahun	Usia harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Indikator umur harapan hidup dapat dilihat dari umur panjang dan hidup sehat yang mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan.
			Pendapatan Per Kapita	Rp. 33.548.970**	Rp38.669.630	Produk Domestik Regional Bruto Daerah dibagi dengan jumlah penduduk
		Teknologi Tinggi	SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	1,9 (Rendah)	2,2 (Cukup)	Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat

No.	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Kondisi 2019	Target 2025	PENJELASAN
			Indeks Daya Saing Daerah	3,0745 (Sedang)	6,5000 (Tinggi)	Penilaian Indeks Daya Saing terdiri dari 78 indikator yang terdiri dari 4 aspek, antara lain Aspek Faktor Penguat, SDM, Pasar dan ekosistem inovasi.
			BlankSpot	21	0	Kondisi saat ini terdapat 21 desa di Kabupaten Karo yang belum terlayani jaringan telekomunikasi
		Ekonomi yang merata	Gini Ratio	0,27**	< 0,3	Gini Ratio merupakan angka yang menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan perkapita. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. $G < 0,3$ = ketimpangan rendah, $0,5 \geq G \geq 0,3$ = ketimpangan sedang, $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi
2.	Mandiri	Mampu	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,5%	1,35%	(Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja (15-65 tahun)/ jumlah penduduk angkatan kerja) x 100%

No.	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Kondisi 2019	Target 2025	PENJELASAN
			Angka Kemiskinan	8,67%	7,5%	Menurut BPS kemiskinan adalah kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak baik makanan maupun nonmakanan. Garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya
		Tahan	Pertumbuhan ekonomi	4,55	5,0 - 5,5%	Pertumbuhan ekonomi adalah persentase perbandingan PDRB tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya
		Merdeka	PAD	Rp. 159.189.197.472,28**	Rp173.146.200.742	Pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Kondisi 2019	Target 2025	PENJELASAN
3.	Adil	Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat	Tahapan perencanaan (keterlibatan masyarakat)	100%	100%	Telah dibangun parameter perencanaan pembangunan yang dimulai dari desa sampai ke tingkat kabupaten
		Tidak ada diskriminasi	Indeks Pembangunan Gender	96,27% (tinggi)	96,31%	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui pembangunan manusia. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

No.	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator	Kondisi 2019	Target 2025	PENJELASAN
		Kesempatan yang sama	Anugrah Peduli HAM	PEDULI HAM	Menerima Anugrah Peduli HAM	Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM ditetapkan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil Pemerintah daerah. Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya: a. hak atas kesehatan; b. hak atas pendidikan; c. hak perempuan dan anak; d. hak atas kependudukan; e. hak atas pekerjaan; f. hak atas perumahan yang layak; dan g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan

Terkait visi Kabupaten Karo Tahun 2025 yaitu: **Terwujudnya Masyarakat Karo yang Maju, Mandiri dan Adil Tahun 2025** memiliki peran terhadap perwujudan visi Nasional Tahun 2025, yaitu: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, serta visi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, yaitu: Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan di dalam Kebhinekaan, sebagaimana tercantum dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Keterkaitan Sasaran Visi RPJPD Nasional, Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara, dan Visi Kabupaten Karo

No.	Sasaran Visi RPJP Nasional	Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara	Sasaran Visi Kabupaten Karo
1.	Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kedaulatan Negara dari Ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman yaitu masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat yang mengamalkan ajaran agamanya dengan sepenuh hati, konsisten dan konsekuen, masyarakat yang memiliki sikap yang kuat untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama pemeluk agama dalam bingkai keluarga besar masyarakat Sumatera Utara.	Maju: Terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, dan kualitas pendidikan yang tinggi; masyarakat dengan produktivitas yang tinggi; daerah yang memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi; lembaga politik dan kemasyarakatan serta hukum yang fungsional secara mantap
2.	Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang maju, yaitu masyarakat yang berpengetahuan dan sadar akan supremasi hukum serta selalu menggunakan nurani dan akal sehat dalam mengambil keputusan, dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan global, namun tetap mempertahankan identitas masyarakat Sumatera Utara yang majemuk.	

No.	Sasaran Visi RPJP Nasional	Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara	Sasaran Visi Kabupaten Karo
3.	Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang mandiri serta percaya diri, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan karenanya dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat itu sendiri.	Mandiri: Terwujudnya ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh modal sosial yang melembaga dalam sikap dan perilaku sehari-harinya
4.	Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang mapan yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara berimbang jasmani dan rohani, memiliki daya tahan terhadap pengaruh luar yang bersifat merusak, mampu meningkatkan kualitas kehidupannya termasuk lingkungan hidup yang semakin layak dengan tingkat kesenjangan yang semakin kecil.	
5.	Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera	Terwujudnya masyarakat yang berkeadilan di dalam kebhinekaan yaitu masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban atau proporsional dalam lingkup masyarakat yang hidup secara harmonis, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan atau terlupakan.	Adil: Terwujudnya kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan dan mempertahankan Negara, serta mendapatkan
6.	Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan	Tata pemerintahan yang baik atau <i>good governance</i> menganut prinsip-prinsip akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektifitas, transparansi, kesetaraan, wawasan kedepan, partisipasi dan penegakan	

No.	Sasaran Visi RPJP Nasional	Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara	Sasaran Visi Kabupaten Karo
		hukum.	perlindungan dan kesamaan di depan hukum bagi semua rakyat.
7.	Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia dan internasional		
8.	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.		

4.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum tentang upaya atau pilihan jalan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah. Perwujudan visi melalui misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi. Misi merupakan hal yang penting untuk dirumuskan dalam rangka membantu menggambarkan visi secara lebih jelas dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapainya. Misi dalam RPJPD harus mampu menaungi tema pembangunan dalam 4 tahap selama 20 tahun.

Perumusan misi merupakan suatu upaya dalam rangka menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah untuk mengembangkan program-program prioritas dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisiensi dan terukur. Dalam menyusun misi pembangunan jangka panjang daerah, perlu disusun pendefinisian visi terlebih dahulu menjadi pokok-pokok visi. Pokok-pokok visi disusun dengan memperhatikan pemangku kepentingan yang menjadi pelaku dan terkena dampak pelaksanaan pembangunan.

Adapun misi pembangunan daerah Kabupaten Karo tahun 2005-2025 untuk mewujudkan Kabupaten Karo yang maju, mandiri dan adil adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Mewujudkan pemerintahan yang profesional sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala sisi sesuai dengan porsi objek, bersifat terus-menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang relatif singkat. Untuk mempertahankan kehidupan dan kedinamisan organisasi mau tidak mau harus adaptif terhadap perubahan organisasi. Birokrasi yang mampu bersaing di masa mendatang adalah birokrasi yang memiliki sumber daya manusia berbasis pengetahuan dengan berbagai keterampilan dan keahlian.

Mewujudkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur pemerintahan yang responsif dan berkualitas sesuai harapan masyarakat, juga merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kondisi seperti ini, kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan, khususnya pelayanan yang paling dasar. Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan relevansi kebijakan dengan aspirasi masyarakat dan untuk percepatan pembudayaan pertanggungjawaban kinerja.

2. Membangun sistem dan koordinasi yang mantap dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana pada hakikatnya merupakan upaya kemanusiaan untuk melindungi dan menyelamatkan manusia sebagai sumber daya pembangunan dari ancaman bencana. Disamping itu, penanggulangan bencana juga merupakan upaya kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembalikan kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana serta memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Untuk itu, perlu membangun sistem dan koordinasi yang mantap. Dengan adanya sistem dan koordinasi yang mantap, usaha penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat selesai pada waktunya, sertasemua lembaga yang terkait dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal dalam rangkap pencapaian tujuan akhir.

3. Memberdayakan potensi sumber daya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Memberdayakan potensi sumber daya lokal merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran yang ditekankan pada sektor riil berbasis potensi aktual kawasan. Memberdayakan potensi sumber daya lokal berarti menekankan pada upaya pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai dengan jasa pelayanan dan upaya-upaya inovasi pengembangannya dalam bentuk: upaya penggalian sumber daya potensial, pengembangan industri, perdagangan, jasa serta investasi lainnya yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Memberdayakan potensi sumber daya lokal diarahkan kepada pola pengembangan dan pengelolaan sumberdaya yang meliputi energi, sumber daya dan mineral yang ada di Kabupaten Karo yang spesifik yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Pemberdayaan potensi sumberdaya lokal

berorientasikan pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah

Ketersediaan sarana dan prasarana umum adalah komponen yang sangat menentukan daya saing wilayah Kabupaten Karo. Ketersediaan sarana dan prasarana umum akan meningkatkan tingkat pengembalian investasi sehingga minat berinvestasi dapat ditingkatkan dan direalisasikan secara lebih baik. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, integratif dan komprehensif, maka komponen biaya dari usaha baru maupun usaha yang telah berdiri dapat diturunkan sehingga daya saing produk/jasa yang dihasilkan dapat ditingkatkan. Bagi masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana umum merupakan faktor vital dalam peningkatan kenyamanan hidup.

5. Membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan pemuda dan masyarakat dalam lingkup pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, keluarga berencana dan pengentasan kemiskinan

Misi ini diharapkan dapat mencapai:

Terwujudnya kualitas kehidupan pemuda dan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik didukung dengan kualitas dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan.

Terwujudnya kualitas manajemen pelayanan kependudukan dan keluarga kecil yang berkualitas serta adanya distribusi alokasi penduduk yang seimbang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya pembangunan bidang ketenagakerjaan, perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja produktif, dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur, baik di perdesaan maupun perkotaan serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Disamping itu, harus diciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha serta perlindungan

tenaga kerja. Tabel 4.4 menjelaskan Sinkronisasi Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo dengan Misi Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.4.
Sinkronisasi Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo dengan Misi Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Sumatera Utara

Misi RPJP Nasional	Misi RPJP Provinsi Sumatera Utara	Misi RPJPD Kabupaten Karo
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Memperkuat akhlak dan moral penyelenggara pemerintahan dan pelaku ekonomi masyarakat melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah
Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu	Memantapkan sistem pembinaan aparatur pemerintahan yang berkualitas, menekan peluang KKN untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat madani.	
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	Mendorong tumbuhnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.	Memberdayakan potensi sumber daya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Mewujudkan Indonesia asri dan lestari	Memantapkan prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah, meminimumkan kesenjangan ketersediaan prasarana dan sarana antar wilayah melalui	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah

Misi RPJP Nasional	Misi RPJP Provinsi Sumatera Utara	Misi RPJPD Kabupaten Karo
	kerjasama antar wilayah, kerjasama pemerintah daerah dan swasta serta kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga ditingkat regional dan tingkat internasional.	
Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	Memantapan sendi-sendi pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agriondustri, kepariwisataan serta sektor unggulan lainnya melalui pembangunan Kawasan Agropolitan maupun Kawasan Agropolitan untuk merangsang investasi dalam dan luar negeri yang memanfaatkan sumberdaya alam lokal secara berwawasan lingkungan.	Membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan pemuda dan masyarakat dalam lingkup pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, keluarga berencana dan pengentasan kemiskinan
		Membangun sistem dan koordinasi yang mantap dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Karo dapat disajikan dalam tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5.
Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Karo

VISI	MISI
Terwujudnya Masyarakat Karo yang Maju, Mandiri dan Adil	Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih, Profesional Dan Responsif Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah
	Membangun sistem dan koordinasi yang mantap dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana
	Memberdayakan potensi sumber daya alam lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah
	Membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan pemuda dan masyarakat dalam lingkup pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, keluarga berencana dan pengentasan kemiskinan

4.3. Tujuan

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karo Tahun 2005–2025 dijabarkan dari setiap misi seperti terlihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Sinkronisasi antara Tujuan RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025

Tujuan RPJPN	Tujuan RPJPD Provinsi Sumatera Utara	Tujuan RPJPD Kabupaten Karo
mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Menumbuhkan daya saing Sumatera Utara dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan memberdayakan potensi sumber daya lokal
	Mewujudkan Sumatera Utara yang demokratis dan berdasarkan hukum	Mewujudkan Pemerintahan Profesional dan Responsif
	Mewujudkan rasa aman dan damai bagi masyarakat dan perlindungan terhadap	Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan

Tujuan RPJPN	Tujuan RPJPD Provinsi Sumatera Utara	Tujuan RPJPD Kabupaten Karo
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat	masyarakat dalam lingkup pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, keluarga berencana dan pengentasan kemiskinan
	Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang terintegrasi dan komprehensif untuk meningkatkan daya dukung pembangunan daerah
	Mewujudkan Sumatera Utara yang asri dan lestari di seluruh wilayah termasuk Di pedesaan	
	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermoral, beretika dan berbudaya.	Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam lingkup pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, keluarga berencana dan pengentasan kemiskinan

Keterkaitan antara visi, misi dan tujuan dari RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 dapat dijelaskan seperti tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7
Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan RPJPD
Kabupaten Karo Tahun 2005-2025

Visi	Misi	Tujuan
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL	Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih, Profesional Dan Responsif Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah	Mewujudkan Pemerintahan Profesional dan Responsif
	Membangun sistem dan koordinasi yang mantap dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terintegrasi
	Memberdayakan potensi sumber daya alam lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan memberdayakan potensi sumber daya lokal
	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang terintegrasi dan komprehensif untuk meningkatkan daya dukung pembangunan daerah
	Membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan pemuda dan masyarakat dalam lingkup pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, keluarga berencana dan pengentasan kemiskinan	Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam lingkup pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, keluarga berencana dan pengentasan kemiskinan

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penentuan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karo yang Maju, Mandiri dan Adil. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pokok guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Pentahapan pembangunan dalam RPJPD dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan kepala daerah, yaitu setiap 5 (lima) tahun. Dengan demikian dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, terdapat 4 (empat) tahapan pembangunan yang harus disusun oleh pemerintah daerah.

Penentuan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan proses pendefinisian visi dan misi menjadi tahapan dan prioritas pembangunan per lima tahun selama 20 (dua puluh) tahun untuk memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah agar lebih terarah ke pencapaian tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah ini juga merupakan pedoman untuk menyusun RPJMD serta dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam proses penentuan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang merupakan penurunan dari visi, misi dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Karo. Pengidentifikasi sasaran pokok dilaksanakan untuk menentukan

kondisi target yang ingin dicapai per tahapan pembangunan dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target tersebut.

5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun I (Tahun 2006 – 2010)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada tahap sebelumnya, arah pembangunan Kabupaten Karo untuk lima tahun pertama (RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2006-2010) diarahkan untuk:

1. Melaksanakan Revitalisasi dan Intensifikasi Pertanian
2. Melaksanakan Pelestarian Sumber Daya Alam terutama Pengelolaan Hutan
3. Meningkatkan daya saing produk pertanian melalui Pertanian organik dan program Agropolitan Dataran Tinggi
4. Mengembangkan Peternakan, Perikanan dan Perkebunan.
5. Menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta dalam dan luar negeri melalui BUMD dalam pengembangan agribisnis, agropolitan, dan pariwisata.
6. Menjalinkan kerjasama dengan pihak luar guna meningkatkan kemampuan teknologi, pengembangan jaringan informasi usaha kerjasama/kemitraan untuk membangun pasar bagi produksi pertanian dan pariwisata Kabupaten Karo.
7. Mengembangkan potensi wisata yang berwawasan budaya, agrowisata, ekowisata serta meningkatkan kehandalan sarana dan prasarana sekaligus peningkatan manajemen pengelolanya.
8. Memberikan kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata serta mengadakan promosi pariwisata.
9. Pembangunan industri kecil dan menengah yang memiliki daya saing tinggi.
10. Pembangunan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
11. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
12. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup.
13. Peningkatan pembangunan perdesaan.

14. Percepatan pembangunan dan penataan ruang wilayah.
15. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
16. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, kualitas aparatur pemeritahan dan kualitas masyarakat karo.
17. Peningkatan kualitas prasarana dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
18. Pembangunan SDM melalui olahraga dan kesenian serta pengenalan budaya.
19. Peningkatan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi.
20. Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas.
21. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
22. Menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama.
23. Mengurangi tingkat pengangguran melalui penyebarluasan informasi tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.
24. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.
25. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana jalan kolektor dan jalan kecamatan di seluruh Kabupaten Karo.
26. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana dasar pemukiman.
27. Pembangunan sarana dan prasarana irigasi.
28. Pembangunan/pembukaan jaringan jalan ke sentra-sentra produksi pertanian.
29. Pembangunan dan pengembangan sistem transportasi lokal.
30. Pembangunan pusat kawasan agropolitan Merek untuk mendukung peningkatan usaha pertanian Kabupaten Karo.
31. Pembangunan bangunan-bangunan penunjang pengembangan/penangkar bibit tanaman dan pelatihan pertanian.
32. Pembangunan silo-silo penampungan dan pengeringan hasil produksi jagung.

33. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang peternakan di Kabupaten Karo.
34. Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
35. Melestarikan nilai-nilai Budaya Karo tanpa menutup diri dari budaya luar yang bersifat positif.
36. Meningkatkan peran serta tokoh agaman dan rohaniawan dalam pembangunan kemasyarakatan.
37. Meningkatkan kesadaran publik masyarakat berdasarkan nilai-nilai demokrasi.
38. Penegakan supremasi hukum.

5.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun II (2011 – 2015)

Arah kebijakan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus tercapai. Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus atau prioritas capaian dari waktu ke waktu. Mengingat bahwa semua program adalah merupakan kesinambungan dalam rangka penuntasan maka umumnya program yang ada dimulai dari tahun pertama yakni tahun 2011. Beberapa program tetap diteruskan sampai dengan tahun 2015 namun ada juga program yang hanya dilaksanakan dalam satu atau dua tahun. Arah kebijakan untuk pembangunan Kabupaten Karo tahun 2011-2015 ditetapkan sebagai berikut:

1. Melakukan penataan ulang birokrasi pemerintah daerah secara berkelanjutan.
2. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan pendukungnya yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar.

5.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun III (2016 – 2021)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan arah pembangunan lima tahun kedua (RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2011-2016), maka pembangunan lima tahun ketiga (RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2020), diarahkan untuk:

Misi I untuk Sasaran Pokok Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Karo Yang Sehat, Cerdas, Beriman, Bermoral, Beretika dan Berbudaya, arah kebijakannya adalah:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, keolahragaan, arsip dan perpustakaan
2. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan
3. Penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun yang bermutu.
4. Pembinaan pendidikan non-formal, informal dan masyarakat.
5. Pemenuhan dan Pemerataan guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
6. Pemberian insentif bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah terpencil, terluar dan perbatasan.
7. Pelaksanaan pembinaan karir, peningkatan kompetensi, kualifikasi dan pengembangan profesi bagi guru dan tenaga kependidikan.
8. Pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi.
9. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga-lembaga riset, swasta dan dunia usaha.
10. Peningkatan penyelenggaraan dan keikutsertaan siswa dalam perlombaan bidang pendidikan.
11. Perintisan sekolah unggulan
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kesehatan.
13. Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta penyelenggaraan sistim jaminan kesehatan.
14. Pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.
15. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil terluar dan perbatasan.
16. Pemberdayaan perempuan dalam mendorong peningkatan ekonomi keluarga.
17. Penyediaan ruang terbuka publik bagi masyarakat.
18. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

19. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, rukun dan damai.
20. Peningkatan kearifan lokal Budaya Karo (penggunaan produk, bahasa, etika, runggu/musyawarah).

Misi II untuk Sasaran Pokok Terwujudnya peningkatan daya saing Kabupaten Karo melalui sektor unggulan (pertanian dan pariwisata) yang berwawasan lingkungan adalah:

1. Pemantapan swasembada pangan melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan.
2. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pertanian.
3. Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM sektor Pertanian.
4. Peningkatan Kemampuan dan jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian.
5. Menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit.
6. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
7. Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak.
8. Peningkatan akses permodalan.
9. Pengembangan pemasaran hasil pertanian.
10. Pengembangan sarana dan prasarana wisata, budaya, seni dan sejarah yang berwawasan lingkungan.
11. Peningkatan sadar wisata
12. Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata
13. Peningkatan penyelenggaraan even wisata bernuansa budaya dan promosi pariwisata.
14. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif.
15. Peningkatan akses permodalan UMKM dan Koperasi.
16. Pengembangan produk dan pemasaran bagi UMKM dan Koperasi.
17. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
18. Peningkatan kerjasama dan promosi investasi
19. Menurunkan kasus lingkungan
20. Regulasi daerah terkait pembangunan berkelanjutan.

Misi III untuk Sasaran Pokok Terwujudnya infrastruktur wilayah untuk meningkatkan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) adalah:

1. Merencanakan program dan kegiatan infrastruktur jalan, sumber daya air dan perhubungan.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan aspek pemerataan dan kewilayahan
3. Mewujudkan tataran transportasi lokal (TATRALOK)
4. Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Misi IV untuk Sasaran Pokok Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum adalah:

1. Menata kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efektif, efisien serta peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah
2. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan *e-government*
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Peningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara.
5. Meningkatkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
7. Menggali potensi PAD
8. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

Misi IV untuk Sasaran Pokok Terwujudnya peningkatan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah:

1. Mengikuti sertakan publik (*stakeholder*) dalam pembangunan daerah.
2. Peningkatan kualitas perencanaan daerah
3. Peningkatan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender
4. Revitalisasi program KB untuk menurunkan tingkat kelahiran dan menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.

Misi V Untuk Sasaran Pokok Meningkatnya Kemampuan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan dan Pengelolaan Bencana adalah:

1. Peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur penanggulangan bencana.
2. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan dan pengelolaan bencana.
3. Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat.
4. Peningkatan koordinasi dan penanganan upaya mitigasi pengurang resiko bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

5.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun IV (2022 – 2025)

Arah kebijakan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus tercapai. Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus atau prioritas capaian dari waktu ke waktu. Mengingat bahwa semua program adalah merupakan kesinambungan dalam rangka penuntasan maka umumnya program yang ada dimulai dari tahun keempat yakni tahun 2022. Beberapa program tetap diteruskan sampai dengan tahun 2025 namun ada juga program yang hanya dilaksanakan dalam satu atau dua tahun. Arah kebijakan untuk pembangunan Kabupaten Karo tahun 2022-2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan.
2. Penurunan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Karo.
3. Mengimplementasikan arah kebijakan *Grand Design* Kependudukan Kabupaten Karo tahun 2019 - 2043.
4. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan.
5. Mempertahankan predikat kabupaten peduli HAM dengan peningkatan nilai yang masih belum maksimal.
6. Peningkatan kualitas pendidikan.
7. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
8. Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah.

9. Meningkatkan Pembinaan Olahraga dan Kepemudaan, Sarana dan Prasarana dan Partisipasi pemuda dalam Pembangunan.
10. Peningkatan akses air minum dan sanitasi.
11. Peningkatan infrastuktur irigasi.
12. Penyusunan Perda Keruangan.
13. Peningkatan sistem drainase yang terintegrasi.
14. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
15. Peningkatan dan pencegahan permukiman kumuh.
16. Penataan dan Pengelolaan TPU.
17. Meningkatkan Peluang Kesempatan Kerja.
18. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui peningkatan kualitas SDM serta pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
19. Meningkatkan Kualitas Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan yang Berkelanjutan
20. Meningkatkan ketersediaan lahan untuk fasilitas pemerintah dan umum.
21. Meningkatkan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
22. Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan.
23. Peningkatan kompetensi Perangkat Desa.
24. Peningkatan Pendapatan Asli Desa.
25. Peningkatan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
26. Meningkatkan Penggunaan SPBE.
27. Meningkatkan akses layanan telepon dan internet.
28. Meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi
29. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan serta Pelayanan Perpustakaan.
30. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kearsipan.
31. Peningkatan Mitigasi bencana lingkungan
32. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
33. Meningkatkan Kualitas Perdagangan.
34. Meningkatkan produksi Perikanan.

35. Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan.
36. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
37. Meningkatkan Birokrasi yang Unggul dan Inovatif.
38. Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan.
39. Mengembangkan ekosistem inovasi.
40. Pembangunan ruas jalan baru.

5.2. Sasaran Pokok

Suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20.

5.2.1. Sasaran Pokok Tahun 2006-2010

Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Karo yang maju, demokratis, beriman dan sejahtera dalam suasana kekerabatan Karo, dengan sasaran pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
Memperkuat ekonomi lokal dengan pengembangan produk unggulan daerah sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap sektor pertanian
2. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dengan Melaksanakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Melibatkan Masyarakat, Pemerintah dan Swasta.

Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Oleh karena itu segala bentuk pembangunan di Kabupaten Karo harus memperhatikan dari aspek lingkungan karena pembangunan membutuhkan sumber daya alam namun disamping itu terdapat resiko terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk itu peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah terus ditingkatkan untuk mewujudkan kesetaraan semua pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Meningkatnya investor yang berinvestasi di Kabupaten Karo.
Investasi merupakan salah satu bagian penting perekonomian Kabupaten Karo karena dapat menggerakkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Karo, sektor ini akan menciptakan multi efek yang sangat tinggi dalam perkembangan ekonomi sehingga pemerintah daerah berupaya untuk dapat menciptakan iklim investasi yang baik melalui penguatan regulasi, ketersediaan SDM dan infrastruktur pendukung.
4. Terciptanya Pusat Kawasan Agropolitan Merek untuk mendukung peningkatan usaha pertanian Kabupaten Karo.
Mendukung kebijakan untuk melakukan pengembangan perdesaan melalui konsep pengembangan agropolitan di Merek.
5. Meningkatnya percepatan pembangunan dan penataan ruang wilayah.
Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, drainase, irigasi, air minum, air limbah, perumahan dan juga infrastruktur perhubungan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Oleh karena itu pembanguna infrastruktur tersebut harus dipercepat. Selain itu pengaturan penggunaan ruang juga harus disusun seperti Rencana Tata Ruang (RTRW) agar proses perizinan dapat diatur.
6. Terlaksananya pengembangan perencanaan pembangunan.
Pengembangan Perencanaan pembangunan perlu dilaksanakan agar tujuan program dan kegiatan tercapai dan tepat sasaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.
7. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.
Teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, perizinan dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi.
8. Meningkatnya data *content* situs resmi pemerintah daerah.
Sebagai salah satu jendela informasi Pemerintah Kabupaten Karo maka situs Pemkab Karo harus dikelola sebaik mungkin agar

dapat bermanfaat baik bagi masyarakat luas maupun bagi Pemerintah Daerah.

9. Terlaksananya pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana jalan kolektor dan jalan kecamatan di seluruh Kabupaten Karo.

Sarana dan prasarana jalan merupakan salah satu kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju lokasi suatu wilayah. Oleh karena itu pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana tersebut sangat diperlukan agar konektivitas wilayah tersebut dapat terjaga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

10. Terlaksananya pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti jalan, air bersih, drainase, perumahan, sanitasi dan pasar.

Sarana dan prasarana permukiman seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan juga merupakan kebutuhan dasar. Sarana dan prasarana ini harus dipelihara dan direhabilitasi agar tetap berfungsi.

11. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana irigasi.

Infrastruktur irigasi sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan. Sebagai salah satu sentra pertanian maka infrastruktur irigasi ini perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

12. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem transportasi lokal.

Pembangunan sistem transportasi lokal juga sangat diperlukan untuk menunjang konektivitas dan aksesibilitas suatu wilayah. Oleh karena itu pengembangan sistem transportasi lokal seperti pengaturan trayek dan rekayasa lalu lintas perlu ditingkatkan.

13. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hidup.

Peningkatan kualitas dan kuantitas hidup menunjukkan keberhasilan pembangunan yang dapat dilihat dari peningkatan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

14. Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum nilai-nilai budaya kemasyarakatan.
Peningkatan kualitas masyarakat harus ditandai dengan adanya keadilan hukum dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya karo.

5.2.2. Sasaran Pokok Tahun 2011-2015

Untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, disusun sasaran pembangunan Kabupaten Karo sebagai berikut:

1. Terciptanya struktur organisasi yang miskin struktur kaya fungsi.
Struktur organisasi yang kaya struktur terkadang tidak efektif justru sebaliknya dapat menjadi beban daerah karena anggaran pendapatan dan belanja daerah kebanyakan hanya untuk membiayai operasional. Sehingga dibutuhkan organisasi yang miskin struktur atau ramping tetapi memiliki kaya fungsi.
2. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang profesional.
Birokrasi yang unggul juga dapat dicapai dengan manajemen kepegawaian yang professional sehingga didapatkan ASN dengan kualitas yang handal dalam menjalankan roda pemerintahan.
3. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten.
Sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat sampai daerah sangat penting agar terjadi keselarasan pembangunan dan pemerintah daerah juga dapat menjabarkan dengan tepat arah pembangunan pemerintah pusat.
4. Tersedianya data dan informasi dasar pembangunan yang akurat.
Data dan informasi yang akurat dan terseida pada saat dibutuhkan akan dapat menentukan arah pembangunan daerah baik untuk jangka panjang, menengah dan pendek yang tepat sasaran. Data dan informasi minimal yang dibutuhkan adalah kondisi lima tahun terakhir.
5. Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan daya saing produk-produk pertanian di pasar lokal, regional, dan internasional.
Sektor pertanian merupakan sektor dominan yang menopang kehidupan masyarakat Kabupaten Karo, untuk itu untuk

meningkat daya saing produk pertanian di pasar lokal, regional, dan internasional perlu terus ditingkatkan melalui program-program dan kegiatan yang inovatif.

6. Berkembangnya sistem pertanian yang ramah lingkungan melalui penguatan sistem pertanian organik.

Penguatan sistem pertanian yang ramah lingkungan perlu terus didorong untuk menjamin pertanian berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan keanekaragaman ekosistem hayati, serta mempertahankan dan meningkatkan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pertanian ramah lingkungan dapat diwujudkan melalui penerapan pertanian organik. Dengan kata lain penguatan sistem pertanian organik dilakukan untuk menghindari pupuk anorganik, pestisida kimia dan hasil dari rekayasa genetic. Hal ini secara bertahap perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan pada sektor di Kabupaten Karo.

7. Terwujudnya kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata dan lingkungan hidup serta hutan yang lestari.

Kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata, lingkungan hidup serta hutan perlu untuk terus ditingkatkan melalui sinergitas dan kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola pariwisata terus dilakukan untuk meningkatkan manfaat sektor tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat, disamping itu pengelolaan lingkungan hidup serta hutan yang lestari dapat menjamin keberlangsungan alam di Kabupaten Karo.

8. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Untuk meningkatkan daya saing pariwisata perlu ditingkatkan pembenahan destinasi melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur pariwisata dalam rangka dukungan untuk pengembangan aksesibilitas, amenities dan fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Hal ini perlu untuk terus dikembangkan untuk menaikkan kunjungan wisata ke Kabupaten Karo.

9. Meningkatnya jumlah, pengeluaran, dan lama tinggal wisatawan. Sejalan dengan sasaran diatas maka Kabupaten Karo terus meningkatkan pengelolaan pada sektor pariwisata yang memiliki efek ganda terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan, pengeluaran dan lama tinggal maka Kabupaten Karo terus meningkatkan peran masyarakat, pengembangan aksesilitas, pengembangan amenities dan meningkatkan atraksi. Selain itu, Kabupaten Karo terus meningkatkan promosi pariwisata, menyediakan infrastruktur pendukung, meningkatkan layanan di destinasi serta meningkatkan kualitas SDM.
10. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan transportasi dan perhubungan untuk mendukung perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan wilayah. Sistem jaringan transportasi yang efisien akan sangat menguntungkan. Biaya transportasi yang murah akan sangat membantu untuk menurunkan biaya transportasi barang dan jasa.
11. Meningkatnya sistem pengelolaan air bersih. Air bersih sebagai kebutuhan dasar harus tersedia untuk setiap masyarakat. Oleh karena itu pembangunan sistem pengolahan air bersih khususnya bagi daerah yang rawan air harus ditingkatkan.
12. Meningkatnya pelayanan sanitasi berbasis masyarakat. Ketersediaan infrastruktur air limbah juga merupakan kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat. Akan tetapi dalam pembangunannya sering menemui kendala karena bersinggungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan sanitasi yang berbasis masyarakat perlu ditingkatkan.
13. Meningkatnya kualitas permukiman dan cakupan pelayanan dasar permukiman. Peningkatan kualitas permukiman dan pelayanan dasar permukiman seperti jalan lingkungan, drainase dan air limbah sangat diperlukan untuk mengurangi kekumuhan suatu permukiman.

14. Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan.

Salah satu masalah persampahan di Kabupaten Karo yaitu belum tersedianya pengadaan dan pengolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir yang layak. Jumlah sampah setiap tahun terus meningkat sejalan dan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat disertai juga kemajuan iptek yang mengakibatkan pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Untuk itu pengelolaan persampahan di Kabupaten Karo perlu untuk terus diperhatikan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

15. Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi.

Di Kabupaten Karo luas daerah irigasi cenderung menurun akibat alih fungsi lahan dari lahan basah menjadi lahan kering, sehingga ketersediaan tanaman padi cenderung menurun. Oleh karena itu untuk meningkatkan ketahanan pangan peningkatan luas daerah irigasi tersebut perlu dilakukan.

16. Meningkatnya pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan strategis, wilayah tertinggal, dan rawan bencana.

Kapasitas jalan dan jembatan sangat menentukan konektivitas suatu wilayah terutama di daerah strategis, tertinggal dan rawan bencana. Oleh karena itu peningkatan kapasitas jalan dan jembatan perlu ditingkatkan.

17. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan.

Untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar. Fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dilakukan melalui pembangunan/rehabilitasi puskesmas dan puskesmas pembantu

18. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pelayan dan pelayanan kesehatan.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara kuantitas harus memenuhi jumlah tenaga kesehatan menurut jumlah kebutuhan

penduduk disuatu wilayah dengan penempatan yang merata, begitu juga secara kualitas pelayanan dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan karena kualitas menjadi titik penting bagi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

19. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pola Hidup Bersih dan Sehat (HBS).

Perilaku hidup bersih dan sehat akan membuat masyarakat tidak mudah jatuh sakit, untuk hal tersebut didukung melalui program kegiatan promosi kesehatan yang mendorong masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan anggota rumah tangga untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dan berperan aktif dalam gerakan PHBS di masyarakat.

20. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pendapatan masyarakat sangat berpengaruh di dalam menentukan pola konsumsi masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka dapat mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kegiatan ekonomi masyarakat harus dapat dijaga dengan baik dan ditingkatkan melalui kegiatan berbasis sumber daya lokal.

21. Tersedianya dukungan pemasaran bagi KUMKM.

Koperasi dan Usaha mikro kecil dan menengah perlu terus didorong untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dukungan pemasaran perlu dilakukan antara lain dengan melakukan promosi dan pelaksanaan kemitraan.

22. Meningkatkan investor yang berinvestasi di Kabupaten Karo.

Terus meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Karo melalui penguatan regulasi yang mendukung, peningkatan pelayanan perizinan, peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur pendukung.

23. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan.

Pendidikan yang handal akan tercapai jika didukung oleh sarana dan prasaran yang handal sehingga dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Karo.

24. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kepemudaan dan olahraga serta pendidik dan tenaga kependidikan.
Peningkatan kualitas masyarakat juga dapat dilihat dari kualitas kepemudaan yang menjadi pelopor utama pembangunan. Melalui kegiatan yang positif khususnya dari segi olahraga dapat meningkatkan prestasi pemuda dan menjauhkan dari perilaku negatif yang ada di tengah-tengah masyarakat.
25. Tersedianya produk hukum tentang tata ruang daerah.
Tata ruang sebagai dokumen pengendali pemanfaatan ruang harus tersedia agar tidak ada penggunaan ruang yang tidak sesuai ketentuan. Salah satu produk hukum tata ruang adalah RTRW, dan Pemerintah Kabupaten Karo harus segera menyusun RTRW tersebut.
26. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan yang berbasis rencana tata ruang.
Perencanaan pembangunan harus berbasis spatial. Oleh karena itu perencanaan pembangunan harus diselaraskan atau disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.
27. Terlaksananya pembinaan kelembagaan penataan ruang.
Penyusunan dan pengawasan pemanfaatan ruang memerlukan kelembagaan. Kabupaten Karo belum memiliki kelembagaan penataan ruang yang optimal. Oleh karena itu pembinaan sangat diperlukan.
28. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang.
Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan salah satu syarat untuk menjaga kapasitas lingkungan. Oleh karena itu setiap perizinan pemanfaatan ruang harus dikendalikan sesuai dengan rencana tata ruang.
29. Meningkatnya kelembagaan yang ada di masyarakat.
Melemahnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan saat ini berakibat tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik sosial, budaya maupun memudarnya adat-istiadat. Kedepan diperlukan program/kegiatan yang mampu mendorong/menstimulasi untuk menguatkan kembali kemandirian masyarakat dan Desa. Bentuk kegiatan Penataan dan

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Pembinaan kelembagaan seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna sudah ada agenda program/kegiatan setiap tahunnya akan tetapi pembinaan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selama 5 tahun terakhir tidak ada bahkan keberadaan LPM sudah hampir hilang di desa dan kelurahan.

5.2.3. Sasaran Pokok Tahun 2016-2021

Sasaran pokok tahun 2016-2021 untuk mencapai visi misi RPMJD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Karo yang sehat, cerdas, religious, produktif, dan berdaya saing.

Upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dilakukan dengan peningkatan pembangunan sumber daya manusia baik secara kualitas dan karakter salah satu indikatornya diukur dengan pencapaian IPM ditargetkan 74,19. Fokus dilakukan pada pembangunan pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga. Dengan pembangunan tersebut diharapkan dapat tercipta sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, religious, produktif dan berdaya saing.

2. Terwujudnya peningkatan daya saing Kabupaten Karo melalui sektor unggulan (pertanian dan pariwisata) yang berwawasan lingkungan.

Sektor pertanian dan pariwisata di Kabupaten Karo merupakan sektor yang tidak dapat dipisahkan karena pada dasarnya saling bersinergi dan berkontribusi. Sektor pertanian dan pariwisata telah menjadi sektor unggulan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu kedua sektor tersebut akan terus dikembangkan melalui program kegiatan yang aplikatif berbasis inovatif dan IPTEK yang dapat meningkatkan daya saing di sektor pertanian dan pariwisata dengan melibatkan Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Pemerintah. Hal

tersebut dilakukan secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan (berwawasan lingkungan) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Terwujudnya infrastruktur wilayah yang memadai untuk meningkatkan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Infrastruktur wilayah seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, air limbah, irigasi, perhubungan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur tersebut akan sangat menentukan daya saing daerah. Sehingga ketersediaan infrastruktur baik kualitas maupun kuantitas harus terus ditingkatkan.

4. Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum.

Tata kelola pemerintah yang baik dan bersih sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi maupun menjamin kesejahteraan masyarakat karena hal ini sangat menentukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat ditargetkan 75, Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah ditargetkan WTP, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp. 103.645.507.071 serta Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ditargetkan B.

5. Tata kelola pemerintah yang baik dan bersih sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi maupun menjamin kesejahteraan masyarakat. karena hal ini sangat menentukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat ditargetkan 75, Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah ditargetkan WTP, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp. 103.645.507.071 serta Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ditargetkan B.

6. Terwujudnya peningkatan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Peningkatan demokrasi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat diterapkan dengan melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, masyarakat harus dilibatkan dalam mengambil kebijakan melalui partisipasi masyarakat yang merupakan dasar pelaksanaan demokrasi dengan indikator Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (persentase kehadiran dalam pelaksanaan Musrenbang) ditargetkan 100%.

7. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan dan pengelolaan bencana yang komprehensif.

Semenjak Gunung Sinabung di Kabupaten Karo meletus, maka Kabupaten Karo menjadi daerah yang rawan bencana. Oleh karena itu untuk menurunkan risiko bencana tersebut maka penyelenggaraan penanggulangan bencana harus diperbaiki.

5.2.4. Sasaran Pokok Tahun 2022-2025

Sasaran pokok tahun 2022-2025 untuk mencapai visi misi RPMJD Kabupaten Karo Tahun 2022-2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan di Kabupaten Karo.

Infrastruktur jalan sebagai salah satu sarana penghubung antara wilayah sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas suatu wilayah. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur baik kualitas maupun kuantitas harus segera ditingkatkan.

2. Menurunnya IRB Kab Karo

Indeks Risiko Bencana merupakan indikator ketahanan bencana suatu daerah. Makin rendah IRB suatu daerah maka ketahanan daerah tersebut terhadap bencana makin baik. Ketahanan tersebut dapat ditingkatkan dengan memperbaiki manajemen pengelolaan bencana.

3. Meningkatnya kualitas Penduduk dan Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk.
Kondisi laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 adalah 2 dan diharapkan akan menurun pada tahun 2025 menjadi 1,8. Hal ini sangat penting karena kualitas penduduk dengan jumlah penduduk sangat berhubungan erat.
4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat miskin.
Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat miskin sehingga persentase penduduk di bawah garis kemiskinan diharapkan dapat ditekan sampai 7,76 persen di tahun 2025 dari kondisi awal 8,69 persen di tahun 2019.
5. Terlaksananya verifikasi dan validasi data kemiskinan secara rutin dan menyeluruh (minimal 2 tahun sekali).
Penanggulangan masalah kemiskinan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tepat sasaran sehingga keakuratan data sangat dibutuhkan. Pada tahun 2025 diharapkan keakuratan data dapat mencapai 85%. Keakuratan data 100% akan sulit dicapai karena dinamika perubahan status ekonomi masyarakat selalu berubah sementara pemutakhiran data membutuhkan proses dan waktu.
6. Pelayanan Sosial Kepada Penyandang Kesejahteraan Sosial
Penyandang kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian khusus karena memang sangat susah menaikkan taraf hidupnya sehingga sejalan dengan penurunan angka kemiskinan maka pelayanan sosial kepada penyandang kesejahteraan sosial harus dilanjutkan dengan target 70% dari kelompok yang terdaftar.
7. Meningkatnya nilai predikat Kabupaten Peduli HAM.
Pemerintah kabupaten karo telah menerima predikat Kabupaten Peduli HAM tahun 2018 dan 2019. Untuk tahun 2025 pemerintah Karo akan mempertahankan predikat dengan nilai yang meningkat dengan memperhatikan dan mengevaluasi nilai tahun sebelumnya.

8. Meningkatnya Sarana dan Prasarana, SDM Pendidik dan Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, SDM Pendidik dan Manajemen pelayanan pendidikan merupakan konsentrasi penuh terhadap seluruh aspek pendidikan. Target yang disasar pada tahun 2025 adalah terpenuhinya standar Nasional Level 7 sesuai dengan SPM bidang Pendidikan.

9. Meningkatnya kualitas SDM, Pelayanan, prasarana dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas kesehatan secara menyeluruh akan difokuskan dengan indikator angkat kematian bayi, angka kematian ibu, Angka Harapan hidup, Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk, sarana dan Prasarana Puskesmas sesuai standar, Ketersediaan dokter dan adanya jaminan kesehatan masyarakat.

10. Menurunnya kasus penyakit menular, tidak menular dan penyalahgunaan narkoba.

Kualitas penduduk dari sisi kesehatan harus lebih mengutamakan tindakan pencegahan daripada mengobati sehingga indikator yang akan disasar pada sasaran pokok ini adalah yang dominan di Kabupaten Karo yaitu prevalensi Diabetes, Prevalensi Hipertensi dan Penemuan kasus penyakit HIV/AIDS.

11. Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah

Peningkatan teknologi sering menggerus kebudayaan daerah sehingga pengelolaan budaya harus diintensifkan setiap tahun dengan indikator benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, hal ini diintegrasikan dengan penyelenggaraan festival festival budaya setiap tahun.

Perkembangan bidang seni dan budaya sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup masyarakat terutama untuk mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab dan berkualitas. Kabupaten Karo memiliki berbagai adat istiadat budaya serta kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada di masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan daerah. Jika dilihat dari tahun 2015-2018

aspek seni dan budaya di Kabupaten Karo tidak mengalami peningkatan sehingga dibutuhkan upaya untuk mengelola seni dan budaya daerah yang dapat mendukung pariwisata dan kelestarian seni budaya itu sendiri.

12. Meningkatnya Daya Saing Produk UMKM dan Koperasi

Indikator Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Karo bergerak fluktuatif cenderung mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkan baik dari kuantitas maupun kualitas. Peningkatan sektor Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, penurunan kemiskinan dan perluasan lapangan pekerjaan. Melihat perkembangan pada sektor tersebut maka kedepan upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tetap menjadi perhatian penting agar sektor Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Karo dapat memiliki daya saing serta dapat menciptakan wirausaha baru melalui berbagai program/kegiatan yang inovatif dan kreatif.

13. Meningkatnya Daya Saing Objek Wisata, Pemasaran, SDM Pariwisata dan kemitraan yang Berkelanjutan serta Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pada Tahun 2018, persentase kunjungan wisata belum sesuai target yang direncanakan. Kedepan, Sektor pariwisata masih menduduki peranan penting dalam menunjang pembangunan daerah sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah. Oleh sebab itu, tiga komponen penting yang tetap diperhatikan dalam pengembangan pariwisata yaitu atraksi, amenitas dan aksesibilitas. Ketiga komponen tersebut dilakukan secara berkesinambungan sehingga objek wisata memiliki daya saing yang tinggi. Disamping itu, pemerintah tetap melakukan pemasaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata serta terus mendorong sinergitas dan kolaborasi seluruh *stakeholders* yang berkaitan. Pengembangan ekonomi kreatif akan terus dipacu secara berkesinambungan dengan melibatkan industri-industri kreatif di Kabupaten Karo serta

melibatkan generasi muda sehingga pariwisata dan ekonomi kreatif dapat saling memberikan kontribusi positif untuk mendukung daya saing daerah.

14. Meningkatkan Daya Saing Produk pertanian, benih unggul, sarana dan prasarana pertanian, SDM dan Penerapan GAP Secara Berkesinambungan

Sektor pertanian merupakan bagian terpenting dalam perekonomian Kabupaten Karo. Hasil pertanian dari Kabupaten Karo telah dipasarkan ke pasar regional, nasional dan global. Kedepan sektor pertanian akan terus dipacu agar dapat meningkatkan daya saing dari sisi kuantitas maupun kualitas. Untuk mendukung daya saing tersebut maka ketersediaan sarana dan prasarana serta peningkatan SDM berbasis inovasi dan IPTEK akan tetap menjadi perhatian pemerintah. Disamping itu, ketersediaan bibit unggul dan pemasaran produk akan terus ditingkatkan. *Good Agriculture Practices (GAP)* secara berkesinambungan akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan.

15. Meningkatkan Inovasi Produk IKM dan SDM Pelaku Industri Kecil Menengah

Sektor IKM di Kabupaten Karo perlu ditingkatkan sejalan dengan potensi Kabupaten Karo di bidang pertanian dan pariwisata sehingga dalam rangka menunjang sektor tersebut maka sektor industri perlu mendapat prioritas. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah bergerak ke sektor pengolahan produk. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan sektor IKM dilakukan melalui program/kegiatan berbasis inovatif dan IPTEK.

16. Meningkatkan Pembinaan Olahraga dan Kepemudaan, Sarana dan Prasarana dan Partisipasi pemuda dalam Pembangunan.

Olahraga, kesehatan dan kenakalan remaja sangat berkaitan erat sehingga kegiatan olahraga perlu terus ditingkatkan. Ukuran

keberhasilan dapat dilihat dari indikator jumlah atlet Kabupaten Karo yang berprestasi tingkat Nasional dan Internasional.

17. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi

Target akses air minum dan sanitasi adalah 100%, sedangkan capaian di Kabupaten Karo masih sekitar 80% untuk air minum dan 70% untuk sanitasi. Oleh karena itu penyediaan infrastruktur dan pelayanan air minum dan sanitasi perlu ditingkatkan.

18. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur

Kualitas infrastruktur akan sangat menentukan daya saing daerah. Infrastruktur yang memadai akan mendukung perekonomian masyarakat.

19. Tersedianya luas RTH sesuai dengan ketentuan

Sesuai dengan amanah Undang-undang ketersediaan RTH minimal 30% dari luas permukiman. Pada saat ini di Kabupaten Karo baru tersedia sekitar 15% RTH, oleh karena itu penambahan RTH tersebut sangat diperlukan.

20. Tersedianya Perda Keruangan

Sampai tahun 2019, Kabupaten Karo belum memiliki Perda Tata Ruang. Oleh karena itu penyusunan perda tersebut perlu segera dipercepat.

21. Meningkatkan sistem drainase yang terintegrasi

Drainase yang terbangun saat ini masih banyak yang belum berfungsi dengan baik karena belum tersambung. Sehingga masih banyak wilayah yang tergenang meskipun sudah tersedia drainase. Oleh karena itu pengintegrasian saluran drainase tersebut sangat diperlukan.

22. Tersedianya rumah layak huni di Kabupaten Karo

Masih ada masyarakat Kabupaten Karo yang tinggal di rumah yang tidak layak huni, oleh karena itu pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang miskin sangat diperlukan.

23. Terwujudnya 0% permukiman kumuh

Target kawasan kumuh adalah 0 Ha, sedangkan di wilayah Kabupaten Karo masih ada wilayah kumuh sehingga perlu penanganan.

24. Tersedianya TPU yang tertata dan terkelola dengan baik
TPU di wilayah perkotaan Kabanjahe dan Berastagi sudah penuh, sehingga pengadaan TPU perlu segera.
25. Meningkatnya kompetensi Pencari Kerja, Penciptaan Wirausaha baru, dan Peningkatan Informasi Ketenagakerjaan
Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Karo masih sebesar 44,40 persen dari tenaga kerja yang terdaftar sehingga perlu untuk terus ditingkatkan melalui Balai Latihan Kerja. Untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat antara lain dilakukan dengan menciptakan wirausaha baru melalui pelatihan atau bimbingan teknis sehingga semakin menurunkan angka pengangguran dan berkembangnya lapangan usaha baru di Kabupaten Karo.
26. Meningkatnya Penegakan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Kesejahteraan Sosial serta Kesetaraan Gender.
Dalam pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk kaum perempuan, anak dan lansia. Untuk itu penegakan hukum setiap pelanggaran harus diperhatikan tetapi dengan mengutamakan pencegahan dan pembinaan.
27. Meningkatnya Kualitas Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan
Untuk dapat hidup sehat dan produktif masyarakat diharapkan dapat memenuhi gizi dari makanan yang dikonsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut, setiap orang perlu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, sehingga kedepan hal tersebut perlu untuk terus diperhatikan oleh pemerintah daerah.
28. Penyusunan Database Sumber Daya Pangan
Untuk melihat kondisi ketahanan pangan secara menyeluruh di Kabupaten Karo diperlukan Database Sumber Daya Pangan. Hal ini dibutuhkan sebagai sumber data/informasi dalam menyusun perencanaan dan perumusan kebijakan terkait pangan.
29. Menurunnya Daerah rawan Pangan
Masih terdapat daerah 6 (enam) kecamatan rentan pangan sehingga kedepan penurunan daerah yang masih rentan pangan

dengan indikator yang menyebabkan tetap perlu mendapat perhatian dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

30. Meningkatnya Ketersediaan Lahan untuk Fasilitas Pemerintah dan Umum

Ketersediaan lahan untuk fasilitas umum dan pemerintah perlu terus ditingkatkan, mengingat salah satu permasalahan pembangunan infrastruktur adalah keterbatasan lahan. Dengan meningkatnya ketersediaan lahan dimaksud maka pembangunan infrastruktur untuk fasilitas umum dan pemerintahan dapat dengan mudah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah.

31. Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

Kualitas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program-program perencanaan pembangunan. Untuk itu, kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dari seluruh pembangunan di Kabupaten Karo.

32. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan.

Administrasi kependudukan sangat penting dan erat kaitannya dengan permasalahan data yang sering menjadi permasalahan perencanaan pembangunan. Indikator utama utama adalah Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, e-KTP dan Akta Perkawinan.

33. Meningkatnya kompetensi Perangkat Desa

Peningkatan kompetensi perangkat desa sangat menentukan kualitas pembangunan di Desa yang secara akumulatif juga menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Karo. Peningkatan kompetensi perangkat desa dilakukan melalui pelatihan yang dilakukan kepada perangkat desa khususnya kepada yang baru diangkat.

34. Meningkatnya Pendapatan Asli Desa

Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dari beberapa sumber pendapatan Desa sumber yang paling besar berasal dari bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah. Permasalahannya adalah maka secara otomatis Pemerintah Desa mulai

menggantungkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya melalui dana bantuan dari Pemerintah tersebut. Untuk itu diperlukan upaya dalam meningkatkan PAD Desa. Badan Usaha Milik Desa yang telah terbentuk sebanyak 129 BUMDes tahun 2018 di Kabupaten Karo merupakan salah satu cara untuk meningkatkan PAD Desa. Keberadaan BUMDes memainkan peran penting karena berhubungan dengan kegiatan bisnis mengelola potensi desa sehingga mampu memyumbangkan keuntungan sehingga menambah pendapatan desa.

35. Meningkatkan keselamatan lalu lintas

Meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas merupakan target di bidang perhubungan. Oleh Karena itu untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, maka diperlukan pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan.

36. Berkurangnya titik kemacetan

Di wilayah Kabupaten Karo terdapat beberapa titik kemacetan terutama di perkotaan. Kemacetan sangat mengganggu transportasi barang dan jasa. Oleh karena itu titik kemacetan tersebut harus dikurangi.

37. Tersedianya Lahan dan Pembangunan Terminal Tipe C

Terminal tipe C yang tersedia di Kabupaten Karo hanya satu yakni di Kabanjahe. Akan tetapi beberapa wilayah masih memerlukan terminal type C seperti Berastagi dan Merek, sehingga diperlukan pembangunan.

38. Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan

Ketersediaan fasilitas jalan sangat diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu di beberapa lokasi jalan yang memerlukan penyediaan fasilitas jalan tersebut perlu ditingkatkan.

39. Meningkatnya Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat pelayanan jalan perlu ditingkatkan agar konektivitas dan aksesibilitas Kabupaten Karo meningkat.

40. Tersusunnya Perda Perhubungan

Salah satu kendala terkait penyelenggaraan perhubungan adalah karena belum tersedianya regulasi yang mengatur perhubungan.

Oleh karena itu penyusunan perda perhubungan tersebut harus segera.

41. Penetapan jaringan trayek angkutan perdesaan
Jaringan trayek sangat diperlukan untuk mengatur trayek angkutan umum. Beberapa desa tertinggal belum memiliki angkutan umum sehingga pengaturan trayek ini diperlukan.
42. Meningkatnya Indeks Penggunaan SPBE
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang efektifitas pelayanan publik sangat diperlukan. Apabila pemanfaatan teknologi dan informasi ini dapat ditingkatkan maka indeks SPBE Kabupaten Karo akan meningkat.
43. Terbangunnya *Command Center* yang sesuai Standar
Command Center sebagai salah satu media komunikasi merupakan trend pada saat ini. Kabupaten Karo sudah memiliki *Command Center* tersebut namun perlu tetap dikembangkan.
44. Meningkatnya Akses Layanan Telepon dan Internet
Terdapat 21 desa di wilayah Kabupaten Karo yang masih dalam zona *blank Spot*. Oleh karena itu penyediaan akses internet dan telepon perlu disegerakan agar tidak ada lagi wilayah Kabupaten Karo termasuk *blank spot*.
45. Meningkatnya Investasi
Investasi merupakan salah satu bagian penting perekonomian Kabupaten Karo karena dapat menggerakkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Karo, sektor ini akan menciptakan multi efek yang sangat tinggi dalam perkembangan ekonomi sehingga pemerintah daerah terus berupaya untuk dapat menciptakan iklim investasi yang baik melalui penguatan regulasi, ketersediaan data/informasi, ketersediaan SDM dan infrastruktur pendukung.
46. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan serta Pelayanan Perpustakaan
Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat baik dari pendidikan formal maupun non formal dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan perpustakaan sehingga meningkatkan budaya baca bagi masyarakat. Peningkatan kualitas dan kuantitas

ini diukur dari rasio perpustakaan persatua penduduk, persentase jumlah kunjungan terhadap populasi yang harus dilayani dan jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat.

47. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kearsipan

Arsip merupakan hal penting khususnya yang memiliki nilai seperti dokumen dokumen Negara dan surat-surat penting. Pengelolaan arsip harus dilakukan secara professional yang dapat diukur melalui jumlah arsiparis dan penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi dalam pengelolaannya.

48. Meningkatkan Mitigasi Bencana Lingkungan

Bencana lingkungan bisa disebabkan oleh banyak hal seperti bencana alam dan juga bencana yang disebabkan oleh manusia. Risiko yang disebabkan bisa meningkat seiring dengan kurangnya mitigasi bencana lingkungan tersebut. Oleh karena itu untuk meningkatkan mitigasi tersebut salah satu yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana tersebut seperti meningkatkan pengetahuan akan bencana dimaksud.

49. Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Kajian Potensi Energi dan Sumber Daya Alam serta Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Alam

Pemerintah daerah terus berupaya untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan energi setempat. Langkah penting yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan kajian dan pemanfaatannya yang tepat.

50. Meningkatkan Ekspor, Perlindungan Konsumen, Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Perdagangan di Kabupaten Karo diupayakan terus ditingkatkan untuk kesiapan dalam menghadapi persaingan perdagangan global. Perdagangan di Kabupaten Karo juga berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat,

penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi.

51. Meningkatnya produksi Perikanan

Sumber daya alam yang potensial untuk budidaya perikanan belum dimanfaatkan secara optimal. Luas potensi perikanan budidaya seluas 449,24 Ha sedangkan luas lahan budidaya yang sudah dikembangkan hanya 129,17 Ha. Produksi perikanan di Kabupaten Karo diharapkan akan terus meningkat hal ini dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam yang potensial untuk budidaya perikanan. Pemanfaatan tersebut antara lain didukung oleh ketersediaan irigasi yang memadai, tenaga penyuluh dan meningkatkan minat masyarakat.

52. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan memberikan arah dan pedoman bagi perangkat daerah untuk melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas pembangunan daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan menjadi menjadi tepat sasaran dan tercapai baik jangka panjang, menengah dan pendek.

53. Terlaksananya konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

54. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Belum tercapainya opini BPK dengan kategori WTP atas pelaporan keuangan daerah dan Potensi PAD belum tergali secara optimal, untuk itu Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah perlu untuk terus diperhatikan.

55. Meningkatnya Birokrasi yang Unggul dan Inovatif

Birokrasi yang unggul dan inovatif menjadi salah satu factor penentu keberhasilan pembangunan sehingga penataan birokrasi

sangat penting baik dari sisi Aparatur maupun manajemennya. Indikator keberhasilan akan dilihat dari persentase ASN yang telah memenuhi standar diklat, terpenuhinya jabatan fungsional dan dari sisi akuntabilitas dilihat dari tingkat kepatuhan atas tindak lanjut temuan.

56. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Kebijakan yang berdasarkan kajian dapat meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan. Hal ini perlu juga didukung dengan meningkatkan kualitas hasil kelitbangan. Peningkatan hasil kualitas kelitbangan juga diperoleh dengan kualitas dan kuantitas SDM peneliti yang memadai

57. Terciptanya Ekosistem Inovasi

Ekosistem inovasi dapat diwujudkan dengan membuat inovasi menjadi budaya kerja disertai dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan. Ini perlu juga didukung dengan kemauan belajar dan membuat perubahan dari setiap perangkat daerah dan SDM yang ada atau berkerja pada instansi itu. Inovasi menjadi suatu keharusan. Karena tanpa adanya inovasi maka suatu daerah tidak dapat berdaya saing.

58. Terbangunnya Ruas Jalan Baru

Untuk meningkatkan konektifitas Kabupaten Karo dan juga untuk mengurai titik kemacetan, maka diperlukan pembangunan jalan di beberapa wilayah Kabupaten Karo. Beberapa wilayah yang memerlukan pembangunan jalan antara lain di wilayah perbatasan dan pinggiran.

Tabel 5.1
Sasaran Pokok RPJPD
Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 Periode I-III

Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Target Kinerja Pembangunan
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode I		
Terwujudnya Pengembangan Produk Unggulan Daerah.	Inflasi (%)	5 ± 1
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,43
	PDRB ADHB (Jutaan Rupiah)	4.230.200
	PDRB ADHK (Jutaan Rupiah)	3.533.844
	PDRB Perkapita	13.000.000
	Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	67.543
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	435.800
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	430.000

Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Target Kinerja Pembangunan
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	5.800
	Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional	2
	Volume ekspor	56.500,25
	Nilai ekspor	13.540.254
	Persentase koperasi Aktif (%)	47
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dengan Melaksanakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Melibatkan Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta.	Data Lahan Kritis Kab. Karo	1 dokumen
	Pengawasan Peredaran Hasil Hutan	Ada
	Kualitas Air dan Lingkungan	Sedang
	Pembuatan Hutan Rakyat	325 Ha
	Terlaksananya Reboisasi	265 Ha
Terciptanya Pusat Kawasan Agropolitan Merek untuk mendukung peningkatan usaha pertanian Kabupaten Karo.	Jumlah Kawasan Agropolitan	1
Restrukturisasi birokrasi	Terbentuknya organisasi perangkat daerah sesuai amanat PP 41 tahun 2007	Terbentuk
Terpenuhinya jangkauan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang terjangkau	Tersedia
Meningkatnya percepatan pembangunan dan penataan ruang wilayah	Tersedianya referensi yang <i>up to date</i> berkaitan dengan penataan ruang	Tersedia
Terlaksananya pengembangan perencanaan pembangunan	Berkembangnya sistem perencanaan ke arah yang lebih baik	Berkembang
	Terbinanya perangkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam penyusunan perencanaan	Terbina
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	Tersedianya infrastruktur teknologi informasi daerah	Tersedia
Meningkatnya data content situs resmi pemerintah daerah	Adanya sistem pengelolaan drainase	Tersedia
Terlaksananya pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana jalan kolektor dan jalan kecamatan di seluruh kabupaten karo	Terpeliharanya jalan dan jembatan	Terpelihara
Terlaksananya pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti jalan, air bersih, drainase, perumahan, sanitasi dan pasar	Pembangunan perumahan bagi aparatur dan masyarakat miskin	Tersedia
	Perbaikan dan stimulan perumahan swadaya dan kawasan kumuh	50 unit
	Pembangunan sumber air baru	10 unit
	Pembangunan saluran drainase lingkungan permukiman	1 paket
	Pembangunan saluran limbah	1 paket
	Pembangunan PAL	1 paket
	Pembangunan prasarana sarana jalan lingkungan pemukiman yang layak	1 paket
	Pengujian kendaraan bermotor, angkutan orang dan barang	1 paket
	Pembangunan fasilitas keselamatan angkutan jalan	1 paket
	Pengadaan peralatan pengatur lalu lintas	1 paket

Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Target Kinerja Pembangunan
	Pengadaan lahan terminal penumpang umum	1 unit
	Pembangunan sub terminal	2 unit
Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana irigasi	Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jaringan irigasi	1 paket
	Prencanaan dan pengawasan irigasi	1 paket
Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem transportasi lokal	Penataan jaringan rayek	1 paket
	Implementasi tataran transportasi lokal	1 paket
	Pengembangan rekayasa lalu lintas	1 paket
	Identifikasi kelas dan nama jalan	1 paket
	Kajian pengembangan moda transportasi	1 paket
Peningkatan pembangunan perdesaan	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa	60
	Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	60
Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	5 unit
	Jumlah PMKS yang menerima bantuan	13 orang
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	13 orang
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, kualitas aparatur pemerintahan dan kualitas masyarakat	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk	1 : 58.493
	Rasio Puskesmas Persatuan penduduk	1 : 18.472
	Rasio Pustu Per Satuan Penduduk	1 : 1.764
	Rasio Polindes Per Satuan Penduduk	1 : 2.700
	Persentase Kualifikasi SDM Aparatur (jumlah pegawai berpendidikan, sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2/S3)	70%
	Persentase Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	50%
Peningkatan kualitas prasarana dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.	Angka Melek Huruf	98,69
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	118,37
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105,15
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/MA	66,57
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,4
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	80,15
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/MA	61,65
	Rata-rata lama sekolah	9,1
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Per 10.000 penduduk SD/MI	65,24
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Per 10.000 penduduk SMP/MTs	33,5
	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	2,87
	Persentase Penduduk yang Mendapat Keluhan Kesehatan Dalam Sebulan	23,35
	Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan (30 hari)	9,82
	Persentase Balita Kelahiran Pertama ditolong oleh tenaga kesehatan	99,41

Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Target Kinerja Pembangunan
	Rasio Dokter Umum Persatuan Penduduk	1 : 3900
	Rasio Dokter Spesialis Persatuan Penduduk	1 : 19.498
	Rasio Dokter Gigi Persatuan Penduduk	1 : 10.968
Pembangunan SDM melalui olahraga dan kesenian serta pengenalan budaya.	Jumlah Grup Kesenian	8 buah
	Jumlah Gedung kesenian	1 buah
	Jumlah Club Olahraga	33
	Jumlah Gedung Olahraga	0
	Jumlah kegiatan olahraga	2
	Jumlah organisasi olahraga	10
Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas.	Persentase Wanita Berusia dibawah 19 Tahun yang menikah menurut umur perkawinan pertama	22,39
	Persentase Wanita Berumur 15 - 49 Tahun Berstatus Kawin yang menggunakan KB	35,02
	Persentase pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	35
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	4
	Rasio akseptor KB	61,1
	Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I	21.796
Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.	Persentase Kemiskinan	11,02
	Jumlah Penduduk Miskin	38.612
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,52
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,31
Menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama.	Jumlah pembinaan toleransi antar umat beragama	5
	Jumlah konflik antar umat beragama	0
Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat.	Jumlah Pelanggaran Perda	60
	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	30
	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	55%
	Tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	10 menit s/d 1 jam
Melestarikan nilai-nilai budaya karo tanpa menutup diri dari budaya luar yang bersifat positif.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali
Meningkatkan peran serta tokoh agaman dan rohaniawan dalam pembangunan kemasyarakatan.	Tersedianya ruang aspirasi bagi tokoh agama dan rohaniawan untuk pembangunan	ADA
Penegakan supremasi hukum.	Jumlah Produk Hukum yang disusun	3 Perda, 42 Perbup
	Jumlah perkara yang ditangani	0
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode II		
Terciptanya struktur organisasi yang miskin struktur kaya fungsi	Adanya struktur organisasi	Ada
Terwujudnya manajemen kepegawaian yang profesional	Adanya sistem manajemen	Ada
Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan antara	Adanya peraturan yang sinkron	Ada

Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Target Kinerja Pembangunan
pusat, provinsi, dan kabupaten		
Tersedianya data dan informasi dasar pembangunan yang akurat	Adanya database dasar pembangunan yang akurat	Ada
Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan daya saing produk-produk pertanian di pasar lokal, regional, dan internasional	Adanya sejumlah produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing Adanya sejumlah daerah wisata yang meningkatkan kualitasnya	Ada
Berkembangnya sistem pertanian yang ramah lingkungan melalui penguatan sistem pertanian organik	Adanya sistem pertanian yang ramah lingkungan	Ada
Terwujudnya kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata dan lingkungan hidup serta hutan yang lestari	Adanya sejumlah daerah wisata yang meningkatkan kualitasnya	Ada
Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing	Adanya destinasi pariwisata yang berdaya saing	Ada
Meningkatnya jumlah, pengeluaran, dan lama tinggal wisatawan	Adanya destinasi pariwisata yang berdaya saing	Ada
Meningkatnya efisiensi sistem jaringan transportasi dan perhubungan untuk mendukung perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan wilayah	Dokumen Sistrawil Sarana penunjang sistem transportasi	Ada
Meningkatnya sistem pengelolaan air bersih	Adanya sistem pengelolaan air bersih	Ada
Meningkatnya pelayanan sanitasi berbasis masyarakat	Adanya sanitasi yang berkualitas	Ada
Meningkatnya kualitas permukiman dan cakupan pelayanan dasar permukiman	Adanya sistem pengelolaan drainase	Ada
Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan	Adanya sistem pengelolaan persampahan	Ada
Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi	Jaringan irigasi semakin luas	Semakin Luas
Meningkatnya pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan strategis, wilayah tertinggal, dan rawan bencana	Jalan dan jembatan di kawasan strategis, wilayah tertinggal, rawan bencana terpelihara, dan kapasitasnya meningkat	Meningkat
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	Adanya sejumlah sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat	Ada
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pelayan dan pelayanan kesehatan	Adanya pola hidup masyarakat yang bersih dan sehat	Ada
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pelayan dan pelayanan kesehatan	Pola hidup masyarakat bersih dan sehat	Ada
Meningkatnya pendapatan masyarakat	<i>Disposable Income</i> meningkat	Meningkat
Tersedianya dukungan pemasaran bagi KUMKM	Adanya dukungan pemasaran bagi KUMKM	Ada

Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Target Kinerja Pembangunan
Meningkatnya investor yang berinvestasi di Kabupaten Karo	Jumlah investor dan investasi meningkat	Meningkat
Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan	Persentase Sekolah SD/MI yang memiliki internet	6,67
	Persentase Sekolah SMP/MTs yang memiliki internet	25
	Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 penduduk Tingkat SD/MI	61,14
	Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 penduduk Tingkat SMP/MTs	33,99
	Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga pendidik	Cukup
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kepemudaan dan olahraga serta pendidik dan tenaga kependidikan	Penerapan regulasi standar pelayanan pendidikan	Diterapkan
	Rasio guru per 10.000 siswa SD/MI	658,20
	Rasio guru per 10.000 siswa SMP/MTs	836,14
	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,44
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,33
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,99
	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI (%)	98,46
	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs (%)	98,05
	Angka melek huruf	99,26
	Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83,95
	Persentase Pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan	90%
Tersedianya produk hukum tentang tata ruang daerah	Adanya produk hukum tentang tata ruang daerah	Ada
Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan yang berbasis rencana tata ruang	Dokumen RTRW	Ada
Terlaksananya pembinaan kelembagaan penataan ruang	Kelembagaan penataan ruang yang terbina	Terbina
Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	Pemanfaatan ruang terkendali	Dilaksanakan
Meningkatnya kelembagaan yang ada di masyarakat	Lembaga-lembaga masyarakat kuat	Meningkat
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode III		
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Karo yang sehat, cerdas, religious, produktif, dan berdaya saing	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	11
	Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun (%)	100
	Angka Kelulusan SD/MI (%)	100
	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100
	Angka Kelulusan SMA/MA/SMK (%)	100
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%)	115,7
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%)	88,9
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA (%)	94,6
Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 KH	4	

Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Target Kinerja Pembangunan
	Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 KH	73
	Prevalensi gizi buruk dan kurang (%)	0.13
	Usia Harapan Hidup (Tahun)	72.5
	Daya Beli Masyarakat	
	IPM	74.19
	Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Nasional (orang)	35
Terwujudnya peningkatan daya saing Kabupaten karo melalui sektor unggulan (pertanian dan pariwisata) yang berwawasan lingkungan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7
	Inflasi (%)	2.02
	PDRB ADHB (Jutaan Rupiah)	23.956.176,97
	PDRB ADHK (Jutaan Rupiah)	21.017.910,03
	Nilai Investasi (T)	6,5
	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	2150
	Ketersediaan Protein	90
	Ketersediaan Pangan Utama (kg)	83476
	Skor Pola Pangan Harapan	89,1
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1,000,000
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	997,974
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	2,026
	Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional	5
	Jumlah Sertifikasi Produk Pangan (komoditi)	12
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60
	Terwujudnya infrastruktur wilayah untuk meningkatkan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development</i>)	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap (%)
Rasio Jaringan Irigasi Tersier (%)		90
Rasio Jaringan Irigasi (%)		90
Luas Kawasan Kumuh (%)		0
Persentase rumah tinggal bersanitasi layak		100
Cakupan Pelayanan Air Minum (%)		100
Persentase penanganan sampah (%)		92
Pemasangan Rambu-Rambu (%)		41,31
Luas RTH Perkotaan (%)	30	
Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	75
	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	103.645.507.071
	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	B
Terwujudnya peningkatan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (% kehadiran dalam pelaksanaan Musrenbang)	100
Meningkatnya Kemampuan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan dan Pengelolaan Bencana	Jumlah pendampingan penyelenggaraan penanggulangan bencana	6
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60

Tabel 5.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Sasaran
RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 Periode IV

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL						
Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal 2019	Kondisi Akhir 2025
Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih, Profesional Dan Responsif Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah	Mewujudkan Pemerintahan Profesional dan Responsif	Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa	Meningkatnya Kompetensi Perangkat Desa	Persentase Perangkat Desa yang dilatih	100%	100%
		Peningkatan Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya Pendapatan Asli Desa	Jumlah BumDes	129	140
				Peningkatan PAD swadaya Masyarakat terhadap program Pemberdayaan masyarakat	30%	40%
		Penyediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	3 dokumen	7 dokumen
				Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	86,67	100%
				Konsisten program RKPD ke dalam APBD (%)	92,87	100%
		Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WTP
				Jumlah Sertifikat Tanah dan Bangunan Aset Daerah yang diterbitkan	282	550
				Pajak Daerah (Rp)	44.426.261.200	98.916.256.260
				Retribusi Daerah (Rp)	9.955.878.435	21.229.944.482
		Meningkatkan Birokrasi yang Unggul dan Inovatif	Meningkatnya Birokrasi yang Unggul dan Inovatif	Persentase ASN yang telah memenuhi Standar Diklat	20%	100%
				Tingkat kepatuhan atas tindak lanjut temuan	73,62	100%
				Terpenuhinya Jabatan Fungsional	50%	100%
		Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Jumlah kebijakan berdasarkan hasil kajian atau penelitian	1 per tahun	2 per tahun
Mengembangkan Ekosistem Inovasi	Terciptanya Ekosistem Inovasi	Jumlah inovasi yang dikembangkan	belum ada	(1) 488		
		Jumlah inovasi yang diterapkan	belum ada	(2) 244		

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL								
Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal 2019	Kondisi Akhir 2025		
Membangun sistem dan koordinasi yang mantap dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terintegrasi	Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karo	Menurunnya IRB Kab Karo	Indeks Risiko Bencana	120,99	100		
		Peningkatan Mitigasi Bencana Lingkungan	Meningkatnya Mitigasi Bencana Lingkungan	Peta Zona Kerentanan gerakan tanah	1	16 dokumen		
Memberdayakan potensi sumber daya alam lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerahkan potensi sumber daya alam lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan memberdayakan potensi sumber daya lokal	Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	6	12		
				Jumlah Kunjungan Wisatawan	530.252	1.300.000		
				Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	0	5		
			Meningkatnya Daya Saing Produk UMKM Dan Koperasi	Persentasi koperasi aktif (%)	65,89%	70%		
				Terbentuknya Klaster bisnis UMKM	0	1 Klaster		
				Jumlah produk UMKM yang inovatif	4	10		
				Jumlah UMKM yang melakukan kemitraan	0	10		
			Meningkatnya Daya Saing Objek Wisata, Pemasaran, SDM Pariwisata dan Kemitraan yang Berkelanjutan serta Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan	530.252	1.300.000		
				Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	524.238	1.292.800		
				Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	6.014	7.200		
				Jumlah Atraksi Wisata	1	10		
			Meningkatnya Daya Saing Produk Pertanian, Benih Unggul, Sarana dan Prasarana Pertanian, SDM dan Penerapan GAP secara Berkesinambungan	Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, terdiri dari:				
				Padi (ton)	157740	162.507		
				Jagung (ton)	767305	563.119		
				Produksi Hortikultura (sayur, buah, tanaman obat, tanaman hias):				
				Jeruk (ton)	143611	213.010		
Kubis (ton)	147860	95.256						
Kentang (ton)	72308	57.588						
Cabai (ton)	47587	48.584						

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL									
Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal 2019	Kondisi Akhir 2025			
				Tomat (ton)	81693	71.945			
				Wortel (ton)	91992	51.365			
				Krisan (tangcai)	7.769.941,00	7.792.142			
				Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, terdiri dari:					
				Padi (kw/ha)	50,73	53			
				Jagung (kw/ha)	70,46	61,13			
				Produktivitas Hortikultura (sayur, buah, tanaman obat, tanaman hias):					
				Jeruk (kw/ha)	382,15	512,39			
				Kubis (kw/ha)	334,60	174,02			
				Kentang (kw/ha)	182,92	268,82			
				Cabai (kw/ha)	79,47	87,82			
				Krisan (tangcai/m2)	27,56	27,62			
				Produksi Tanaman Perkebunan:					
				Kopi (ton)	13.442,17	13.302			
				Kakao (ton)	3.199,37	3.202			
				Produktivitas Tanaman Perkebunan:					
				Kopi (kw/ha)	18,02	19,36			
			Kakao (kw/ha)	10,06	10,24				
			Penumbuhan Penangkar Benih/ Bibit Unggul	12	5				
			Meningkatnya Inovasi Produk IKM dan SDM Pelaku IKM			Jumlah Produk yang Inovatif	4	50	
						Terbangunnya Sentra IKM	0	1	
			Meningkatkan Peluang Kesempatan Kerja			Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja, Penciptaan Wirausaha Baru, dan Peningkatan Informasi Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,09	1,35
			Meningkatkan Kualitas Konsumsi, Mutu			Meningkatnya Kualitas Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan	Ketersediaan energi dan Protein (kkal/kap/hari)	2404 energi, 68 protein	≥ 2400 (energi), ≥63 (protein) Kkal/Kap/Hari

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL								
Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal 2019	Kondisi Akhir 2025		
	dan Keamanan Pangan yang Berkelanjutan			Konsumsi energi dan protein (kkal/kap/hari)	2142,2 energi, 72 protein	≥ 2150(energi), ≥57 (protein) Kkal/Kap/Hari		
				Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (%)	90,2	90%		
				Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (%)	87,2	100%		
				Pengawasan dan Pembinaan Keamanan pangan (%)	91,66	100		
				Jumlah sertifikasi produk pangan (komoditi)	5	18		
			Penyusunan <i>Database</i> Sumber Daya Pangan	Tersusunnya database sumber daya pangan	0	1		
			Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Konsumsi beras per tahun (kg)	86,26	78,78		
				Jumlah kecamatan rentan pangan	6	0		
			Meningkatkan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,4	Baik
						Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	tidak ada	Ada
						Regulasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	3	5
						Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada RTRW	Ada
						Persentase jumlah sampah yang tertangani (di wilayah pelayanan)	83%	100%
						Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten	0	Nilai TPA ≥71
	Tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0				1 unit		
	Meningkatkan Investasi	Meningkatnya Investasi		Jumlah PMA	25	30		
				Jumlah PMDN	43	50		
				Tersedianya <i>Feasibility Study</i> potensi investasi secara sektoral	0	5		
				Jumlah ijin yang diterbitkan	1.427	10.000		
	Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Kajian Potensi Energi dan Sumber Daya Alam serta Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Alam		Peta <i>aquifer</i> (Kecamatan)	4	13		
				Kajian tentang sebaran endapan bahan galian	0	1 dokumen		
				Kajian potensi kekayaan dan pemanfaatan sumber daya alam	0	1 dokumen		

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL								
Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal 2019	Kondisi Akhir 2025		
		Alam yang Berwawasan Lingkungan		Pendataan jaringan data dan informasi air tanah	1	1 dokumen		
				Data Potensi energi baru dan terbarukan	1	1 dokumen		
		Meningkatkan Perdagangan	Meningkatnya Ekspor, Perlindungan Konsumen, Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Terjalinnnya Kerjasama Perdagangan dengan Daerah atau Negara Lain	0	10		
				Penerapan <i>Good Handling Practices</i> (GHP)	0	5 komoditi		
				Jumlah Komoditi/Produk yang di ekspor	5 komoditi	10		
				Jumlah pasar yang tertib ukur	1	15		
		Meningkatkan produksi Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah pasar yang memenuhi standar	13	15		
				Produksi Bibit Ikan (ekor)	410.150	658.200		
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang terintegrasi dan komprehensif untuk meningkatkan daya dukung pembangunan daerah	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Tersedianya Gedung Pengujian dan alat pengujian	belum ada	1 gedung, 9 unit alat pengujian
					Berkurangnya Titik Kemacetan	Titik kemacetan	6 titik	0
Tersedianya Lahan dan Pembangunan Terminal Tipe C	Tersedianya Terminal Tipe C				belum ada	Kabanjahe, Berastagi, Merek		
Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Tersedianya fasilitas keselamatan jalan				51,07%	70%		
Meningkatnya Tingkat Pelayanan Jalan	Tingkat Pelayanan Jalan (LoS)				C	B		
Tersusunnya Perda Perhubungan	Tersedianya Perda Perhubungan				Belum ada Perda Perhubungan	5 Peraturan		
Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan	Tersedianya jaringan trayek angkutan perdesaan				belum ada	1 Peraturan		
Meningkatkan Penggunaan SPBE	Meningkatnya Indeks Penggunaan SPBE			Indeks SPBE	1,9	2,2		
				Terbangunnya <i>Command Center</i> yang Sesuai Standar	Tersedianya <i>Command Center</i> yang sesuai standar	0	1	

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL						
Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal 2019	Kondisi Akhir 2025
		Meningkatkan Akses Layanan Telepon dan Internet	Meningkatnya Akses Layanan Telepon dan Internet	Jumlah desa yang belum tersedia jaringan telepon dan internet	21	0
		Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan di Kabupaten Karo.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	61,35%	68%
				Persentase jembatan kondisi baik	73	90
				Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)	61,35%	68
				Persentase jembatan kondisi baik	73	90
		Pembangunan Ruas Jalan Baru	Terbangunnya Ruas Jalan Baru	Penambahan ruas jalan baru	0	2 ruas
		Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi	73,08%	100
				Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	67,50%	100
		Peningkatan Infrastruktur Irigasi	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur	Persentase wilayah DI Irigasi kondisi baik	46,70%	70
		Penyusunan Perda Keruangan	Tersedianya Luas RTH Sesuai dengan Ketentuan	Luas RTH perkotaan (%)	25%	30
				Tersedianya Perda Keruangan	Jumlah Perda Keruangan	belum ada
		Peningkatan Sistem Drainase yang Terintegrasi	Meningkatnya Sistem Drainase yang Terintegrasi	Persentase drainase yang terintegrasi	45%	80
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Tersedianya Rumah Layak Huni di Kabupaten Karo	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	94,4%	100%
		Peningkatan dan Pencegahan Permukiman Kumuh	Terwujudnya 0% Permukiman Kumuh	Luasan lingkungan permukiman kumuh perkotaan (Ha)	54,60	0
		Penataan dan Pengelolaan TPU	Tersedianya TPU yang Tertata dan Terkelola dengan Baik	Ketersediaan TPU yang terkelola dan tertata	0	3 lokasi

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL						
Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal 2019	Kondisi Akhir 2025
		Meningkatkan Ketersediaan Lahan Untuk Fasilitas Pemerintah dan Umum	Meningkatnya Ketersediaan Lahan Untuk Fasilitas Pemerintah dan Umum	Penambahan lahan untuk fasilitas pemerintah dan umum	0	5 lokasi
Membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan pemuda dan masyarakat dalam lingkup pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, keluarga berencana dan pengentasan kemiskinan	Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam lingkup pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, keluarga berencana dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas SDM serta Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Penegakan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Kesejahteraan Sosial serta Kesetaraan Gender	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	20%	30%
				Persentase perempuan yang menduduki jabatan di pemerintahan	5,56%	10%
				Cakupan kasus kenakalan anak	36%	20%
				Cakupan anak korban kekerasan	67%	45%
				Pembentukan aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di setiap desa	5 desa	40 desa
				Pembentukan pusat pembelajaran keluarga di setiap desa	9 desa	45 desa
				Indeks Pembangunan Gender	96,27	96,30%
				Perda PUG	0	1
				Persentase Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan Terpadu	100%	100%
				Persentase Laporan/Pengaduan yang Masuk ke Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%
		Persentase Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	100%	100%		
		Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	26,64	90,2
				Persentase penduduk memiliki akte kelahiran	15,4	80
				Persentase penduduk memiliki e-KTP	99,85	99,87
Persentase penduduk memiliki Akte Perkawinan	27,7			80		
				Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,194	1000

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL						
Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal 2019	Kondisi Akhir 2025
		Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan serta Pelayanan Perpustakaan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan serta Pelayanan Perpustakaan	Persentase Jumlah Kunjungan Terhadap Populasi yang harus dilayani	51,25	70%
				Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	17	(3) 500
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Jumlah Arsiparis	belum ada	25
				Aplikasi Pengarsipan	belum ada	1
		Mengimplementasikan arah kebijakan <i>Grand Design</i> Kependudukan Kabupaten Karo Tahun 2019 - 2043	Meningkatnya kualitas Penduduk dan Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk/tahun (%)	2	1,8
				Laju Pertumbuhan Penduduk/tahun (%)	2	1,8
				Meningkatnya Contraception Prevalence Rate (CPR)	54.080	65.436
				Persentase peningkatan penggunaan MKJP	40,7	49,24
		Peningkatan taraf hidup masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan	Meningkatnya taraf hidup masyarakat miskin	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	8,69	7,76
			Terlaksananya verifikasi dan validasi data kemiskinan secara rutin dan menyeluruh (minimal 2 tahun sekali)	Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial	70%	85%
			Pelayanan Sosial Kepada Penyandang Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	0	70%
		Mempertahankan Predikat Kabupaten Peduli HAM dengan Peningkatan Nilai yang Masih Belum Maksimal	Meningkatnya Nilai Predikat Kabupaten Peduli HAM	Mendapat Penerimaan Anugerah Kabupaten/Kota Penduli HAM	Menerima Anugerah peduli HAM	Menerima Anugerah peduli HAM
				Persentase pencapaian pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia	100%	100%

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL							
Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal 2019	Kondisi Akhir 2025	
		Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana, SDM Pendidik dan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Melek Huruf	99,61	99,65%	
				Rata-rata lama sekolah	9,55	11 tahun	
				APS PAUD	14,14	(1) 25	
				APS SD	94,74	(2) 100	
				APS SMP	96,07	(3) 100	
				Standar Isi	Standar Nasional Level 3	Standar Nasional Level 7	
				Standar Proses			
				Standar Kompetensi Lulusan			
				Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
				Standar Sarana dan Prasarana			
				Standar Pengelolaan			
				Standar Pembiayaan			
				Standar Penilaian Pendidikan			
				Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas SDM, Pelayanan, Prasarana dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	3,91
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	105			60	
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,97			71,3	
		Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk	1 : 102.418			1 : 100.000	
		Sarana dan prasarana puskesmas sesuai standar	68%			100%	
		Ketersediaan dokter spesialis mata	1 (kontrak)			1	
		Ketersediaan dokter spesialis patologi klinis	0			1	
		Ketersediaan dokter spesialis	0			1	
		Anestesi ketersediaan dokter spesialis bedah	1			2	
		Jaminan Kesehatan Masyarakat	75%			>95%	
		Menurunnya Kasus Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyalahgunaan Narkoba	Prevalensi Diabetes			1,20%	0,8%
			Prevalensi Hipertensi			45,50%	41,5%
			Penemuan Kasus Penyakit HIV AIDS pertahun			118	97
			Pengetahuan Masyarakat, remaja dan Anak sekolah atas bahaya Narkoba			100%	100%

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL						
Misi	Tujuan	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal 2019	Kondisi Akhir 2025
		Meningkatkan Pembinaan Olahraga dan Kepemudaan, Sarana dan Prasarana dan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Meningkatnya Pembinaan Olahraga dan Kepemudaan, Sarana dan Prasarana dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional	253	270

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 merupakan pedoman dalam:

1. Penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 merupakan pedoman penyusunan RTRW Kabupaten, RPJM Daerah, Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Karo;
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/Kota;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
6. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholder*) Kabupaten Karo berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, arah kebijakan daerah, dan sasaran pokok dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Karo dengan didukung oleh instansi vertikal Pemerintah Kabupaten Karo, serta masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan daerah, dan sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025.
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;

3. Sekretaris Daerah berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Karo berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, arah kebijakan daerah, dan sasaran pokok sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 yang selanjutnya dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Karo untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas.
5. Dalam pelaksanaan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
6. Hasil pelaksanaan pengawasan internal oleh Pemerintah Kabupaten Karo terhadap implementasi rencana pembangunan dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karo tahun 2005-2025 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten Karo.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005–2025, tergantung komitmen bersama antara penyelenggara pemerintah daerah dengan *stakeholder* dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Karo. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005–2025 ini perlu didukung oleh (1) komitmen dan kepemimpinan yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif serta pemangku kepentingan lainnya.

 **BUPATI KARO,**

TERKELIN BRAHMANA, SH